

171
TS 05/01
Lig
2

REZIM MILITER JEPANG DI INDONESIA

1942—1945

(STUDI TENTANG BIROKRASI DAN AKTIVITAS POLITIK)



MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

OLEH

I WAYAN LEGAWA

**PROGRAM STUDI ILMU-ILMU SOSIAL
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA
2000**

LEMBAR PENGESAHAN

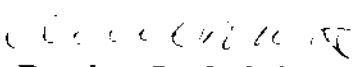
Tesis ini telah diuji dan dinyatakan lulus

Diuji Pada Tanggal : 22 Juli 2000



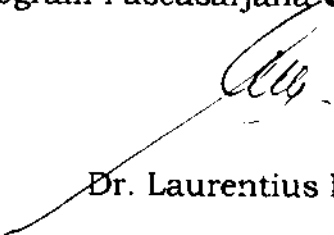
Oleh

Pembimbing


Prof. A. Ramian Surbakti, MA, Ph.D
NIP. 130 701 133

Mengetahui :

Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Sosial
Program Pascasarjana Universitas Airlangga


Dr. Laurentius Dyson P, MA

NIP. 130 937 724

RINGKASAN

Keberhasilan Jepang dalam melaksanakan rehabilitasi setelah berlangsungnya Perang Dunia II, bahkan menjelma menjadi negara raksasa dalam bidang ekonomi dan industri menunjukkan betapa besarnya peranan negara ini untuk bangkit dari kehancuran. Mulai mencairnya hubungan politik antara Jepang dengan negara-negara di Asia Tenggara, menandakan terjadinya pencairan dari kebekuan kultural selama ini. Adanya perbedaan yang mendasar diantara Belanda dan Jepang yang sama-sama pernah menjajah Indonesia, dari sistem administrasi sipil pada masa Belanda menjadi dominasi militer pada masa pendudukan Jepang.

Masalah mendasar yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) Sampai seberapa jauh sistem birokrasi yang diterapkan oleh Jepang berpengaruh terhadap pola dan aktivitas politik, (2) Mengapa gerakan yang mandiri dapat muncul dalam struktur birokrasi otoriter, (3) Bagaimana gerakan politik yang mandiri mensiasati struktur dan penerapan birokrasi Jepang yang otoriter, (4) Upaya apakah yang dilakukan Jepang dalam rangka mengontrol gerakan Politik rakyat.

Metodologi Penelitian ini adalah deskriptif analitis oleh karena tujuan yang ingin dicapai melakukan rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan obyektif melalui pengumpulan data, evaluasi dan verifikasi serta mensintesis bukti-bukti untuk menegakkan fakta. Pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan yang bersifat multidimensional.

Sistem pemerintahan yang diterapkan Jepang didasarkan atas Undang-Undang Nomor 1, tanggal 7 Maret 1942. Berdasarkan ketentuan tersebut Jepang menerapkan sistem birokrasi otoriter. Hal ini tercermin dalam struktur pemerintahan tunggal tanpa adanya kontrol dari perwakilan rakyat. Pada masa pendudukan Jepang gerakan politik yang muncul memiliki lingkup politik, ekonomi, sosial, budaya sedangkan pola yang terjadi adalah memberikan dukungan kepada pemerintah Jepang dan dilain pihak melakukan perlawanan. Oleh karena itu terdapat gerakan politik yang moderat dan radikal. Kontrol terhadap gerakan politik, dilakukan melalui lembaga yang disponsori Jepang sendiri dan memanfaatkan pangreh praja.

Gerakan politik yang terjadi pada masa pendudukan Jepang berupa organisasi yang mendapat dukungan dari pemerintah dan organisasi mandiri yang muncul dari rakyat. Munculnya gerakan yang bersifat mandiri disebabkan karena organisasi yang dibentuk Jepang dianggap kurang militan sehingga tidak memenuhi harapan

masyarakat. Kontrol terhadap gerakan politik dilakukan Jepang melalui pembentukan lembaga-lembaga bersifat semi militer, militer dan juga organisasi kemasyarakatan seperti Tonari Gumi dan Kumiai. Pengaruh sistem birokrasi otoriter terhadap gerakan politik, bahwa Jepang melarang berdirinya gerakan politik termasuk partai politik. Tetapi di pihak lain pemuda, mahasiswa dan petani melakukan gerakan secara radikal bahkan melalui pemberontakan terhadap Jepang.

Kata Pengantar

Dengan mengucapkan syukur penyusun berterimakasih kehadiran Ida Sang Hyang Widhi Wasa, atas segala petunjuk dan bimbingan-Nya sehingga penyusunan tesis ini dapat saya selesaikan.

Dalam penyusunan tesis ini hingga selesai, telah melibatkan berbagai pihak baik secara kelembagaan maupun secara perorangan. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof.A.Ramlan Surbakti, MA.Ph.D selaku pembimbing yang dengan penuh perhatian meluangkan waktu dan memberikan bimbingan kepada penulis selama proses bimbingan.
2. DR. Laurentius Dyson P, MA sebagai Ketua Program S-2 Ilmu-Ilmu Sosial Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga Surabaya.
3. Para Bapak serta Ibu dosen Program Ilmu-Ilmu Sosial Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga Surabaya.
4. Bapak Rektor Universitas Negeri Malang yang telah memberikan ijin untuk melanjutkan pada Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga Surabaya.

5. Teman-teman sejawat baik yang ada di Universitas Airlangga Surabaya dan Universitas Negeri Malang
6. Istri dan anak-anaku yang banyak memberikan motivasi dalam rangka penyelesaian studi ini.

Surabaya, 22 Juli 2000

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penulisan	17
D. Kajian Teoritis	17
E. Metode Penulisan	38
BAB II : SISTEM BIROKRASI MASA JEPANG DAN GERAKAN POLITIK	43
A. Sistem Birokrasi masa kolonial Belanda	
B. Struktur Birokrasi pada masa Jepang	43
C. Lingkup dan pola Gerakan Politik	50
BAB III : BIROKRASI JEPANG DAN GERAKAN POLITIK	106
A. Pengaruh Birokrasi Jepang terhadap Gerakan Politik	106
B. Munculnya Gerakan Politik yang mandiri.....	112
C. Taktik dan Strategi perjuangan Gerakan Politik	114
D. Kontrol Jepang terhadap Gerakan Politik	118
BAB IV : BIROKRASI DAN AKTIVITAS POLITIK	122
BAB V : KESIMPULAN DAN IMPLIKASI TEORITIS	137
A. Kesimpulan	137
B. Implikasi Teoritis	140
C. Kekurangan/Keterbatasan Penelitian Ini	145
DAFTAR KEPUSTAKAAN	149
LAMPIRAN-LAMPIRAN	157

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Terdapat ungkapan bahwa bilamana masa yang baru saja silam atau masa kini bisa memberikan sumbangan untuk memahami sejarah yang lebih baik, maka studi sejarah pada gilirannya mungkin bisa pula memberikan sebuah petunjuk ke arah jawaban masa kini.¹

Kajian ini ditekankan pada pengaruh suatu sistem birokrasi terhadap aktivitas politik, karena kegiatan ini dilakukan dalam tataran kolektif dan individual. Penggunaan istilah aktivitas politik dan tidak menggunakan istilah partisipasi politik karena dalam konteks penjajahan/pendudukan Jepang di Indonesia tidak berada dalam tataran yang sama antara warga masyarakat dengan pemerintah. Dalam rangka menghadapi rezim militer Jepang ini masyarakat Indonesia melakukan "perlawanan" disamping juga "dukungan" terhadap kebijakan Jepang, dan/atau usaha mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Oleh karena itulah istilah yang digunakan bukan perlawanan, partisipasi politik



¹ Benda, H.J, 1930, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit*, Pustaka Jaya, Jakarta, halaman 10.

atau perilaku politik² akan tetapi “aktivitas politik” dengan lingkup dan pola tertentu. Pengkajian terhadap birokrasi dan aktivitas politik rakyat pada masa pendudukan Jepang sangat terkait dengan latar belakang sejarahnya. Hal ini akan memberikan “warna” terhadap posisi Jepang baik pada masa lampau maupun pada masa kini, seperti tercermin dari peristiwa berikut.

Keberhasilan Jepang dalam melakukan rehabilitasi ekonomi setelah Perang Dunia II, bahkan menjelma menjadi negara raksasa dalam bidang ekonomi dan industri maju, menunjukkan betapa besarnya peranan negara ini untuk bangkit dari kehancuran.

Dilihat dari aspek geografis dan demografis munculnya Jepang sebagai kekuatan raksasa memiliki latar belakang sejarah yang unik. Dari aspek geografis Jepang kurang memiliki potensi sebagai negara industri, demikian juga dari aspek demografis penduduknya tidaklah banyak. Semula Jepang menerapkan politik isolasi, namun sejak kedatangan Commodore Perry ke Jepang 1853, akhirnya Jepang mulai terbuka terhadap bangsa asing. Dalam perkembangan selanjutnya Jepang mengalami Meiji Restorasi (14 Desember 1867) kemudian mulai dengan masa modernisasi.

² Istilah perilaku politik tidak digunakan karena konsep ini mengacu pada tindakan yang dilakukan secara individual. Periksa juga dalam: Gabrieli A. Almond dan Sidney Verba, 1990, hal. 189, Ramlan Surbakti, 1992, hal. 15.

Jika dibandingkan dengan masa dimana Indonesia juga pernah dijajah oleh Belanda, maka periode pendudukan Jepang memiliki karakteristik yang berbeda. Kebijakan politik dan birokrasi di antara keduanya tercermin seperti apa yang diuraikan oleh Goto Ken' ichi sebagai berikut:

Civil officials predominated in the Dutch Colonial administration which was supported by a solid bureaucratic organisation headed by the Governor General. Japanese rule, in contrast, was dominated by military men, with army commanders at the top The Netherlands East Indie Government basically tolerated the activities of political parties The policy of the Japanese military administration stood in sharp contrast to that of the Dutch, who had shunned nationalist leader as dangerous.³

Dengan demikian birokrasi dan aktivitas politik rakyat pada masa pendudukan Jepang menjadi penting karena memberikan kontribusi terhadap perkembangan sistem politik dan kenegaraan setelah Indonesia merdeka. Hal ini karena banyak produk hukum jaman penjajahan masih tetap diterapkan sebelum adanya aturan baru setelah Indonesia merdeka bahkan sampai sekarang masih banyak produk hukum kolonial (Belanda) masih diterapkan di Indonesia.

Berdasarkan faktor sejarah tersebut ternyata pengkajian terhadap masa pendudukan Jepang menjadi penting karena

³ *Ibid*, halaman 538-539

bagaimanapun sejarah masa lampau ternyata memberikan "warna" terhadap masa selanjutnya.

Disamping berdasarkan pertimbangan sejarah seperti yang telah diuraikan di atas, kajian terhadap studi terdahulu khususnya yang berkaitan dengan birokrasi dan aktivitas politik merupakan suatu yang signifikan.

Pentingnya studi terdahulu dideskripsikan dalam upaya mengetahui "posisi" penelitian ini dalam konteks penelitian yang pernah dilakukan orang lain. Dengan demikian tidak terjadi duplikasi, dan diharapkan mampu untuk mengisi celah-celah yang belum pernah dibahas dalam penelitian terdahulu. Hal ini didasari oleh suatu kenyataan banyaknya ilmuwan tertarik melakukan pengkajian terhadap sejarah Jepang khususnya dalam kaitannya dengan masa pendudukannya di Indonesia. Khusus yang berkaitan dengan birokrasi dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia dari masa ke masa nampak kajian dari beberapa ahli dalam bidang sejarah maupun politik.

Tercatat Von Heine Gelderen mengkaji struktur pemerintahan dan birokrasi kerajaan Majapahit. Dalam jaman Majapahit birokrasi mencerminkan adanya kekuasaan yang bersifat teritorial yang sentralistik dengan birokrasi yang terperinci. Hal tersebut terjadi karena adanya pengaruh kepercayaan yang bersifat kosmologi,

dimana raja dianggap sebagai replika jagat raya, dewa tertinggi dan penjelmaan dewa sehingga perintahnya diikuti yang menyebabkan terciptanya kekuasaan yang tak terbatas.⁴ Mengenai rincian jenis lembaga serta tugas masing-masing, Moh Yamin mengkajinya dalam Tata Negara Majapahit sebanyak tujuh jilid yang diterbitkan yayasan Prapanca tahun 1960.

Penelitian tentang kerajaan-kerajaan di Nusantara, A.H. Hill menulis tentang raja-raja Pasai bahwa pejabat kerajaan terdiri dari: menteri, hulubalang, sida-sida, embuai, pandita dan beberapa pembesar istana. Disebutkan juga susunan birokrasi pemerintahan Aceh terdiri dari: Perdana Menteri Orang Kaya Maharaja, Orang Kaya Sri Maha Raja Lela, Penghulu Karkun Raja Setia Muda, Karkun Katibal Muluk Sri Indra Suara, Karkun Sri Indra Muda.⁵

Pada masa penjajahan kolonial Belanda, Heather Sutherland meneliti mengenai terbentuknya sebuah elite birokrasi. Hal-hal penting penemuannya bahwa pada masa penjajahan Belanda di Indonesia diterapkan sistem pemerintahan tidak langsung (*indirect rule*). Dengan demikian para pejabat pemerintahan disamping terdiri dari orang-orang Belanda seperti Gubernur, Residen, Asisten

⁴ Heine Gelderen, R.Von, 1972, *Conception of State and King in Southeast Asia*, Terjemahan Deliar Noor, IKIP Jakarta.

⁵ Marwati Djoened Posponegoro, Nugroho Notosusanto, 1984, *Sejarah Nasional Indonesia*, Jilid III, Balai Putaka, Jakarta, halaman 306--307.

Residen dan sebagainya, juga terdapat para pejabat yang berasal dari golongan pribumi seperti Bupati, Patih Wedana dan sebagainya.⁶

Pejabat pribumi ini tetap mempergunakan simbol-simbol penguasa tradisional, yang tercermin dalam letak kabupaten di depan alun-alun, mensakralkan pusaka-pusaka yang sebelumnya merupakan simbol dari kepemimpinan tradisional, khususnya kerajaan yang ada di Jawa. Para pejabat pribumi yang merupakan "rules of the realm" dikenal sebagai "Inlandsch Bestuur" menjelma menjadi elite birokrasi berdasarkan atas sistem kerja, sistem kekerabatan, sedangkan pemerintahan Belanda hanya berperan sebagai pengawas. Mereka tetap memegang tradisi patrimonial sehingga sangat sukar untuk dibedakan antara kepentingan pribadi dan jabatan. Namun demikian lambat laun dengan munculnya Pergerakan Nasional berakibat pula pada rasionalisasi kepegawaian dalam "Beambtenstaat" yang akhirnya melahirkan pemimpin yang didasarkan atas tingkat pendidikan dan tidak semata-mata bersifat patrimonial.⁷

Soemarsaid Moertono dalam penelitiannya "State and Statecraft in Old Java" menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan kedudukan,

⁶ Sutherland, H. 1983, *Terbentuknya Sebuah Elite Birokrasi* Penerbit Sinar Harapan, Jakarta, halaman 6

⁷ *Ibid*, halaman 7

kewenangan, tugas terutama dalam kaitannya dengan masalah tata pemerintahan khususnya pada jaman kerajaan Mataram.

Berkaitan dengan masa Jepang di Indonesia Sato Shigeru melakukan pengkajian tentang 'Pangreh Praja' di Jawa.⁸ Adapun pokok-pokok temuan dalam penelitiannya ini adalah sebagai berikut.

1. Pangreh Praja (*Rulers of the Realm*) yang pada masa penjajahan Belanda dikenal dengan 'Inlandch Bestuur' adalah penguasa setempat dari kerajaan tradisional. Mereka menjadikan masyarakat di daerah pedesaan sebagai objek sistem pemerasan dalam pemerintahan.
2. Dalam pelaksanaannya, pemerintahan Pangreh Praja sering membuat kebijakan yang mungkin dilaksanakan oleh rakyat di pedesaan.
3. Terdapat tiga kebijakan yang dilakukan, yaitu (a) melaksanakan suatu kebijakan tanpa memperhatikan akibat yang akan timbul, (b) membela atau melindungi sekelompok masyarakat tertentu, (c) memupuk kekayaan untuk kepentingan mereka sendiri seperti melakukan korupsi. Akibatnya terjadi kekacauan yang sporadis yang mendorong terjadinya revolusi sosial. Hal ini

⁸ Shigeru, Sato, 1996, *The Pangreh Praja in Jawa under Japanese Military Rule*, BIJDRAGEN, Journal of the Royal Institute of Linguistics and Anthropology, Deel 152. 4e, halaman 606.

nampak setelah pendudukan Jepang berakhir, sebutan Pangreh Praja diganti dengan Pamong Praja.

4. Bahwa pendudukan Jepang tidak hanya berpengaruh terhadap kesejahteraan rakyat, akan tetapi berpengaruh juga terhadap hubungan kekuasaan khususnya di pedalaman masyarakat Jawa. Ini berarti ada pengaruh pendudukan Jepang terhadap sistem administrasi di daerah.

Hasil penelitian Sato Shigeru ini memiliki perbedaan dengan kajian yang akan saya lakukan. Disamping perbedaan dari aspek geografis, juga terdapat perbedaan dalam perspektif yaitu bahwa Sato Shigeru menekankan pada aspek administrasi di daerah, sedangkan kajian saya adalah menekankan pada seberapa besar pengaruh sistem birokrasi Jepang terhadap aktivitas politik rakyat. Namun demikian, kajian Sato Shigeru ini memberikan sumbangan dan menjadi salah satu landasan dalam mengkaji sistem birokrasi pada masa pendudukan Jepang.

Disamping berkaitan dengan birokrasi, dalam periode pendudukan Jepang banyak kajian dilakukan oleh para ahli ilmu sosial. Hari J. Benda dalam bukunya "The Crescent and Rising Sun" yang kemudian diterjemahkan oleh Daniel Dhakidae (Bulan Sabit dan Matahari Terbit) mencoba menelusuri perkembangan Islam Indonesia

dan peranannya penuh liku-liku yang dimainkannya dalam sejarah politik Indonesia di bawah kekuasaan asing.⁹ Pada masa penjajahan Belanda, walaupun partai Islam seperti Sarekat Dagang Islam, Sarikat Islam, tidak diberikan badan hukum, tetapi dalam prakteknya organisasi tersebut tetap eksis. Berbeda dengan masa pendudukan Jepang, tidak hanya partai Islam yang tidak diperbolehkan berdiri, akan tetapi semua kegiatan organisasi yang berbau politik dilarang. Namun demikian, Islam dapat bergerak dalam bentuk organisasi yang tidak memakai baju politik. Oleh karena itu digalang kerja sama antara Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah melahirkan suatu federasi Islam yaitu MIAI (Madjlisul Islamil A'laa Indonesia), atau Majelis Agung Islam Indonesia yang didirikan di Surabaya pada bulan September 1937.¹⁰

Aiko Kurasawa dalam bukunya : "Mobilisasi dan Kontrol", Sebuah studi tentang perubahan sosial di pedesaan Jawa 1942-1945, mencoba menganalisis perubahan-perubahan sosial, ekonomi dan psikologis pada masa pendudukan Jepang selama tiga setengah tahun di masyarakat pedesaan Jawa.¹¹

⁹ Benda, H. J, *Op. Cit.* Halaman 19.

¹⁰ *Ibid*, halaman 119.

¹¹ Aiko Kurasawa, 1993, *Mobilisasi dan Kontrol: Studi tentang perubahan sosial di pedesaan Jawa, 1942-1945*, Penerbit Grasindo, Jakarta, halaman 495.

Selama masa pendudukannya di Indonesia, Jepang melakukan propaganda melalui media massa, pendidikan dan organisasi. Usaha ini bersifat politik, karena mobilisasi didasarkan atas ideologinya Jepang. Akan tetapi dilain pihak mendatangkan akibat dimana rakyat mulai mengalami kebangkitan kesadaran politik.¹² Hal ini tercermin dari meningkatnya mobilitas sosial diantara penduduk desa baik secara horizontal maupun vertikal, zona kegiatan mereka meningkat, sekaligus merangsang timbulnya perasaan "identitas nasional".¹³ Itu semua dapat meningkatkan keragaman dan diversifikasi masyarakat seperti cara berfikir, bertingkah laku yang baru, terjadinya pola-pola persekutuan dan terjadinya persaingan. Ini juga berarti bahwa kebijakan yang dilakukan Jepang mengakibatkan terjadinya bermacam-macam perubahan sosial khususnya pada masyarakat pedesaan. Akibat selanjutnya ialah Jepang melakukan kontrol yang kuat terutama terhadap usaha-usaha dan kegiatan ekonomi .

Syaifullah dalam tesisnya pada Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 1996 juga mengkaji Muhammadiyah dan Islam di Indonesia. Hanya saja fokus perhatiannya ditujukan pada perilaku politik sejak masa pendudukan Jepang sampai masa Demokrasi Liberal, sehingga menambah wacana

¹² *Ibid*, halaman 501

¹³ *Ibid*, halaman 501

mengenai pengkajian politik Islam di Indonesia, khususnya pada pendudukan Jepang.

Soepomo seorang ahli hukum Indonesia yang kemudian menjadi tokoh utama dalam penyusunan UUD 1945, pada tahun 1960 menerbitkan artikel "On the Japanese Reforms of the Judiciary in Indonesia" membahas mengenai penggabungan sistem peradilan dengan sistem administrasi Jepang dengan sistem Belanda yang ada sebelumnya, karena selama ini begitu kuatnya pengaruh sistem peradilan Eropa. Seperti yang dibahas oleh Bas Pompe, bahwa dalam usaha mengisi sistem peradilan Belanda, para hakim berpendidikan Jepang mengisi kekosongan tersebut dalam beberapa tahun.

G. Mac T. Kahin dalam bukunya yang berjudul *Nationalism and Revolution in Indonesia* (Cornell Univ. Press, 1952), membahas peranan kaum intelektual dalam membebaskan diri dari penjajahan. Golongan terpelajar inilah yang kemudian menjadi pelopor dalam pergerakan nasional. Hal itu dikuatkan oleh pengkajian Benedict Anderson mengenai peranan pelajar dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, dalam bukunya: *Java in A Time Of Revolution Occupation and Resistance, 1944-1946* yang diterbitkan pada tahun 1972 oleh Cornell Univ. Press.

Mengenai peranan militer (ABRI) pengkajian pada masa pendudukan Jepang ini dilakukan oleh Nugroho Notokusanto yang

dalam disertasinya membahas mengenai pemberontakan Tentara PETA di Blitar.¹⁴

Han Bing Siong meneliti lebih lanjut mengenai sistem administrasi yang dianggap sebagai mitos dan realitas. Kajiannya mengenai produk-produk hukum yang pernah dikeluarkan Jepang di Indonesia. Pembahasannya itu sekaligus memberikan kontribusi tentang pandangan Pompe dalam hal dampak administrasi Jepang terhadap sistem peradilan di Indonesia.¹⁵

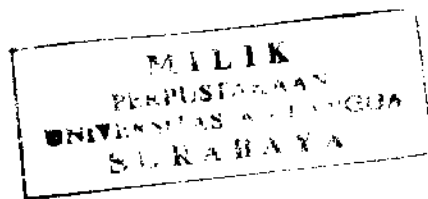
Peter Post melakukan pengkajian dalam bidang ekonomi khususnya kedudukan elite pribumi dalam bidang bisnis. Hal ini mengingatkan betapa besarnya pengaruh golongan ini dalam pengambilan kebijakan ekonomi. Dalam kajiannya itu juga digambarkan siapa-siapa dan bagaimana peranan kelompok Cina dalam perdagangan.¹⁶ Disamping kelompok Cina yang memiliki aset komunikasi dengan pengambil keputusan, elite pribumi juga menjadi kaki tangan Jepang. Mereka dilahirkan dan bekerja sama dengan Jepang.

Pengkajian dalam hal pola kerjasama dengan Jepang yang terjadi pada saat itu dilakukan oleh Bernhard Dahm dalam bukunya

¹⁴ Shigeru, Sato, *Op.Cit.* halaman 586.

¹⁵ Siong, Han Bing, 1998, *The Japanese Occupation of Indonesia and the Administration of Justice Today, Myths and Realities*, BIJRAGEN, Journal of the Humanities and Social Sciences of the Southeast Asia and Oceania, 154.3, halaman 416

¹⁶ Post, Peter, 1996, *The Formation of the Pribumi Business Elite in Indonesia, 1930s—1940s*, BIJRAGEN, Journal of the Royal Institute of Linguistics and Anthropology, Deel 152, 4e, halaman 609.



“Soekarno and The Struggle for Indonesian Independence” yang kemudian diterbitkan LP3ES dalam bahasa Indonesia “Soekarno dan Perjuangan Kemerdekaan”. Dalam bukunya tersebut dapat diketahui bahwa ternyata terdapat aktivitas politik rakyat dengan dua pola yaitu ada Co (bekerjasama dengan Jepang) dan non Co (tidak bekerjasama).

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1). Berdasarkan UU Nomor 1, tanggal 7 Maret 1942, secara eksplisit sebutkan , bahwa sistem pemerintahan Jepang di Indonesia ialah pemerintahan militer. Dengan ciri-ciri yang melekat dalam sistem pemerintahan tersebut seperti terjadinya depolitisasi permasalahan, tertutupnya saluran demokrasi, tidak diikutsertakannya sektor rakyat, maka sistem birokrasi yang dianut oleh regim militer pada masa pendudukan Jepang adalah birokrasi otoriter.
- 2). Penelitian tentang birokrasi dalam perjalanan sejarah Indonesia telah banyak dilakukan oleh para ahli Ilmu Sosial pada masa sebelum dan sesudah pendudukan Jepang. Karena itu kajian tentang sistem birokrasi pada masa pendudukan Jepang merupakan suatu yang relevan untuk diteliti lebih lanjut.
- 3). Kajian mengenai gerakan politik dalam perjalanan sejarah Indonesia khususnya pada masa pendudukan Jepang banyak ber-

kaitan dengan gerakan organisasi yang sengaja dimobilisasi oleh Jepang.

- 4). Dalam penelitian ini pokok kajian difokuskan pada gerakan politik yang bersifat mandiri (*Angkatan Moeda Indonesia, Gerakan Angkatan Baroe Indonesia, Ika Daigaku dan BAPERPI*) yang dilihat dari berbagai aspek (latar belakang, siasat, taktik dan strategi) yang dimiliki organisasi ini dalam sistem birokrasi yang bersifat otoriter.

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, berikut dirumuskan permasalahan, yang menjadi pokok-pokok kajian dalam penelitian selanjutnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1). Sampai seberapa jauh sistem birokrasi yang diterapkan pemerintah Jepang berpengaruh terhadap lingkup dan pola aktivitas politik rakyat, khususnya gerakan politik yang bersifat mandiri ? Sistem birokrasi otoriter yang diterapkan Jepang, tentunya dapat memberikan dampak terhadap keberadaan suatu organisasi dalam suatu pemerintahan. Dalam tatanan kenegaraan yang demokratis tentunya suatu organisasi akan mendapat perlindungan dan

jaminan untuk dapat melaksanakan aktivitasnya. Namun demikian dalam suasana dimana negara didasarkan atas tatanan yang otoriter tentunya akan membawa dampak baik dilihat dari aspek lingkungannya (politik, ekonomi, sosial, budaya, agama), maupun dalam kaitannya dengan pola (bekerja sama dengan Jepang atau melakukan perlawanan).

- 2). Mengapa gerakan politik yang bersifat mandiri muncul ditengah-tengah struktur birokrasi otoriter yang diterapkan pemerintah pendudukan Jepang ? Dalam tatanan kehidupan yang otoriter tentunya terjadi tekanan yang bersifat represif dari penguasa. Hal ini dilakukan dalam upaya memelihara ststus quo. Dilain pihak adanya tekanan yang mematikan aktivitas politik, justru akan memunculkan gerakan di luar kontrol pemerintah. Gerakan seperti itu merupakan refleksi dari ketidak mampuan pemerintah untuk memberikan wadah bagi setiap warga negara dalam upaya partisipasi politiknya.
- 3). Bagaimanakah gerakan politik yang mandiri tersebut mensiasati struktur dan penerapan birokrasi Jepang yang otoriter ? Dengan adanya larangan terhadap berdirinya organisasi dan kegiatan politik melalui peraturan pemerintah, sebagai warga negara yang memiliki hak-hak politik, tentunya akan mencari jalan lain untuk dapat ikut melakukan aktivitas politik sebagai implementasi dari

hak warga negara. Oleh karena dengan memberikan label politik bukan satu-satunya cara untuk mampu memberikan kontrol terhadap pemerintah, maka gerakan itu dibungkus dengan label budaya, agama dan pendidikan sehingga sebenarnya memiliki tujuan yang sama dengan gerakan politik.

- 4). Upaya apakah yang dilakukan Jepang dalam rangka mengontrol gerakan politik rakyat ? Sebagai negara penjajah salah satu tujuan yang ingin dicapai adalah bagaimana mereka mampu mempertahankan kekuasaannya. Oleh karena itu pemerintah memerlukan instrumen untuk mengawasi khususnya terhadap gerakan-gerakan yang dianggap membahayakan kelangsungan hidup mereka. Upaya yang dilakukan dapat berupa aturan yang mengikat dan tidak jarang bersifat diskriminatif, membentuk lembaga pengawasan, memanfaatkan militer sebagai lembaga yang memberikan tekanan dan intimidasi terhadap rakyat atau menerapkan hukuman yang berat terhadap siapa saja yang dianggap membahayakan kehidupan negara.

C. Tujuan Penulisan

- 1). Menjelaskan sampai seberapa jauh sistem birokrasi yang diterapkan pemerintah Jepang berpengaruh terhadap lingkup dan pola aktivitas politik rakyat, khususnya gerakan politik yang mandiri.
- 2). Menjelaskan mengapa gerakan politik yang bersifat mandiri muncul ditengah-tengah struktur birokrasi otoriter yang diterapkan pemerintah pendudukan Jepang .
- 3). Menjelaskan bagaimana gerakan politik yang mandiri tersebut mensiasati struktur dan penerapan birokrasi Jepang yang otoriter.
- 4). Menjelaskan upaya apakah yang dilakukan Jepang dalam rangka mengontrol gerakan politik rakyat ?

D. Kajian Teoritis

Yang menjadi kata kunci dalam kajian ini adalah “birokrasi” dan “aktivitas politik”. Karena itu dalam bab ini secara teoretis dikaji keterkaitan birokrasi dengan aktivitas politik khususnya pada masa pendudukan Jepang.

1. Konsep dan Ruang Lingkup Birokrasi

Istilah birokrasi dalam literatur ilmu administrasi sering dipergunakan dalam berbagai pengertian. Yang sering terkandung dalam istilah birokrasi, yaitu ketidakefisienan organisasi

(*organizational inefficiency*), pemerintah oleh para pejabat (*rule by officials*), administrasi negara (*public administration*), administrasi oleh para pejabat (*administration by officials*). Bentuk organisasi birokrasi biasa lekat dengan ciri-ciri dan kualitas tertentu seperti hirarki dan peraturan-peraturan, salah satu ciri yang mutlak dalam masyarakat modern.¹⁷

Secara sosiologis birokrasi ditandai dengan adanya tipe hubungan sosial tertentu yaitu adanya sistem hirarki kewenangan dalam koordinasi secara horisontal. Selain itu birokrasi juga merupakan sistem kekuasaan yaitu organisasi sosial yang tujuannya mengontrol dan mendistribusikan sumber daya manusia baik bersifat materiil maupun berupa informasi.

Jika dikaji dari asal mulanya, biro-biro pada umumnya diciptakan dengan 4 cara.¹⁸

1). Routinization of Charisma

Istilah yang dipakai dari Max Weber, yaitu bahwa terbentuknya suatu biro karena kesetiaan pada pemimpin kharismatik. Pada mulanya mereka muncul dari kelompok orang yang fanatik (*zealot*) seperti yang dikatakan oleh Anthony Downs: "*In a vast majority of cases, a bureau starts as the result of aggressive agitation and*

¹⁷ Akhmad Setiawan, 1998, *Perilaku Birokrasi Dalam Pengaruh Paham Kekuasaan Jawa*, Pustaka Pelajar, Jakarta, halaman 142-143.

¹⁸ Downs, Anthony, 1967, *Inside Bureaucracy*, Little, Brown and Company, Boston, halaman 5

action by a small group of zealots who have a specific idea they want to put into practice on a large scale".¹⁹

- 2). Untuk melaksanakan suatu fungsi spesifik.
- 3). Sebagai lembaga yang terpisah dari suatu biro yang sudah ada karena suatu tujuan tertentu.
- 4). Diciptakan melalui *enterpreneurship* mendapatkan dukungan cukup untuk mendirikan dan mengorganisasikan suatu organisasi yang besar.

Daam memahami konsep birokrasi, berbagai sumber menjelaskan pengertian yang berbeda-beda. Faling sedikit terdapat tujuh konsep tentang birokrasi yaitu: (1) Organisasi rasional/ Rational Organization, (2) Inefisiensi Organisasi/Organizational Inefficiency, (3) Kekuasaan yang dijalankan oleh pejabat/Rule of Officials, (4) Adminitrasi Negara/Public Administration, (5) Administrasi yang dijalankan oleh pejabat/Administration of officials, (6) Sebuah organisasi/ Type of Organization with specifif characteristic and quality as hierarchies and rule, (7) Masyarakat modern/ an essential quality of modern society.²⁰

Dari ketujuh pengertian tersebut paling sedikit dapat dikelompokkan ke dalam tiga macam yaitu birokrasi diartikan sebagai *Government by Bureaus* yang terdiri dari: (1) Pemerintahan biro oleh

¹⁹ *Ibid*, halaman 5

²⁰ Albro, Martin, 1996, *Birokrasi*, PT.Tiara Wacana, Yogyakarta, halaman 82-100.

personil yang diangkat oleh pengusaha, (2) Pemerintahan yang kacau, macet, (3) Sebagai tipe ideal organisasi.²¹ Term yang sama dilakukan oleh Priyo Budi Santoso yang mensistematisasikan dalam tiga katagori yaitu *pertama* birokrasi dalam pengertian baik dan rasional seperti dalam pengertian Hegelian Bureaucracy dan Weberian Bureaucracy, *kedua* birokrasi dalam pengertian sebagai suatu penyakit (bureau pathology) seperti yang dikemukakan oleh Karl Marx, Laski, Robert Michels dan sebagainya, serta *ketiga* birokrasi dalam pengertian netral/Value Free.²²

Max Weber tidak pernah mendefinisikan birokrasi karena tidak dianggap bagian dari ilmu sosial. Ia lebih cenderung memahami konsep birokrasi lebih relevan mengaitkan dengan kategori-kategori analisis organisasi. Karena itu pemahamannya pada *legitimasi otoritas* sehingga melahirkan: otoritas kharismatik yaitu kepatuhan dibenarkan (sah) karena orang yang memberikan tatanan memiliki kesucian; otoritas tradisional yaitu semua perintah dipatuhi karena hormat terhadap tatanan lama yang telah mapan dan otoritas legal yaitu berbuat sesuai dengan tugas-tugasnya yang ditetapkan dalam suatu peraturan.

²¹ Taliziduhu Ndraha, 1986, *Birokrasi Pembangunan, Dominasi atau Alat Demokrasi*, Jurnal Ilmu Politik Nomor 1, halaman 48.

²² Priyo Budi Santoso, 1995, *Birokrasi Pemerintah Orde baru, Perpektif Kultural dan Struktural*, PT.Raja Grasindo Persada, Jakarta, halaman 14.

Max Weber memandang birokrasi rasional merupakan unsur pokok dalam rasionalisasi dunia modern. Karena itu dia menyebut proposisi-proposisi menurut legitimasi dan otoritas yang memiliki ciri-ciri:

- 1). *Para anggota staf secara pribadi bebas, hanya menjalankan tugas-tugas impersonal jabatan mereka*
- 2). *Ada hirarki jabatan yang jelas*
- 3). *Fungsi-fungsi jabatan ditentukan secara jelas*
- 4). *Para pejabat diangkat berdasarkan suatu kontrak*
- 5). *Mereka dipilih berdasarkan kualifikasi profesional, idealnya didasarkan suatu diploma (ijazah) yang diperoleh melalui ujian*
- 6). *Mereka memiliki gaji yang biasanya ada juga hak-hak pensiun. Gaji berjenjang menurut kedudukan dalam hirarki. Pejabat dapat selalu menempati posnya, dan dalam keadaan-keadaan tertentu dia juga dapat diberhentikan.*
- 7). *Pos jabatan adalah lapangan kerjanya sendiri atau lapangan kerja pokoknya*
- 8). *Terdapat suatu struktur karir, dan promosi dimungkinkan berdasarkan senioritas maupun keahlian (merit) dan menurut pertimbangan keunggulan (superior)*
- 9). *Pejabat mungkin tidak sesuai dengan posnya maupun dengan sumber-sumber yang tersedia di pos tersebut*
- 10). *la tunduk pada sistem disipliner dan kontrol yang seragam.*²³

Disamping birokrasi difahami sebagai birokrasi rasional, birokrasi juga dipahami dalam kaitannya dengan birokrasi patologi. Karena itu dalam konteks ini birokrasi dilihat sebagai suatu struktur yang mengambil bentuk oligarki. Oleh karenanya pandangan ini sering disebut the Iron Law Oligarchy.²⁴

²³ Albro, Martin, *Op.Cit.*, halaman 33-34.

²⁴ Priyo Budi Santoso, *Op.Cit.*, halaman 12.

Ransay Muir, pada tahun 1910 dalam bukunya "Bureaucracy in England" menyatakan bahwa birokrasi adalah penyelenggara kekuasaan oleh administrator yang profesional.²⁵ Demikian juga pada tahun 1948, John Stuart Mill dalam bukunya "Principles of Political Economy" menjelaskan bahwa pemusatan segala ketrampilan dan pengalaman dalam menangani kepentingan-kepentingan besar di tangan birokrasi yang dominan, dan semua kekuasaan yang mengorganisasikan tindakan yang ada pada masyarakat. Hal ini merupakan penyebab utama rendahnya bagi kemampuan kehidupan politik.²⁶

Dalam prakteknya disamping birokrasi Weberian di atas, suatu birokrasi dapat berwujud dalam bentuk/model seperti:

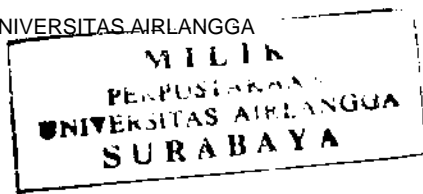
1). Birokrasi dalam artian Orwellization.

Merupakan perluasan dan peningkatan kontrol birokrasi terhadap kehidupan masyarakat. Karena rasionalisasi masyarakat akan memperkuat peran mereka yang memiliki keahlian (biokrat dan teknokrat) dalam berbagai kehidupan masyarakat.²⁷

²⁵ Albrow, Martin, *Op.Cit.*, halaman 12.

²⁶ Albrow, Martin, *Op.Cit.* halaman 8-9.

²⁷ Ramlan Surbakti, 1996b, *Birokrasi Berdimensi Kerakyatan*, Makalah Seminar, Universitas Muhammadiyah Malang, halaman 2.



2). Biokrasi Parkinsonisme

Biokrasi yang menunjukkan pada usaha untuk selalu ingin menambah jumlah satuan unit kerja dan jumlah pejabat/pelaksananya. Ini menyebabkan timbulnya bibit penyakit proiiferasi.²⁸

Setiap pegawai ingin memiliki otoritas, maka akan terjadi penambahan pegawai dengan mengembangkan pekerjaan baru, yang dapat secara horisontal maupun vertikal (involusi birokrasi) sehingga merupakan pemborosan.

3). Burocratic polity

Seperti yang dikemukakan oleh Karl D. Jackson yaitu suatu kepolitikan birokrasi yang dibedakan berdasarkan derajat proses pembuatan keputusan pada tingkat nasional dan kekuatan-kekuatan sosial politik di luar eselon elite tertinggi di ibukota.²⁹

Birokrasi polity adalah suatu sistim politik dimana kekuasaan dan partisipasi politik dalam membuat keputusan terbatas sepenuhnya pada para pengusaha negara, terutama pada perwira militer dan pejabat tinggi birokrasi.³⁰ Seperti yang dikutip oleh

Priyo Budi Santoso, Karl D. Jackson menulis:

"Bureaucratic-polity is a political system in which power and participation in national decision are limited almost entirely to the state, particularly the officer corps and the highest levels of the

²⁸ Akhmad Setiawan, *Op.Cit.* halaman 13.

²⁹ Manuel Kaiseiepo, 1987, *Dari Kepolitikan Birokratik ke Korporatisme Negara, Birokrasi dan Politik di Indonesia Era Orde Baru*, *Jurnal Ilmu politik*, Nomor 2, halaman 26.

³⁰ Priyo Budi Santoso, *Op.Cit.* halaman 30.

*bureaucracy, including especially the highly trained specialist known as technocrats In the case of the military and the bureaucracy are not accountable to other political forces such as political parties, interest group or organized communal interest. Actions designed to influence governmental decisions originates entirely within the elite it self without any need for mass participation of mobilisation. Power does not result from the articulation of interest from the social and geographical periphery of society.*³¹

Di samping itu terdapat juga sifat-sifat yang dimiliki oleh birokrasi polity yaitu: (1) Status keanggotaan politik sejati, (2) Luasnya peranan birokrasi baik sipil maupun militer, (3) Menonjolnya loyalitas orang atas lembaga, (4) Berfokus pada ideologi, (5) Tidak jelas batas antara kepentingan umum dan pribadi, (6) Adanya intervensi bukan pejabat terhadap keputusan resmi, (7) Tidak ada mobilisasi masa dalam melawan nilai-nilai tradisional dan para elite, (8) Adanya tekanan melalui modal swasta, (9) Terbatasnya partisipasi politik.³²

4). Birokrasi Patrimonial

Konsep ini berkaitan dengan suatu fenomena dimana jabatan dan perilaku dalam keseluruhan hirarki lebih didasarkan pada hubungan dalam konteks patron-client relationship. Karena itu ciri-ciri birokrasi patrimonial adalah: (1) Pejabat-pejabat disaring atas dasar kriteria pribadi dan politik, (2) Jabatan dipandang

³¹ *Ibid.*, halaman 30.

³² Akhmad Setiawan, *Op. Cit.*, halaman 24

sebagai sumber kekayaan atau keuntungan, (3) Pejabat melakukan kontrol fungsi politik maupun administrasi oleh karena tidak ada pemisahan antara sarana produksi dan administrasi, (4) Setiap tindakan diarahkan oleh hubungan pribadi dan politik.³³

Di samping bentuk-bentuk seperti di atas itu, terdapat juga model birokrasi otoriter yang melihat otoritas utama terletak pada militer sebagai institusi dari pada individu pemimpin. Birokrasi militer seperti ini mengadopsi pendekatan teknokratik dalam pembuatan kebijakan nasional.³⁴

Timbulnya negara Birokrasi otoriter adalah sebuah gejala sistem politik spesifik sebagai salah satu respon terhadap apa yang disebut sebagai proses *deepening* (perluasan) dari industrialisasi dan pembangunan ekonomi negara-negara kapitalis pinggiran.³⁵ Jika mengacu pada teori ketergantungan, proses industrialisasi menyebabkan munculnya diferensiasi peran-peran dan fungsi-fungsi dalam masyarakat. Dilain pihak negara perlu mengadakan pengawasan terhadap proses *deepening* yang muncul sehingga melahirkan negara yang menerapkan birokrasi otoriter.

³³ Priyo Budi Santoso, *Op. Cit.*, halaman 22-23.

³⁴ Ramlan Surbakti, *Op. Cit.*, halaman 5.

³⁵ Muhamad A.S. Hikam, 1991. *Negara Otoriter Biokratik dan Demokratisasi*, Jurnal Ilmu Politik Nomor 8, halaman 68.

Munculnya negara (sistem pemerintahan) birokrasi otoriter Guillermo O'Donnell memberikan beberapa ciri: (1) Dominasi melalui struktur kelas, (2) Terdapat sarana pemaksa, (3) Sistem eksklusif politik, (4) Penindasan terhadap warga negara, (5) Tidak mengikutsertakan sektor rakyat, (6) Transnasionalisasi struktur produksi, (7) Mendepolitisasi permasalahan, (8) Menutup saluran Demokrasi.³⁶ Bahwa berkembangnya birokrasi dalam kapitalisme modern merupakan sebab dan akibat dari rasionalisasi hukum, politik dan industri.³⁷

Dalam menganalisis perkembangan birokrasi di Indonesia ahli barat menggunakan pendekatan kultural yang berasumsi bahwa masih terdapat warisan tradisi dan budaya politik masa lampau khususnya Jawa oleh karena masih menampilkan karakteristik patrimonial. Jabatan dan hirarki birokrasi didasarkan atas hubungan personal atau hubungan bapak-anak/patron client.³⁸

Jika mengacu pada sistem pemerintahan Jepang di Indonesia, secara hukum, pemerintahan Militer Jepang didasarkan pada Undang-Undang nomor 1 tanggal 7 Maret 1942 yang menyebutkan

³⁶ O'Donnell, Guillermo, *Berbagai Ketergantungan di Negara Otoriter- Birokratik: dan Masalah Demokrasi*, Dalam Macridis, Roy C, dan Bernard Brown (ed), Perbandingan Politik, Penerbit Erlangga, Jakarta, halaman 201-202

³⁷ Giden, Anthony, 1985, *Kapitalisme dan Teori Sosial Modern, Suatu Analisis Terhadap Karya Tulis Marx, Durkheim dan Max Weber*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, halaman 224.

³⁸ Manuel Kaisiepo, *Op.Cit*, halaman 24.

bahwa "Eala Tentara Nippon" melangsungkan pemerintahan militer demi keamanan.

Munculnya Jepang sebagai fenomena baru dalam sejarah dunia sebagai suatu negara militeristik yang ekspansionis dengan mempraktekan sistem birokrasi otoriter tidak terlepas dari perkembangan dalam kapitalisme modern seperti yang dikatakan oleh Anthony Gidden di atas, sebagai akibat dari rasionalisasi hukum, politik dan industri. Munculnya Jepang sebagai salah satu negara industri (Kapitalisme pinggiran) tidak terlepas dari usaha barat untuk membuka Jepang dari ketertutupannya yang dilakukan sebelum Restorasi Meiji. Modernisasi yang terjadi di Jepang memaksa kemampuan mengakomodir munculnya diferensiasi baru berupa fungsi-fungsi dan peran-peran sehingga harus meluaskan wilayah kekuasaannya dengan menduduki negara-negara lain termasuk Indonesia.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sistem birokrasi yang diterapkan Jepang di Indonesia diduga lebih mengarah pada "birokrasi otoriter". Seperti yang dikatakan oleh Guilermo O' Donnell di atas bahwa adanya penafsiran di sistem yang eksklusif, tidak mengikutsertakan sektor rakyat, depolitisasi permasalahan serta tertutupnya saluran demokrasi. Pemerintahan Jepang di Indonesia

memang dalam konteks penjajahan, namun demikian Jepang memiliki kedudukan sebagai sebuah "regim" yang diatur dalam suatu UU, yaitu UU Nomor 1 tanggal 7 Maret 1942. Dalam UU ini secara eksplisit disebutkan bahwa Balatentara Nippon melangsungkan *pemerintahan militer*. Oleh karena berbentuk suatu pemerintahan, tentu ada kelompok *the rule class* (Jepang) dan *the ruling class* (bangsa Indonesia), walaupun dalam bentuk pemerintahan yang bersifat fasis.³⁹

Penerapan model birokrasi otoriter tersebut dapat menimbulkan implikasi terhadap lingkup dan pola aktivitas politik rakyat. Dilihat dari aspek lingkungannya aktivitas ini dapat bersifat individual dan kelompok, menyangkut berbagai aspek seperti agama, budaya dan ekonomi. Sedangkan pola yang ditempuh dalam mencapai tujuannya adalah bekerjasama dengan Jepang (*cooperative/moderat*) atau tidak mau bekerjasama (*non cooperative/radikal*).

2. Aktivitas politik

Aktivitas politik atau kegiatan politik memiliki cakupan yang luas. Artinya bahwa istilah ini menjangkau segala aktivitas masya-

³⁹ Fasisme lebih merupakan gaya politik daripada ideologi. Fahaman ini merupakan fahaman nasionalisme yang romantis dengan segala kemegahan upacara dan simbol-simbol yang mendukung tercapainya kebesaran negara. Penimpin kharismatik menjadi simbol kebesaran rakyat (Ramlan Surbakti, 1992, halaman 38).

rakat yang dapat dilakukan oleh individu maupun kelompok, dapat juga berupa dukungan terhadap rezim atau juga berupa perlawanan.

Seperti telah dijelaskan pada Latar Belakang, penggunaan istilah "aktivitas politik" dan tidak "partisipasi politik" oleh karena terdapat tataran yang tidak sama antara warga masyarakat dan pemerintah sebagaimana halnya yang terjadi dalam hubungannya dengan partisipasi politik.

Beberapa fenomena yang dapat dikategorikan sebagai bentuk aktivitas politik seperti para anggota keluarga yang sudah berhak memilih dalam suatu "pemilu" kemudian mereka aktif dalam kampanye, memberikan iuran, menulis surat untuk wakil rakyat atau pejabat pemerintah, mereka sesungguhnya melakukan aktivitas atau kegiatan politik⁴⁰.

Dalam hubungan ini Samuel P. Huntington mengatakan bahwa terdapat banyak aktivitas/gerakan (kegiatan) politik yang bukan partisipasi politik, termasuk bagian terbesar kegiatan mereka yang paling aktif dalam politik⁴¹. Dengan demikian aktivitas politik tidak sama dengan partisipasi politik. Partisipasi politik tidak mencakup kegiatan pejabat-pejabat pemerintah, pejabat partai, calon-calon

⁴⁰ Ramlan Surbakti, 1992, *Memahami Ilmu Politik*, Penerbit Gramedia Widiasarana, Jakarta. Hal. 16.

⁴¹ Huntington. P. Samuel dan Joan Nelson, 1994. *Partisipasi Politik Di Negara Berkembang*, Penerbit Rimeka Cita, Jakarta, hal. 7.

politik dan lobbyist profesional. Kegiatan yang dilakukan mereka terputus-putus, hanya sebagai sambilan (*avocational/secunder* saja). Dengan demikian terdapat banyak aktivitas/kegiatan politik yang bukan partisipasi politik.⁴²

Dalam kaitannya dengan munculnya suatu aktivitas politik, terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan timbulnya gerakan lebih luas dalam proses politik. Faktor-faktor yang dimaksud adalah sebagai berikut.

- 1). Modernisasi komersialisasi pertanian, industrialisasi, urbanisasi yang meningkat penyebaran kepandaian baca tulis, perbaikan pendidikan dan pengembangan komunikasi massa.
- 2). Perubahan-perubahan struktur kelas sosial. Terbentuknya kelas kerja baru dan kelas menengah sebagai akibat dari proses modernisasi dan industrialisasi berdampak pada pola partisipasi politik.
- 3). Pengaruh kaum intelektual dan komunikasi massa modern. Dari dampak ini dapat muncul ide-ide seperti egalitarianisme dan nasionalisme.
- 4). Konflik di antara kelompok-kelompok pemimpin politik. Ini terjadi karena adanya kompetisi dalam perebutan kekuasaan dan menim-

⁴² *Ibid.*, hal. 7.

bulkan strategi-strategi dalam memperoleh peluang untuk tampil sebagai pemimpin.

- 5). Keterlibatan pemerintah yang luas dalam urusan sosial ekonomi dan kebudayaan. Perluasan keterlibatan pemerintah ini mengakibatkan tindakan pemerintah menyusup dalam segala kehidupan masyarakat.⁴³

Dari aspek bentuknya, Gabriel A. Almond menyatakan bahwa partisipasi politik yang merupakan salah satu bentuk aktivitas politik dapat dibedakan dalam bentuk yang konvensional dan non-konvensional. Bentuk yang konvensional seperti: pemberian suara (voting), diskusi politik, kegiatan kampanye, membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan, komunikasi individual dengan pejabat politik dan administrasi. Bentuk yang non-konvensional seperti: tindak kekerasan politik, perang gerilya dan revolusi.⁴⁴

Jika berangkat dari parameter tersebut di atas bahwa munculnya aktivitas politik rakyat pada masa pendudukan Jepang di Indonesia lebih banyak disebabkan oleh dua faktor yaitu:

⁴³ Almond, Gabriel A, 1997, *Sosial, Kebudayaan dan Partisipasi Politik*, dalam: Mohtar Mas'ud dan Colin Mac Andrew, University Press, Yogyakarta, halaman 45-46.

⁴⁴ *Ibid.*, halaman 28.

1). Pengaruh kaum intelektual dan komunikasi masa modern.

Sejak jaman penjajahan Belanda diyakini bahwa peranan kaum intelektual sangat penting terutama sebagai pelopor pendirian organisasi dalam Pergerakan Nasional seperti yang pernah dikaji oleh Mac.T. Kahin maupun Benedict Anderson. Kehadiran media massa juga memberikan andil besar terutama atas peranan para wartawannya seperti B.M.Diah, Adam Malik, Sukarni dan Wikana.

2). Konflik di antara kelompok-kelompok pemimpin politik. Seperti diketahui bahwa pada masa perjuangan, terdapat dua kelompok yang memiliki strategi perjuangan yang berbeda. Di satu pihak dilakukan dengan cara kooperasi (bekerja sama dengan Jepang seperti Sukarno, Moh. Hatta), sedangkan di pihak lain terdapat golongan muda (Adam Malik, Wikana, Sukarni, B.M.Diah) tidak mau bekerja sama dengan Jepang (non-kooperasi). Perbedaan strategi perjuangan ini melahirkan suatu kompetisi dalam suatu aktivitas politik sehingga ada yang melakukan melalui perundingan (diplomasi) dan ada yang dengan jalan konfrontasi bersenjata (perang).

Pada masa pendudukan Jepang, seperti juga terjadi pada umumnya di negara yang sedang dijajah, kegiatan politik sangat dibatasi bahkan dilarang. Hanya sejumlah kecil negara-negara yang

memperkenankan adanya partai oposisi dan negara yang sedang dikendalikan oleh pemerintah militer sering malah tidak menghendaki adanya partai sama sekali (*only a handful of countries tolerate opposition parties, and those that are under military rule often permit no parties at all*).⁴⁵ Jadi pemerintahan militer atau partai tunggal menolak aktivitas oposisi dengan alasan bahwa negara tidak dapat membiarkan perpecahan-perpecahan dari dalam yang dapat membahayakan kesatuan nasional, modernisasi ekonomi atau stabilitas politik (*thus military or one-part governments often outlaw opposition parties on the grounds that the nation cannot tolerate internal dissension that would threaten national unity, economic modernization, or political stability*).⁴⁶

Dengan demikian, alasan-alasan untuk membatasi aktivitas politik sering dikaitkan dengan akibat negatif yang timbul seperti mengacau stabilitas nasional atau munculnya kerusuhan. Pada masa pendudukan Jepang larangan terhadap pendirian partai politik sebagai salah satu wadah aktivitas politik lebih banyak disebabkan adanya kekhawatiran dijadikan basis perjuangan bangsa Indonesia menentang kehadiran Jepang. Di lain pihak Jepang memiliki kepentingan memanfaatkan rakyat Indonesia dimobilisasi dalam upaya menghadapi Sekutu dalam Perang Dunia II. Bangsa yang dalam keadaan dijajah, aktivitas politiknya lebih diarahkan pada

⁴⁵ Weiner, Myron, (ed), 1966, *Modernization: the Dynamics of Growth*, Voice of Vorum Lectures, halaman 224.

⁴⁶ *Ibid.*, halaman 226.

pemungutan pajak dan melakukan pekerjaan-pekerjaan rutin yang terbatas seperti pembuatan tanggul-tanggul, saluran-saluran dan lumbung-lumbung seperti yang terjadi dalam masyarakat tradisional

*(political participation is precipitated by the expulsion of governmental activities affecting the lives of large number citizens. So long as a government merely devotes its effort to extracting taxes and engaging in minimum routine activities, such as the construction of dikes, canals, and granaries, as is typical in most traditional societies.*⁴⁷ Kenyataan

seperti ini juga terjadi pada masa pendudukan Jepang yang tercermin dengan dilaksanakannya Romusha yang merupakan kekejaman luar biasa dan sangat biadab. Masyarakat dipaksa untuk melakukan pekerjaan seperti membuat perlindungan perang, membuat tanggul-tanggul di pantai dalam upaya membendung serangan Sekutu.

Disamping itu dilakukan perampokan dan penjarahan bahan-bahan pangan milik penduduk Indonesia untuk kebutuhan perang oleh Jepang.

Aktivitas politik pada suatu negara terutama yang berkembang dari status jajahan (seperti yang dialami rakyat Indonesia pada masa pendudukan Jepang), Huntington menyebutkan :

- 1). Pada tahap awal gerakan nasionalis para pemimpinnya seringkali moderat dan konservatif dan mempunyai banyak kaitan dengan kaum elit tradisional, mereka ini diharapkan mampu

⁴⁷ *Ibid.*, Halaman 229.

mengantar bangsanya untuk merdeka, melalui perundingan-perundingan.

- 2). Muncul kemudian pemimpin yang nasionalis yang lebih radikal. Mereka ingin segera merdeka melalui berbagai macam cara seperti: daya tarik kharismatik, mendirikan organisasi politik untuk memobilisasi massa.⁴⁸

Dalam kaitannya dengan munculnya suatu gerakan khususnya gerakan politik, Petrus Blumberger dalam bukunya "De Natioalistische Beweging in Nederland Indie" mengatakan bahwa gerakan itu merupakan suatu kelompok yang dalam perjuangannya tidak mengutamakan penguasa.⁴⁹ Munculnya suatu gerakan dalam bukunya "The Western Question in Greese and Turkey" Arnold Toynbee mengatakan bahwa "*All corporate action is started by individual and carried on mainly by an active minority while the mass follows behind*".⁵⁰

Dalam suatu gerakan, peranan intelektual tidak dapat dikesampingkan begitu saja. Kaum intelektual mampu bertindak sebagai organiser hegemoni karena mereka merupakan "deputi" dari kelompok dominan yang menjalankan fungsinya khususnya dari

⁴⁸ Huntington, *Op.Cit.*, hal. 51.

⁴⁹ Koch, DMG, 1951, *Om De Vrijheid, De Nationalistische Beweging in Indonesia*, Jajasan Pembangunan, Vorkink, Bandung, halaman 6-7.

⁵⁰ Hatta, Mohammad, 1976, *Kumpulan Karangan*, Jilid I, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta, halaman 64.

hegemoni sosial dan pemerintah sosial baik mereka yang berasal dari intelektual tradisional maupun organik.⁵¹

Pandangan ini jika dikaitkan dengan faktor sejarah pada masa pendudukan Jepang memang signifikan. Hal ini karena pola aktivitas politik yang terjadi berada pada tatanan seperti apa yang dikatakan Huntington. Terdapat kelompok nasionalis moderat dibawah pimpinan Soekarno, Hatta, Rajiman yang mengambil garis perjuangan moderat. Mereka bekerja sama dengan pemerintah Jepang, bahkan organisasi yang dibidani lahirnya oleh Jepang kelompok ini ikut mendukung bahkan sebagai pemirapinnya, seperti yang terjadi pada POETERA, PETA, BPUPKI.

Dilain pihak muncul kelompok yang mengambil garis yang berbeda yaitu non cooperasi dan radikal. Mereka ini terdiri dari golongan muda seperti kelompok pelajar yang bermarkas di jalan Prapatan 10, Menteng 31, dan Cikini 72. Sejarah juga mencatat bahwa kedua kelompok ini terjadi benturan-benturan sehingga melahirkan peristiwa Rengasdengklok.⁵²

⁵¹ Nezar Patria dan Andi Arief, 1999, *Antonio Gramsci. Negara dan Hegemoni*, Pustaka Pelajar Yogyakarta, halaman 155. Roger Simon,, 1999, *Gagasan Politik Gramsci*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, halaman 139-152.

⁵² Peristiwa Rengasdengklok adalah penculikan Soekarno-Hatta pada tanggal 16 Agustus 1945 dimana kedua tokoh tersebut dibawah ke Rengasdengklok oleh para pemuda (Sukarni, Chairul Saleh dan kawan-kawan). Peristiwa ini menjadi penting karena berkaitan dengan "tawar menawar antara "kelompok tua" dengan "kelompok muda".

Dipandang dari aspek teoretis dapat dijelaskan bahwa pengaruh model birokrasi otoriter (yang dipraktekkan Jepang di Indonesia) akan memiliki pengaruh terhadap aktivitas politik rakyat dalam dua hal.

- 1). Bahwa suatu sistem birokrasi otoriter akan melahirkan (a) kontrol yang sangat ketat terhadap setiap aktivitas rakyat, (b) terjadinya penindasan seperti pembubaran/larangan terhadap lembaga-lembaga yang berkaitan dengan perjuangan rakyat, (c) rakyat tidak diikutsertakan dalam bidang perekonomian, (d) terjadinya depolitisasi dalam masalah-masalah sosial dan menutup saluran-saluran demokrasi pemerintahan.⁵³ Birokrasi otoriter sebagai suatu fenomena kekhawatiran yang akut terhadap keaktifan politik masa rakyat.⁵⁴ Dengan demikian akibat yang muncul adalah upaya melemahkan kekuatan rakyat bahkan membungkamnya. Ini artinya bahwa aktivitas politik rakyat akan sangat dibatasi melalui produk-produk hukum yang bersifat represif.
- 2). Birokrasi otoriter akan menciptakan (melahirkan) kebijakan yang berupaya membatasi aktivitas politik rakyat. Akan tetapi di lain pihak adanya tekanan yang represif dari pemerintah

⁵³ O'Donnell, Guillermo, *Op. Cit.* Halaman 201—202.

⁵⁴ Muhammad A.S. Hikam, *Op. Cit.* Halaman 69.

mengakibatkan munculnya gerakan-gerakan yang justru menjadi mandiri dan solid, khususnya dari para pendukung yang berasal dari elite sipil.⁵⁵

E. Metode Penulisan

1. Jenis Penelitian

Penulisan metodologi deskriptif analitis dalam penelitian ini oleh karena tujuan yang ingin dicapai adalah melakukan rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif melalui pengumpulan data, evaluasi dan verifikasi serta mensintesis bukti-bukti untuk menegakkan fakta. Dengan cara ini diharapkan dapat diperoleh hasil dan kesimpulan yang akurat.

Dalam upaya menjaga keseimbangan informasi, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah *multidimensionery approach*.⁵⁶ Dengan pendekatan ini diharapkan dapat diungkap bukti-bukti yang lebih menyeluruh (multiaspek) seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya.

⁵⁵ *Ibid*, Halaman 68

⁵⁶ Pendekatan adalah permasalahan inti dalam Ilmu Sejarah yaitu penggambaran mengenai suatu peristiwa sangat tergantung dari segi mana kita memandang, unsur-unsur mana yang diungkapkan (Sartono Kartodirdjo, 1992, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*, Penerbit PT. Gramedia, Jakarta, halaman 120).

2. Jenis Informasi

Sebagaimana halnya dalam penelitian sejarah dimana bahan-bahan dikumpulkan melalui proses dokumentasi, maka dalam penelitian ini informasi/fakta yang dicari berupa dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dokumen pribadi berupa catatan atau karangan seseorang tentang tindakan, pengalaman, dan kepercayaan.⁵⁷ Jenis dokumen yang termasuk kelompok ini adalah buku-buku yang ditulis tokoh sejarah yang bersangkutan yang didalamnya mencerminkan perjuangan yang pernah dilakukan (BM Diah, Hanafi, Asmadi, M.Hatta, Soejono Martosewojo). Sedangkan dokumen resmi yang bersifat internal adalah berupa dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga/pemerintah yang dapat berupa memo, pengumuman, instruksi, peraturan yang pernah dikeluarkan oleh lembaga seperti UU dan sejenisnya, naskah perjanjian, notulen rapat dan catatan resmi lainnya (*official record*). Semua jenis dokumen tersebut termasuk dalam sumber primer.⁵⁸ Sumber primer ini dapat berupa prasasti (OJO-J.L.Brandes), Naskah perjanjian, Osamu Seirei,

⁵⁷ Moleong, Lexi J., 1996, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, halaman 161-162.

⁵⁸ Sumber primer adalah informasi dari tangan pertama, dimana yang bersangkutan merupakan pihak yang langsung bertanggung jawab. Sumber ini berupa kesaksian dari seorang saksi dengan mata kepala sendiri atau dengan alat hadir dalam peristiwa yang diceritakan. Sedangkan sumber sekunder berupa kesaksian dari seorang/beberapa orang yang tidak dalam peristiwa itu (bukan saksi pandangan mata). Periksa Louis Gottschalk, *Understanding of History. A Primer of Historical Method*, Terjemahan Nugroho Notosusanto, 1975, dalam *Mengerti Sejarah*, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, halaman 35

Undang-Undang baik yang berasal dari masa penjajahan Belanda maupun pada masa Jepang. Sedangkan sumber resmi yang bersifat eksternal berupa bahan-bahan informasi yang dihasilkan oleh suatu lembaga sosial seperti majalah, buletin, surat kabar, jurnal hasil penelitian, (Bijdragen, Jurnal Ilmu Politik, Journal Cornell Southeast Asia Program, Kan Po, Asia Raya). Di samping itu terdapat juga buku-buku teks baik yang ditulis oleh orang Indonesia maupun asing. Hal ini dalam rangka menjaga keseimbangan dalam memberikan interpretasi terhadap fakta yang diangkat sebagai isue.

Informasi-informasi tersebut di atas dapat diperoleh pada berbagai macam lembaga yang terkait dengan penelitian ini seperti : Arsip Nasional, Musium Pusat, Pusat Sejarah ABRI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, serta lembaga lain seperti perpustakaan di berbagai perguruan tinggi.

3. Analisis Data

Dalam rangka menjamin objektivitas, validitas dan reliabilitas data, maka dilakukan kajian isi (*content analysis*) terhadap dokumen dengan langkah sebagai berikut.

- 3.1. Telaah dokumen dengan menerapkan kritik sejarah (kritik sumber) baik yang berupa kritik ekstern maupun kritik intern. Kritik ekstern yaitu apakah sumber/dokumen tersebut dapat dipertanggungjawabkan keasliannya (otentitas) atau palsu. Kritik intern berkaitan dengan sifat data tersebut dalam hal keakuratannya dalam menggambarkan suatu fenomena yang dapat dipercaya, selanjutnya dicari bukti-bukti lain yang mampu menguatkan kebenarannya. Langkah ini dapat berupa : (1). Identifikasi terhadap dokumen yang tidak dikenai pembuatannya, (2). Menilai otentitas suatu dokumen sebelum dipakai sebagai bahan penulisan termasuk siapa penulisnya dan kapan ditulis.
- 3.2. Mencari fakta sejarah yang dikumpulkan dari data yang diperoleh dalam dokumen, kemudian dilakukan proses seleksi fakta yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Seleksi fakta ini dilakukan setelah membandingkan tektual yang berasal dari berbagai macam sumber. Dengan demikian dapat terjadi suatu kompilasi dan sintesis dari berbagai macam sumber sehingga diperoleh data yang akurat dan komprehensif.
- 3.3. Menghubungkan fakta sejarah yang tercerai berai sehingga mampu mengungkapkan suatu gambaran peristiwa yang memiliki arti dan makna tertentu.

- 3.4. Melakukan interpretasi/penafsiran terhadap fenomena yang terjadi dengan menekankan pada pendekatan Ilmu-Ilmu Sosial.⁵⁹
- 3.5. Menarik kesimpulan berdasarkan hasil interpretasi yang dilakukan.

⁵⁹ Sartono Kartodirdjo, *Op. Cit*, halaman 120.

BAB II

SISTEM BIROKRASI MASA JEPANG DAN GERAKAN POLITIK

A. Struktur Birokrasi Masa Kolonial Belanda

Kedatangan Belanda di Indonesia sejak pendaratan Cornelis de Houtman di Banten pada tahun 1597 membawa banyak perubahan dalam hal sistem birokrasi dari pemerintahan. Didirikannya VOC (*Verenigde Oost Indische Compagnie*) pada tahun 1602 oleh Belanda sebenarnya bukan semata-mata hanya sebagai kongsi dagang biasa oleh karena lembaga ini memiliki Hak Octroi.¹ Dengan demikian VOC juga memiliki fungsi yang lebih luas oleh karena memiliki perangkat sebagaimana halnya wakil pemerintahan kerajaan Belanda di Indonesia. Dalam masa 1602-1800, secara politis VOC aktif dalam menanamkan kekuasaan kolonialnya di Indonesia, walaupun secara yuridis badan ini sama dengan kongsi dagang lainnya.

Pada tahun 1795 terjadi Coup d'état yang dilakukan oleh Partai Patriot Belanda dengan bantuan Perancis, maka di negeri Belanda dibentuklah suatu pemerintahan republik yaitu Republik Bataaf yang pro Perancis. Sedangkan Raja Belanda saat itu (Willem V) mengasingkan diri ke Inggris. Setelah VOC bubar pada tahun 1799, maka untuk mengurus tanah jajahan dibentuklah badan yang bernama "*Raad der*

¹ Hak Octroi adalah hak istimewa yang dimiliki oleh VOC seperti hak mencetak uang, dapat melakukan perjanjian dengan penguasa setempat, melakukan monopoli perdagangan, boleh memelihara benteng dan tentara. Dengan demikian hak ini menunjukkan bahwa VOC bukan kongsi dagang biasa, akan tetapi sudah menjadi wakil pemerintah kerajaan Belanda di Indonesia.

Aziatische bezittingen en etablisementen" yang artinya Sidang dari pada harta benda serta penempatan-penempatan di Asia atau sering hanya disingkat "*Aziatische Raad*". Kekuasaan pemerintahan Belanda di Indonesia di pegang oleh Gubernur Jenderal Johanes Siberg (1801-1804). Dengan adanya permusuhan antara Inggris dengan Perancis, maka pada tahun 1806 dilakukan pembubaran Republik Bataaf dan kemudian didirikan *Koninkrijk Holland* (Kerajaan Belanda) dimana Louis Napoleon sebagai rajanya.

Kondisi yang demikian itu tentunya berpengaruh juga terhadap Indonesia sebagai tanah jajahannya. Dalam rangka mengamankan Indonesia, maka Perancis kemudian mengurus Herman Willem Daendels yang mempunyai tugas utama mempertahankan pulau Jawa dari serangan Inggris. Dalam masa pemerintahannya terdapat beberapa kebijakan yaitu:

1. Dalam melaksanakan pemerintahannya, dia dibantu oleh seorang penasehat (Mr. Muntinghe). Dalam lapangan administrasi Jawa dibagi menjadi 9 prefektur yang masing-masing dikepalai oleh seorang prefek.
2. Dilakukan perbaikan dalam masalah peradilan, yang sebelumnya kurang mendapat perhatian. Disamping itu dalam rangka memudahkan hubungan politik dan administrasi maka diterbitkan surat khabar (*Gezette*).

3. Dalam masalah perekonomian sistem pajak masih tetap membanjir rakyat (*Contingenten*), penjualan tanah kepada golongan partikelir, monopoli penjualan beras serta pinjaman paksa.

Masa kekuasaan Perancis di Indonesia berakhir setelah pada tanggal 4 Agustus 1811 terjadi ekspedisi Inggris dibawah Lord Minto yang berada di India melakukan serangan ke Batavia. Proses pengalihan kekuasaan ini kemudian ditandatangani di Salatiga dengan pernyataan penyerahan dalam Kapitulasi Tuntang tanggal 18 September 1811. Sejak saat itu Indonesia berada dibawah kekuasaan Inggris dengan dikirimkannya Letnan Gubernur Jenderal Raffles sebagai kepala pemerintahan di Indonesia.

Dalam melaksanakan tugas, khususnya dalam bidang pemerintahan, Raffles melakukan tindakan sebagai berikut:

1. Pulau Jawa dibagi menjadi 16 Karesidenan, sedangkan yang boleh menjadi Residen adalah orang Eropa yang merupakan lapisan atas dalam masyarakat kolonial.
2. Dalam bidang peradilan dilakukan dengan sistem juri sebagaimana yang terjadi dalam sistem hukum Anglo Saxon, walaupun tidak lama kemudian hal ini diganti dengan pola Eropa Kontinental.
3. Mulai dilakukan larangan terhadap perbudakan, walaupun dalam prakteknya masih ada pengiriman kuli-kuli keluar Jawa seperti ke Banjarmasin.

Berkuasanya kembali Belanda di Indonesia setelah ditandatanganinya Traktat London pada tahun 1824. Garis besar pemerintahan yang bersifat liberal sesuai dengan kondisi baru (Revolusi Perancis) yang berkembang di Eropa. Persoalan politik dan kenegaraan yang terjadi di Eropa ternyata membawa perubahan terhadap sistem pemerintahan Belanda di Indonesia.

Sebelum tahun 1854, sistem pemerintahan Belanda dilaksanakan secara sentralisasi, yaitu bahwa jalannya pemerintahan ditentukan oleh menteri jajahan yang pusat pemerintahannya ada di Nederland. Sejak tahun 1854 Parlemen Belanda memiliki hak untuk mengadakan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan Hindia Belanda. Undang-Undang (*Wet*) yang mengatur tata pemerintahan di Indonesia (Hindia Belanda) disebut "*Reglemen op het gebied der Regering in Nederland Indie*" (RR). Penggantian *Koninkrijk Besluit* dengan RR tersebut membawa juga perubahan dalam tata pemerintahan kolonial di Indonesia. Dengan RR ini kebijakan pemerintah diatur langsung oleh pemerintah pusat di negeri Belanda, sehingga secara yuridis Gubernur Jenderal terikat dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam RR.

Sejak tahun 1870, di Hindia Belanda mulai diberlakukan sistem liberal dengan dikeluarkannya Undang-Undang Gula (*Suikersche Wet*), sehingga perlu juga menyesuaikan sistem administrasi dengan prinsip

persamaan dan ekonomi.² Tujuan yang ingin dicapai ialah meningkatkan efisiensi dan memperbesar otonomi. Oleh karena itu diperlukan suatu proses desentralisasi yang mencakup 3 hal yaitu:

1. Delegasi kekuasaan dari pusat pemerintahan ke pemerintahan di Hindia Belanda, dari pemerintah ini ke departemen, pejabat lokal dan dari pejabat Belanda ke pribumi.
2. Menciptakan lembaga-lembaga otonom yang mengatur urusan sendiri.
3. Memisahkan keuangan negeri dari keuangan pribadi.³

Berdasarkan atas Undang-Undang Perubahan (*Bestuurherformingswet*) tahun 1922, Hindia Belanda dibagi atas *Gouvernementen* yaitu kesatuan-kesatuan daerah yang kemudian disebut propinsi dan kabupaten sebagai daerah otonom. Salah satu bentuk pelaksanaan dan pemberian otonomi pada Hindia Belanda adalah dibentuknya Dewan Rakyat (*Volkraad*) yang merupakan badan perwakilan, yang memiliki wewenang memberikan saran/nasehat (belum memiliki kekuasaan legislatif).

Desentralisasi bertujuan untuk sisa-sisa masyarakat tradisional yang dianggap dapat menghambat perkembangan administrasi modern. Bagi negeri Belanda, desentralisasi merupakan kebebasan pada

² Marwati Djoened Poesponegoro, Nugroho Notokusanto, 1984, *Sejarah Nasional Indonesia*, Jilid V, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, halaman 47.

³ *Ibid*, halaman 47

penguasa kolonial (Hindia Belanda) dan memberi kemungkinan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan situasi daerah.

Sebenarnya struktur kekuasaan dalam politik kolonial yang ditetapkan Belanda di Indonesia berakar pada birokrasi model sistem tradisional, seperti ada hirarkhi ketat yang menjadi penyalur perintah dari atas ke bawah. Kedudukan raja diganti oleh penguasa kolonial dimana hirarkhi pejabat-pejabat administrasi Belanda berjalan paralel dengan hirarkhi pribumi.⁴ Namun demikian oleh karena adanya diskriminasi rasial, maka Pangreh Praja Eropa (*Europees Binenland Bestuur/BB*) berfungsi untuk melaksanakan pengawasan terhadap Pangreh Praja pribumi (*Inlansch Bestuur/IB*).

Pangreh Praja (BB) yang berkuasa atas kerajaan (*rulers of the realm*) berasal dari para penguasa setempat dari kerajaan tradisional. Mereka ini dibentuk menjadi suatu elite birokrasi dengan sistem cara kerja, dengan etos dan juga dengan hubungan-hubungan sosial, kekerabatan yang saling jalin menjalin. Mereka berasal dari tradisi penguasa tradisional atau patrimonial yang tidak mengenal pemisahan kepentingan pribadi dan jabatan.⁵ Kedudukan Pangreh Praja (IB) dirumuskan dalam pasal 67 dan pasal 69 Regering Reglement (RR):

"Sejauh keadaan mengijinkan, penduduk pribumi hendaklah dibiarkan berada di bawah pengawasan pemimpin-pemimpin mereka sendiri, baik yang diangkat maupun yang diakui oleh pemerintah yang tunduk kepada

⁴ Sartono Kartodirdjo, 1990, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru, Sejarah Pergerakan Nasional, Dari Kolonialisme sampai Nasionalisme*, Jilid II, Penerbit PT.Gramedia, Jakarta, halaman 7-8.

⁵ Sutherland, Heather, *Terbentuknya Sebuah Elite Birokrasi*, Penerbit PT. Sinar Harapan Jakarta, halaman 7-8.

semacam supervisi yang lebih tinggi yang akan ditetapkan dengan peraturan umum atau khusus dari Gubernur Jenderal".⁶

Jika diamati dalam perkembangan sejarahnya sejak jaman VOC, maka pangreh praja pribumi (IB) hanyalah sebagai perantara penguasa asing dengan rakyat, yang merupakan penguasa yang ditakuti sekaligus dikagumi, tetapi mereka merupakan bawahan dari sebuah kekuasaan asing. Yang memerintah sebenarnya ialah korp pamong praja Eropa (BB) yang membentuk jaringan urat nadi pemerintah kolonial.

Dari semula Belanda menguasai bangsa Indonesia dengan melalui pemerintahan tidak langsung (*Indirect Rule*). Belanda hanya bertindak sebagai penasehat atau saudara tua terhadap pamong praja pribumi yang bertugas dalam pola hirarkhi tradisional.⁷ Maksudnya ialah membiarkan sejauh mungkin berlangsungnya struktur kekuasaan, pelapisan sosial serta cara hidup tradisional. Pemerintah kolonial hanyalah menjadi pengawas dan penasehat, walaupun kenyataannya daerah-daerah tetap menjadi cengkraman Belanda, sedangkan penandatanganan Plakat Pendek (*Korte Verklaring*) hanyalah sebuah upaya untuk sekedar menyenangkan raja-raja yang ada didaerah.

Pegawai sipil pribumi (BB) telah mengalami birokrasi intensif sehingga hanya menghasilkan suatu rutinitas kerja, di lain pihak mulai terjadi defeodalisasi dan sekularisasi yang berakibat secara bertahap mereka kehilangan pre-empatnya untuk dipandang sebagai satu-

⁶ *Ibid*, halaman 42.

⁷ Niel, Robert, van, 1984, *Munculnya Elite Modern Indonesia*, Penerbit Pustaka Jaya, Jakarta, halaman 24.

satunya pembawa suara yang mewakili rakyat. Pada saat yang bersamaan muncul orang-orang yang cukup berarti yang amasih memiliki status (seperti para pemimpin partai politik) di luar konteks korp pegawai pribumi.⁸ Fenomena ini mengakibatkan mulai melemahnya kepemimpinan sosial dan politik pangreh praja serta berdampak pada kepatuhan yang ditampilkan rakyat. Dalam temuannya Sutherland mengatakan bahwa pangreh praja dalam abad ke XIX, dimana timbul gerakan nasional sebagai salah satu akibat dari terjadinya rasionalisasi kepegawaian dalam rangka Beambtenstaat.⁹

B. Struktur Birokrasi masa Jepang

Berbicara mengenai struktur birokrasi pada masa pendudukan Jepang tidak dapat dilepaskan dengan siapakah sebenarnya Jepang itu bagaimana Jepang sampai di Indonesia serta tujuan yang ingin dicapai. Hal ini penting oleh karena Jepang sebagai sebuah negara memiliki kepentingan terhadap Asia umumnya khususnya Indonesia

1. Kedatangan Jepang di Indonesia

Pembahasan terhadap kedatangan Jepang di Indonesia tidak dapat terlepas dari aspek sejarahnya, oleh karena sejarah suatu bangsa mampu memberikan gambaran tentang hakekat dari bangsa

⁸ Sutherland, Heather, *Op.Cit*, halaman 9.

⁹ *Ibid*, halaman 8-9.

yang bersangkutan. Termasuk dimana Jepang menjelma menjadi negara yang ekspansionis tidak terlepas dari latar belakang sejarahnya.

Kebijakan politiknya semula menerapkan "politik Isolasi" (menutup diri dari pengaruh dunia luar), ketika di bawah kekuasaan keluarga Tokugawa. Pemerintahan Bakufu melaksanakan menjalankan politik Isolasi tersebut karena adanya rasa ketakutan jika masuknya pedagang-pedagang asing akan ikut juga masuk imperialisme asing. Dengan terjadinya pertumbuhan penduduk yang cepat, pemerintahan Tokugawa tidak mampu mengatasinya. Akibatnya timbul kesulitan ekonomi oleh karena tertutupnya kehadiran para pedagang asing mengakibatkan harga barang-barang menjadi menjulang tinggi, sehingga menimbulkan bahaya kelaparan diberbagai tempat.

Dengan terjadinya revolusi industri di Inggris dan proses industrialisasi umumnya di negara-negara barat, ternyata membawa implikasi terhadap kebijakan luar negeri Jepang. Sejak tahun 1853 negara-negara barat mulai mencoba menjahiri hubungan dengan Jepang. Hal ini salah satunya ditandai dengan adanya surat yang dilayangkan oleh Belanda dalam kaitannya dengan usaha menutup diri dari bangsa barat.

Pada tahun 1851 pemerintah Amerika Serikat memberikan kuasa kepada Commodore J.H.Aulick untuk mengadakan hubungan dengan Jepang. Tetapi tugas tersebut kemudian digantikan oleh Commodore Perry. Tugas yang dibebankan oleh pemerintah Amerika ialah:

- 1). Minta kepada pemerintah Jepang jaminan dan perlindungan bagi pelaut-pelaut Amerika yang mendapat kecelakaan dan terdampar di pantai Jepang.
- 2). Pembukaan pelabuhan-pelabuhan Jepang, supaya kapal Amerika boleh mengambil air dan perbekalan lainnya.
- 3). Pembukaan pelabuhan-pelabuhan untuk kepentingan perdagangan.

Pada tanggal 24 Nopember 1852, Commodore Perry bertolak dari Norfolk dengan memimpin skuadron terdiri dari 4 kapal perang dan pada tanggal 3 Juli 1853 sampai di Teluk Sagami dan berlabuh di Teluk Yedo. Kedatangan armada Amerika di Jepang itu kemudian dilanjutkan dengan ditandatanganinya perjanjian Syimoda 30 Maret 1854. Perjanjian ini menjadi awal dari terbukanya Jepang terhadap bangsa asing terbukti dengan ditantanganinya perjanjian dengan Inggris 1854, Rusia 1855 dan dengan Belanda 1856. Peristiwa ini menimbulkan pertentangan di dalam negeri. Gerakan nasionalis menentang Shogunat bersatu dengan Gerakan anti asing dan mengunandangkan "Sonno Joi" (hormat kepada Tenno dan usir bangsa asing). Kedudukan Shogun dengan Bakufunya terjepit diantara gerakan nasionalis yang anti terhadap bangsa asing dengan desakan negara-negara barat.

Konsul Jenderal Amerika yang pertama yaitu Townsen Harris, pada tahun 1856 mendapat tugas untuk mengusahakan perjanjian yang lebih luas dalam bidang perdagangan dengan Jepang. Pada tahun

1858 akhirnya Townsen Harris diterima dengan resmi sebagai wakil Amerika dan mengadakan perjanjian perdagangan yang lebih luas.

Melihat kenyataan ini gerakan nasionalis dan anti asing melanjutkan usahanya menentang perubahan negara. Dalam pada itu kedudukan Tenno di Kyoto bertambah kuat karena Tenno menolak memberikan penguatan yang diminta Shogun atas perjanjian yang telah ditanda tangani dengan pihak Amerika, yang sebenarnya karena adanya ancaman senjata dari pihak Townsen Harris. Gerakan anti asing menyatakan diri dalam berbagai bentuk seperti:

- 1). Tuntutan pengembalian fungsi politik kepada Tenno
- 2). Kembali kepada Shintoisme yang murni sebagai reaksi terhadap Ryobu-Shinto dan Budhisme
- 3). Pemujaan Tenno dan leluhurnya.

Disamping tuntutan tersebut, kaum nasionalis mengadakan perlawanan dengan mengancam jiwa orang-orang asing yang ada di Jepang, yang merupakan salah satu cara dalam rangka memancing terjadinya bentrokan.

Terjadinya pemberontakan Satsuma dan Choshu pada tahun 1863 tidak hanya disebabkan oleh karena lemahnya tindakan Shogun terhadap bangsa asing, akan tetapi yang lebih penting ialah karena dengan terbukanya Jepang terhadap bangsa asing banyak merugikan terutama terhadap golongan Samurai seperti Satsuma dan Choshu. Dilain pihak oleh karena perdagangan teh dan sutera sangat meningkat,

akibatnya muncullah golongan baru yaitu golongan Zaibatsu yang semakin lama semakin kaya. Dengan dibukanya Jepang terhadap bangsa asing kelompok inilah yang paling memperoleh keuntungan.

Peristiwa tersebut diatas merupakan pemicu yang kemudian melahirkan kelompok anti Shogun serta adanya keinginan mengembalikan kekuasaan kepada Tenno. Kondisi yang ada di dalam negeri tersebut kemudian dimanfaatkan oleh negara-negara barat seperti Inggris dan Perancis (dengan *divide et impera*) mengakibatkan berkobarnya perang saudara antara Tenno (Satsuma dan Choshu) yang berhadapan dengan Shogun (*Yoshinobu*).

Dalam perkembangan selanjutnya, Jepang mengalami apa yang dinamakan "*Meiji Restorasi*" yang terjadi mulai 14 Desember 1867, hal ini disadari oleh bangsa barat. Setelah terjadinya pergantian Shogun Iemochi oleh *Yoshinobu* pada tahun 1866, maka pada bulan Nopember 1867, yang kemudian menyerahkannya kepada Tenno karena telah disadari tidak efektif untuk mempertahankan *Shogunat* lebih lama lagi. Penyerahan kekuasaan ini menimbulkan perang saudara baru pada tahun 1868, sedangkan *Meiji Restorasi* secara resmi terjadi pada tanggal 25 Januari 1868.

Meiji Restorasi adalah upaya Jepang untuk membangun secara besar-besaran dengan tujuan agar Jepang mampu berubah yang semula merupakan negara "kolot" kearah negara yang modern, dari negara kecil

menjadi negara besar sehingga ditakuti oleh negara-negara lainnya di dunia.

Setelah terjadinya Meiji Restorasi, maka Jepang mulai dengan kehidupan kenegaraan yang baru yaitu dengan melakukan modernisasi, yaitu melakukan pembangunan secara besar-besaran yang meliputi bidang pemerintahan, angkatan perang, industrialisasi, dan bidang pendidikan. Dalam bidang pemerintahan dihapuskannya sistem pemerintahan yang bersifat feodalis yaitu dengan penghapusan hak istimewa para Daimyo dengan menjadikan mereka sebagai pegawai negeri (*Han-Chiji*) kemudian tanah-tanah yang mereka kuasai sebelumnya diserahkan kepada Tenno. Sistem pemerintahan dilaksanakan ala barat seperti mulai adanya kabinet dan parlemen. Disamping itu dalam bidang sosial terjadi peleburan golongan bangsawan Kogu dan Buke menjadi golongan Samurai. Usaha lainnya yang dilakukan Jepang ialah penghapusan *Ekstrateritorialitet* yang selama ini dianggap sebagai penghinaan terhadap bangsa Jepang. Mereka menginginkan dalam sistem hukum hanya berlaku sistem hukum Jepang saja. Dengan demikian diperlukan peninjauan terhadap perjanjian-perjanjian yang pernah dilakukan dengan bangsa-bangsa barat.

Perubahan juga terjadi pada angkatan perangnya, dimana Jepang mulai mengembangkannya secara modern. Angkatan Darat dipegang oleh keluarga Choshu yang mengadopsi pola yang diterapkan oleh

Jerman, sedangkan Angkatan Lautnya dipegang oleh keluarga Satsuma dengan meniru model Inggris. Dalam upaya modernisasi personil, diselenggarakan wajib militer untuk setiap warga negara yang telah berumur 20 tahun.

Tatanan militeristis tercermin dari kedudukan Kementerian Pertahanannya tidak bertanggung jawab kepada Parlemen tetapi bertanggung jawab kepada Tenno. Dengan demikian kementerian ini memiliki posisi yang sangat kuat sehingga akhirnya dapat menjelma menjadi *Gunbatsu* (pemerintahan diktator militer). Kementerian ini memiliki alokasi anggaran belanja yang sangat besar sehingga angkatan perang Jepang merupakan kekuatan yang mengerikan. Kemunculan Jepang dalam perkembangan sejarahnya menjadi negara imperialis tidak terlepas dari fenomena yang terjadi setelah berlangsungnya Meiji Restorasi.

Dalam bidang industri, Jepang berusaha meningkatkan produksi teh dan sutera untuk mempercepat peningkatan perolehan devisa negara. Pengembangan industri sangat terkait dengan upaya memajukan kemampuan militernya. Hal ini tercermin dari adanya upaya mendatangkan ahli-ahli dari luar negeri (Inggris) dalam usaha membangun dok-dok kapal, pusat-pusat tenaga listrik.

Potensi lainnya yang tidak kalah pentingnya ialah dalam usaha memajukan bidang pendidikan. Jepang mulai mengadopsi pendidikan barat dengan jalan mengirimkan pelajar keluar negeri, disamping

menetapkan wajib belajar bagi setiap anak yang telah berumur 6 tahun. Hal tersebut diatas menjadi titik awal Jepang sehingga mampu menjelma menjadi negara modern dan kuat.

Perubahan-perubahan yang terjadi ini sekaligus mengakibatkan munculnya Jepang sebagai negara imperialis. Pertambahan jumlah penduduk, pembatasan imigrasi yang terjadi pada bangsa Jepang, industri besar-besaran, pembaharuan angkatan perang merupakan faktor-faktor yang mendorong Jepang menjelma menjadi negara imperialis. Golongan militer yang berasal dari kaum Samurai yang sedang memegang pimpinan politik memiliki karakter yang sejalan dengan pandangan imperialis. Dalam perkembangannya sejarahnya, sejak tahun 1870, muncullah golongan yang menghendaki pelaksanaan politik ekspansi yang agresif. Golongan supranasionalis memimpikan Jepang sekurang-kurangnya menjadi negara terkemuka di Asia Timur. Dengan dalih sebagai negara tertua di Asia, Jepang berusaha menduduki negara-negara yang berada di kawasan Asia termasuk dapat menduduki Indonesia. Semenjak terjadinya revolusi politik dan ekonomi (Meiji Restorasi) Jepang menjadi negara industri dan kapitalis yang kuat.¹⁰ Sebagai negara industri sebenarnya memerlukan seperangkat persyaratan yaitu: modal, tenaga kerja, teknologi, sumber bahan baku, transportasi dan tempat pemasaran. Keinginan Jepang melakukan ekspansi diluar batas negaranya diamping pertimbangan sejarah

¹⁰ Onghokham, 1987, *Runtuhnya Hindia Belanda*, Penerbit Gramedia, Jakarta, halaman 8

(sebagai saudara tua) sebenarnya lebih banyak didorong adanya keinginan menjadi negara industri. Yang paling mendasar adalah karena tingkat kehidupan rakyat Jepang yang rendah karena terjadinya perkembangan industri yang cepat merupakan sebab utama Jepang menjadi negara imperialis yang tujuannya mencari pasar-pasar baru untuk hasil-hasil industrinya.¹¹

Politik ekspansi Jepang sebenarnya telah dimulai pada tahun 1895 ketika Jepang menduduki Cina, kemudian kemenangan terhadap Rusia 1905. Khusus mengenai kedatangan Jepang di Indonesia, sebenarnya ada peristiwa penting yang langsung terkait dengan hal tersebut. Peperangan yang terjadi di Asia (Perang Asia Timur Raya) sebuah indikasi bahwa Jepang memang memiliki keinginan kuat untuk berkuasa di Asia. Pemboman terhadap Pear Harbour oleh Jepang pada tanggal 8 Desember 1941 telah memberikan gambaran bagaimana keinginan Jepang untuk mampu menguasai kawasan Asia Timur dan Pasifik.

Sebelum tahun 1910 publik Jepang sebenarnya telah dilanda opini untuk menaruh minat kepada wilayah Selatan (*Nanyo*) sebagai repon terhadap gagasan yang dituangkan oleh Takekoshi Yosaburo (anggota Parlemen). Gagasan ini kemudian didukung oleh pemerintah Jepang

¹¹ *Ibid*, halaman 10

sehingga Kementerian Urusan Komunikasi mengajak perusahaan Pelayaran Jepang untuk membentuk *Nanyo Yusen Kabushiki Kaisha* tahun 1912. Perhatian pemerintah Jepang terhadap kawasan Asia Tenggara terlihat jelas dimasa Eropa dilanda Perang Dunia I, yaitu semenjak terputusnya pelayaran Asia-Eropa sebagai akibat dari operasi kapal selam Jerman. Hal ini dimanfaatkan Jepang untuk mengisi kekosongan tersebut. Dari sini terlihat bahwa Jepang sudah secara sistematis memiliki rencana untuk melakukan ekspansi baik dalam lapangan ekonomi maupun politik.¹²

Sesuai dengan laporan yang pernah dibuat oleh Markas Besar Angkatan Darat Jepang yang berkaitan dengan "Garis-garis Pokok Pelaksanaan Militer terhadap Hindia Belanda seperti yang dikutip oleh Ken Ichi Goto, bahwa bidang-bidang yang dikendalikan oleh militer adalah menjaga pertahanan negara dan keamanan negeri, hubungan diplomatik, sumber alam yang penting bagi negara.¹³ Dalam hal ini Angkatan laut Jepang memainkan peranan yang penting dalam mendorong melakukan ekspansi kearah selatan termasuk Indonesia dalam upaya memperoleh minyak bumi. Disamping faktor ideologis, minyak bumi merupakan faktor yang menentukan bagi keputusan Jepang melancarkan perang. Sejak Juli 1940 Kabinet Konoye digantikan

¹² Mona Lohanda, 1997, *Penetrasi Jepang di Perairan Hindia Belanda*, Jurusan Sejarah, Fakultas Sastra Universitas Indonesia, halaman 8

¹³ Goto, Ken Ichi, 1998, *Jepang dan Pergerakan Kebangsaan Indonesia*, Penerbit Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, halaman 169.

oleh "kabinet perang" dibawah pimpinan Tojo Hideki. Kebijakan nasional yang dicanangkan adalah pembentukan perdamaian dunia sesuai dengan cita-cita *Hakko Ichi-U* (delapan benang dibawah satu atap) yang menjadi landasan kemaharajaan.

Asas yang berkaitan dengan pemerintahan wilayah selatan yang telah diduduki termasuk Indonesia adalah persetujuan pokok Angkatan Darat dan Angkatan Laut (*Senryochi gunsei riku jisshi ni kansuru riku kaigun chuo kyotei*) dan juga pada struktur pemerintahan militer dibawah pendudukan Angkatan Darat (*Rikugun senryochinc gunsei kiko*) yang dilakukan pada bulan Desember 1941.¹⁴ Berdasarkan kesepakatan ini maka Panglima Tentara Angkatan darat Jepang sekaligus akan melaksanakan kekuasaan resmi sebagai pengganti Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Sasaran yang ingin dicapai adalah memelihara ketertiban umum, mempercepat penguasaan sumber-sumber yang vital bagi pertahanan nasional serta jaminan dalam bidang ekonomi dan militer.

Di Indonesia (Hindia Belanda) saat itu dibawah Gubernur Jenderal Tjarda Van Starckenborgh Stachourwer menyatakan perang terhadap Jepang. Hal ini terjadi oleh karena Belanda termasuk dalam ABDACOM (American, British, Dutch, Australian Command) yang bermarkas di Lembang (Bandung) dibawah pimpinan Jenderal Sir Archibelt Wavell, dengan Panglima KNIL Letnan Jenderal H.Ter Porten.

¹⁴ Nugroho Notosusanto, 1979, *Temara Penu*, Penerbit PT. Gramedia Jakarta, halaman 27-28

Serangan Jepang ke Indonesia (Hindia Belanda) pertama-tama terjadi 11 Januari 1942 dengan mendarat di Tarakan (Kalimantan Timur). Balikpapan yang merupakan daerah yang kaya akan minyak bumi, jatuh ketangan Jepang 24 Januari 1942, disusul kemudian Pontianak 29 Januari 1942, Samarinda 3 Pebruari 1942, Banjarmasin 10 Pebruari 1942. Dalam usaha menguasai Indonesia bagian barat, pada tanggal 14 Pebruari 1942 pasukan payung diterjunkan di Palembang yang kemudian diduduki pada tanggal 16 Pebruari 1942. Ekspansi selanjutnya ialah dengan menyerang Jawa Timur (Surabaya) yang dilakukan dari tanggal 5 Pebruari sampai dengan 25 Pebruasi 1942. Untuk daerah Jawa lainnya pendaratan dilakukan oleh Tentara Keenambelas Jepang di Teluk Banten dan di Krajan (Jawa Tengah).

Setelah pendaratan itu maka pada tanggal 5 Maret 1942 Batavia diumumkan sebagai ibukota. Dalam upaya mempercepat pengambilalihan seluruh Indonesia, Jepang melakukan ultimatum terhadap pemerintah Hindia Belanda dengan ancaman pengeboman terhadap kota Bandung. Akhir dari peperangan ini kemudian menghasilkan persetujuan di Kalijati pada tanggal 8 Maret 1942 yang sekaligus mengakhiri pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia.

Setelah mengambil alih kekuasaan dari tangan Hindia Belanda, Indonesia kemudian diatur melalui kekuasaan militer. Sistem pemerintahan militer Jepang ini berfungsi sebagai pemerintahan sementara yang didasarkan atas *Osamu Seirei*. Semula kedatangan

Jepang ini mendapat sambutan cukup baik dari rakyat Indonesia termasuk dari para tokoh pergerakan seperti Soekarno dan Moh. Hatta. Kerjasama yang terjalin dari tokoh-tokoh moderat ini oleh karena kepercayaan akan kebangkitan bangsa timur dan tropaganda Jepang yang dilakukan sebelum kedatangannya di Indonesia, bahwa bangsa-bangsa Asia harus dapat menentukan nasibnya dalam rangka melepaskan diri dari pengaruh barat. Hal lain bahwa posisi Indonesia pada waktu itu adalah lemah dan sebaliknya Jepang dalam posisi kuat, sehingga sementara para pemimpin Indonesia bersedia bekerjasama.

2. Sistem Pemerintahan Jepang di Indonesia

Sistem pemerintahan yang diterapkan Jepang di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1, tanggal 7 Maret 1942 yang menyebutkan : Balatentara Nippon melangsungkan pemerintahan Militer untuk sementara waktu di daerah yang ditempati agar mendatangkan keamanan yang sentosa dengan segera. Akan tetapi dalam prakteknya pemerintahan Jepang dilaksanakan oleh Kepala Stafnya yang disebut *Gunseikan* tidak lebih seperti halnya juga penjajahan yang sebelumnya terjadi di Indonesia. Oleh karena itu apa yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 tanggal 7 Maret 1942 tidak lebih dari upaya pembenaran terhadap perilaku penjajah pada umumnya. Dalam rangka pengambilalihan Indonesia dari tangan Belanda, Jepang menugaskan pasukannya yang tergabung dalam

Wilayah ke tujuh yang dipimpin oleh Jenderal Itagaki Seishiro yang bermarkas di Singapura.

Undang-Undang yang secara normatif mengatur mengenai Indonesia kemudian membagi wilayah Indonesia ke dalam Pemerintahan Militer yang terdiri dari :

- 1). Pemerintahan Militer Angkatan Darat (Tentara Keamanan Kedua Puluh Lima) untuk Sumatra dengan pusatnya di Bukittinggi.
- 2). Pemerintahan Militer Angkatan Darat (Tentara Keenam Belas) untuk Jawa dan Madura dengan pusatnya di Jakarta.
- 3). Pemerintahan Angkatan Laut (Armada Selatan Kedua) untuk daerah yang meliputi Sulawesi, Kalimantan, Maluku dengan pusatnya di Makasar.¹⁵

Untuk mengangkut Tentara Ke Enam Belas yang kemudian bertugas di Jawa dibentuklah satuan tugas di bawah pimpinan Laksamana Madya Takahashi Ibo. Tentara ini yang kemudian dikomandani oleh Letnan Jenderal Hitoshi Imamura membawahi tiga divisi yaitu: (1) Divisi ke dua dibawah pimpinan Maruyama Masao, (2) Divisi ke tiga puluh delapan dibawah pimpinan Mayor Jenderal Sano Tadayoshi, (3) Divisi ke empat puluh delapan dibawah pimpinan Mayor Jenderal Tsuchihashi Yuetzuo.

¹⁵ Marwati Djoened Poesponegoro, Nugroho Notokusanto, 1984 *Sejarah Nasional Indonesia*, Jilid VI, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, halaman 5

Panglima Tentara Ke Enam Belas yang bertugas di Jawa yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Hitoshi Inamura diangkat sebagai Gunsireikan yang dikepalai oleh *Saiko Sikikan*, namun demikian secara operasional pemerintahan militer Jepang ini dilaksanakan oleh Kepala Stafnya yaitu Mayor Jenderal Seizaburo Okasaki disertai tugas untuk membentuk pemerintahan Militer di Jawa yang kemudian diangkat sebagai *Gunseikan* (Pembesar Baia Tentara Jepang).

Secara skematis dapat digambarkan seperti berikut:¹⁶

GUNSHIREIKAN
(Panglima Tentara)

SAIKO SHIKIKAN
(Panglima Tertinggi)

GUNSEIKAN
(Kepala Pemerintahan Militer/
Kepala staf Tentara)

GUNSEIBU
(Kordinator Pemerintahan Militer)

GUNSEIKANBU
(Departemen-Departemen)

Dengan demikian Pemerintah Militer tersebut terdiri dari *Gunsireikan* (Panglima Balatentara Jepang) yang dikepalai oleh *Saiko*

¹⁶ Bagan ini berdasarkan Osamu Seirei Bomor 1, tanggal 7 Agustus 1942, periksa juga The Liang Gie, 1993, halaman 20-23; Marwati, 1984, halaman 6-7; Suwarno, 1994, halaman 106

Sikikan. Dibawah Pejabat ini terdapat *Gunseikan* (Pembesar Pemerintah Balatentara Jepang) dan kepala-kepala berbagai departemen seperti *Soomubutyoo* (Kepala Departemen Urusan Umum). *Gunsireikan* menetapkan peraturan yang dinamakan *Osamu Seirei*, sedangkan peraturan yang dikeluarkan oleh *Gunsiekan* disebut *Osamu Kanrei*.

Dalam rangka pelaksanaan pemerintahan militer Jepang tersebut, pada tanggal 7 Maret 1942, Panglima Tenuara Keenambelas di Jawa mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Thun 1942. Hal-hai yang berkaitan dengan bidang pemerintahan tercantum dalam pasal 1 sampai dengan 4 yaitu: pasal 1: Balatentara Jepang melangsungkan pemerintahan militer sementara waktu di daerah-daerah yang telah diduduki agar supaya mendatangkan keamanan yang sentosa dengan segera; pasal 2: Pembesar balatentara memegang kekuasaan yang dahulu berada di tangan Gubernur Jenderal Hindia Belanda; pasal 3: Semua badan-badan pemerintah dan kekuasaan hukum dan undang-undang dari pemerintah yang dahulu tetap diakui sah untuk sementara waktu, asal saja tidak bertentangan dengan aturan pemerintah militer; pasal 4: bahwa balatentara Jepang akan menghormati kedudukan dan kekuasaan pegawai-pegawai yang setia kepada Jepang.¹⁷

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, maka dibentuklah pemerintahan untuk tingkat pusat (*Gunseikanbu*) serta pemerintahan militer

¹⁷ *Ibid*, halaman 1

di tiga tempat yaitu Bandung, Semarang dan Surabaya yang disebut Gunseibu. Gunseibu yang dibawah pimpinan Gunseikan (Kepala Staf Tentara) dan membawahi sejumlah Bu (Departemen) yaitu: (1) Urusan Umum/*Somubu*; (2) Dalam Negeri/*Naimubu*; (3) Perekonomian/*Sangyobu*; (4) Keuangan/*Zaimobu*; (5) Kehakiman/*Shidobu*; (6) Kepolisian/*Keimubu*; (7) Lalu lintas/*Kotsobu*; (8) Propaganda/*Sendenbu*.

Secara Garis besarnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 dan 28 yang dikeluarkan pada bulan Agustus 1942, bahwa pemerintahan militer di Jawa dan Madura dibagi ke dalam Syu (Keresidenan di Jaman Hindia Belanda) dan dua buah Kochi (Daerah Istimewa) yaitu Batavia yang ditetapkan pada tanggal 8 Agustus 1942 ditetapkan sebagai *Tokubetsu Syi*. Syu kemudian dibagi atas Syi (setingkat dengan Kotapraja) dan Ken (setingkat dengan Kabupaten), serta dibawahnya terdapat *Gun* (sama dengan Kewedanaan), *Son* (sama dengan Kecamatan) dan *Ku* (sama dengan kelurahan). Untuk seluruh Jawa dan Madura terdiri dari 17 Syu yaitu: Banten, Batavia, Bogor, Priangan, Cirebon, Pekalongan, Semarang, Banyumas, Pati, Kedu, Surabaya, Bojonegoro, Madiun, Kediri, Malang, Besuki, dan Madura.

Di Sumatra Pemerintahan Militer dibawah Panglima Tentara ke Duapuluh lima dibentuk 10 Karesidenan (*Syu*) yaitu : (1) Aceh, (2) Sumatra Timur, (3) Sumatra Utara, (4) Sumatra Barat, (5) Bengkulu, (6) Jambi, (7) Palembang, (8) Lampung, (9) Bangka, (10) Belitung. Gunseikanbu yang dibentuk pada pertengahan tahun 1943 memiliki

departemen-departemen sebagai berikut: (1) Dalam Negeri, (2) Kepolisian, (3) Kehakiman, (4) Industri, (5) Keuangan, (6) Pekerjaan Umum, (7) Perhubungan, (8) Penerangan, (9) Pemandangan dan Pengiriman, (10) Meteorologi.¹⁸

Kordinator pemerintahan Militer setempat dilakukan oleh Gunseibu. Tugas yang diemban lembaga ini adalah memelihara ketertiban dan keamanan serta menanamkan kekuasaan didaerah itu. Disamping itu mereka juga dapat memecat para pegawai kebangsaan Belanda dan membentuk pemerintahan setempat dengan menggantikannya dengan orang-orang Jepang. Tetapi dalam prakteknya hal ini mengalami banyak hambatan oleh karena terbatasnya tenaga yang berasal dari orang-orang Jepang.

Tata hubungan dalam sistem pemerintahan Balatentara Jepang yang berkaitan dengan pemerintahan dapat digambarkan sebagai berikut:

- 1). *Syu* merupakan daerah tingkat teratas yang mempunyai pemerintahan sendiri sebagai suatu kesatuan dan dibawahnya terdapat *Ken* dan *Syi* dalam lingkungan wilayahnya.
- 2). Untuk masing-masing daerah itu diangkat masing-masing seorang kepala daerah (*Syuutyookan, Tokubetu Sityoo, Kentyoo san Sityoo*).

¹⁸ Marwati Djoened Poesponegoro, Nugroho Notokusanto, *Op. Cit.* Halaman 12

- 3). Sepanjang tidak diubah oleh Balatentara Jepang ketentuan dalam *Regentschaps-Ordonantie* dan *Staadsgemeente-Ordonantie* tetap masih berlaku.
- 4). Wewenang yang sebelumnya dilakukan oleh Raad dan Colege pemerintahan harian dari *Regentschaps* dan *Staudsgemeente* kini dilakukan oleh *Kentyoo* dan *Sityoo*.
- 5). Sistem pemerintahan tunggal tanpa dewan-dewan perwakilan rakyat dilaksanakan secara konsekwen sampai tahun 1943.
- 6). Pengawasan terhadap daerah-daerah otonom yang sebelumnya dilakukan oleh *Gouvereneur-Generaal* dan aparat pemerintah propinsi kini dilakukan oleh *Gunsiekan* ¹⁹

Gunseikanbu-Naimubu dalam tata pemerintahan ternyata memiliki kedudukan yang sangat menentukan setelah *Somubu* (Departemen Urusan Umum). Lembaga ini menampung berbagai urusan yang tidak tertampung pada departemen lain. Oleh karena itu lembaga ini memiliki bagian-bagian seperti: urusan umum, pemerintahan daerah, pendidikan dan pengajaran, kesehatan, soaial, perburuhan dan agraria. Pembagian tugas antara orang Indonesia dengan Jepang tidak nampak, oleh karena semua keputusan diambil oleh Jepang. ²⁰

Hal ini tercermin dari adanya pernyataan-pernyataan, pembatasan-pembatasan serta penguasaan faktor-faktor produksi oleh

¹⁹ The Liang Gie, 1993, *Pertumbuhan Pemerintah Daerah di Negara Republik Indonesia*, Jilid I, Penerbit Liberty, Yogyakarta, halaman 21-22

²⁰ Arsip Nasional Republik Indonesia, *Op.Cit.*, halaman 18-19

pemerintah yang tidak lain merupakan penjelmaan dari sistem ekonomi perang. Ciri-ciri yang melekat pada sistem ekonomi perang tersebut adalah mulai diberlakukannya setiap lingkungan daerah sistem "autarki" dengan desentralisasi politik ekonomi. Pulau Jawa yang dalam hal ini merupakan lingkungan kemakmuran bersama Asia Timur Raya memiliki tugas untuk dapat memenuhi kebutuhannya sendiri serta produksi barang-barang untuk kepentingan perang. Tetapi dalam perjalannya terutama dalam menghadapi Sekutu terjadi perubahan sikap dari Regim Jepang disebabkan oleh adanya tekanan dalam perang menghadapi Sekutu. Perubahan sikap itu tercermin dari keputusan di Parlemen Tokyo dalam pidato Perdana Menteri Tojo pada tanggal 16 Juni 1943, yaitu dengan memberikan kesempatan kepada orang-orang Indonesia untuk mengambil bagian dalam pemerintahan.

Kehadiran pemerintahan Balatentara Jepang menggantikan sistem pemerintahan Belanda yang ada sebelumnya berkaitan pula terhadap pegawai negeri pribumi yang pada masa pemerintahan kolonial Belanda disebut *Inlands Bestuur* (Pangreh Praja). Sejak semula Pangreh Praja ini memiliki fungsi yang ambivalen, disatu pihak bertindak sebagai kepala tradisional rakyat, tetapi dipihak lain mereka sebagai pegawai yang mendapatkan gaji dari pemerintah Belanda.²¹ Kadang mereka juga berperan sebagai ujung tombak melindungi

²¹ Kurasawa, Aiko, 1993, *Mobilisasi dan Kontrol*, PT. Gramedia, Jakarta, halaman 389

penduduk desa Jawa dari persentuhan langsung dengan budaya Barat.²²

Pada masa pendudukan Jepang dengan sistem birokrasi militer, ada keinginan untuk menghapus dualisme dari fungsi pangreh praja tersebut. Langkah legislatif yang berkaitan dengan perubahan ini ialah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 27 dan 28 tanggal 5 Agustus 1942, yaitu perubahan keorganisasian dalam pemerintahan daerah. Secara kelembagaan dilakukan perubahan unit-unit pemerintahan daerah serta kepala-kepalanya. Semua *Syu* (Residen) dipegang oleh orang Jepang, sedangkan jabatan yang lebih rendah seperti *Fuku Shuchokan* (Wakil Residen), *Ken* (Bupati/Regent), *Gun* (Distrik) dan *Son* (Asisten Wedana) diserahkan pada orang Indonesia.

Dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 27 dan 28 tertanggal 5 Agustus 1941, maka pada tanggal 24 April 1942 diangkat sejumlah pejabat *Syu* (Residen) pada daerah Keresidenan/Kerajaan/Kota Khusus. Mereka semuanya berasal dari orang-orang Jepang baik sipil atau dari kalangan militer.

Posisi untuk orang Indonesia, diberikan pada jabatan-jabatan mulai *Fuku Syuutyookan* (Wakil Residen). Dalam upaya pengisian jabatan-jabatan ini Jepang telah mulai melakukan perombakan dalam sistem dalam merekrut pegawai. Semula sejak masa Hindia Belanda, sistem rekrutmen dilakukan lebih menekankan pada pola tradisional

²² *Ibid*, halaman 390

yaitu begitu besarnya pengaruh penunjukan pejabat atas pertimbangan secara turun temurun khususnya pada jabatan "Kencho" (Wakil Residen). Tetapi pada masa pendudukan Jepang hal ini sudah tidak dilakukan lagi dan proses pengangkatan seorang pejabat lebih ditekankan pada kemampuannya atau mungkin karena adanya suatu imbalan atau insentif terhadap para pejabat Jepang.²³ Pengangkatan Kencho yang dilakukan secara tidak konvensional ini terlihat dari diangkatnya tokoh-tokoh seperti Atik Suardi (guru), Muchtar Prabu Mangkunegara (insinyur), M. Murdjani (dokter).²⁴

Secara formal pemerintah Jepang memang melakukan seleksi dalam rangka penerimaan pegawai negeri (*Genchimin Kanri Shikaku Shiken*). Namun demikian pertimbangan bahwa pegawai negeri nantinya dapat dikendalikan oleh Jepang masih merupakan pertimbangan yang lebih penting. Karena itulah dalam birokrasi terdapat polarisasi karena ada pandangan pro dan kontra terhadap pemerintah Jepang, mengakibatkan terjadinya usaha pemecah belahan terhadap elemen pemerintahan (*divide et rule*). Pemerintah Jepang ingin mengendalikan birokrasi terutama dalam upaya mengontrol aktivitas masyarakat sehingga aparat birokrasi mendapat kritikan dari masyarakat.

Sebagai tindak lanjut dari pengangkatan pegawai tersebut, maka pada tanggal 1 April 1942 Jepang mengeluarkan undang-undang yang

²³ Kurasawa, Aiko, *Op.Cit.* halaman 411.

²⁴ *Ibid.* halaman 141-142

mengatur tentang gaji pegawai negeri dan lokal. Gaji yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut ternyata secara nominal lebih rendah dari sistem penggajian yang ditetapkan pada masa Hindia Belanda. Hal ini karena disamping gaji pokok para pegawai lebih rendah dari sebelumnya, juga masih ada potongan pajak yang berkisar dari 5% sampai dengan 20%, dan bagi pegawai Indonesia hanya digaji setinggi-tingginya f.500.

Disamping ketentuan tersebut diatas, juga terdapat aturan lainnya seperti yang berkaitan dengan pemerintahan desa yang semula diatur dalam Undang-Undang tahun 1907, yang dalam pasal 212 Osamu Seirei Nomor 7 tahun 1944 menetapkan jabatan Kepala Desa selama 4 tahun.²⁵ Jepang menyikapi kedudukan pangreh praja haruslah bertindak sebagai alat Jepang, mencoba menggunakan pihak nasionalis dan pemimpin-pemimpin Islam untuk mendapat dukungan ideologis untuk mengeksploitasi para petani.²⁶

Jepang ingin agar pangreh praja mampu menerapkan sebagian besar kebijakan yang digariskan pemerintah. Alasan yang mendasarinya ialah karena pangreh praja bekerja sangat dekat dengan kelompok lain seperti petani, kaum nasionalis dan pemimpin-pemimpin Islam.²⁷

²⁵ Bayu Suryaningrat, 1992, *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, halaman 73-74

²⁶ Shigeru, Sato, 1996, *The Pangreh Paraja in Java Under Javanese Military Rule*, BIJDAGEN, Journal of the Royal Institute of Linguistics and Anthropology, Deel 152, 4e, halaman: 289.

²⁷ *Ibid*, halaman 289.

Dalam upaya tetap menjamin kelancaran birokrasinya, inaka dengan berbagai produk aturan , Jepang berusaha merangkul rakyat Indonesia dengan cara mendirikan berbagai macam organisasi bahkan juga ikut membidani lahirnya organisasi tersebut. Karena itu munculah gerakan yang di-restui oleh pemerintah Jepang, bahkan ikut membidani kelahir-annya seperti: Barisan Pemuda Asia Raya, Gerakan Tiga A, POETERA, Jawa Hokokai, Tjoeo Sangi In, Seinendan, Keibodan, Barisan Pelopor, Heiho, Tonari Gumi, PETA, Gerakan Rakyat Baru dan BPUPKI. Dipihak lain lahir gerakan/perlawanan yang bersifat mandiri seperti Angkatan Moeda Indonesia, Gerakan Angkatan Baroe Indonesia, Ika Daigaku, serta muncuinya pemberontakan didaerah seperti Pemberontakan Sukamanah (Tasikmalaya) serta Pemberontakan Karangampel (Indramayu).

Sebagaimana masyarakat bangsa yang terjajah, aktivitas politik masyarakat lebih banyak diarahkan pada pemungutan atas pajak dan pelaksanaan pekerjaan rutin seperti pembuatan tanggul-tanggul. Hal ini tercermin dari dilaksanakannya "*Romusha*" di Indonesia yang menjadikan rakyat menderita. Pendirian partai politik yang diharapkan merupakan salah satu kontrol terhadap pemerintahan ternyata oleh pemerintah militer Jepang justru dilarang, tetapi dilain pihak justru memunculkan gerakan bawah tanah yang menjadi wadah dimana pemuda dan mahasiswa melakukan perlawanan untuk memperoleh kemerdekaannya.

C. Lingkup dan Pola Gerakan Politik

Lingkup gerakan politik dimaksudkan bahwa gerakan tersebut dapat dilakukan dalam berbagai bidang seperti bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, militer. Sedangkan pola gerakan dimaksudkan bahwa dalam gerakan itu dapat berupa dukungan terhadap kebijakan pemerintah atau perlawanan terhadap pemerintah Jepang. Oleh karena itu pola gerakan ini ada yang bersifat kooperatif artinya bekerjasama dengan pemerintah. Untuk hal seperti ini organisasi dimana gerakan itu berhimpun tidak jarang kelahirannya dibidani oleh pemerintah Jepang. Dilain pihak terdapat pola gerakan yang non kooperatif yaitu dengan melakukan perlawanan atau pemberontakan bahkan tidak jarang dilakukan sebagai gerakan bawah tanah. Munculnya pola gerakan bawah tanah ini tidak terlepas dari keluarnya peraturan Pemerintah Militer pada tanggal 20 Maret 1942 yang berkaitan dengan larangan terhadap setiap bentuk diskusi, gerakan, saran-saran dan propaganda yang berkaitan dengan pemerintahan. Disamping itu terdapat juga larangan terhadap pengibaran benderan termasuk Sang Saka Merah Putih selain bendera Jepang (*Hinomaru*). Pada bagian ini dicoba diiskripsikan lingkup dan pola gerakan yang dilakukan rakyat Indonesia dalam menghadapi Jepang, terutama yang berkaitan dengan apa saja yang dilakukan setiap bentuk gerakan ini secara nyata sebagai suatu gerakan politik.

1. Gerakan yang direstui Jepang

1). Gerakan Tiga A

Munculnya Gerakan Tiga A merupakan propaganda Jepang yang telah dirancang oleh "Badan Propaganda" dalam upaya mendapatkan dukungan rakyat Indonesia terhadap regim yang baru. Banyak harapan diletakkan dipundak gerakan ini terutama dalam upaya mengakomodir kepentingan orang-orang Asia (Indonesia). Organisasi ini oleh Jepang diharapkan dapat berfungsi sebagai pengganti dari organisasi yang ada sebelumnya (pada masa Hindia Belanda) seperti organisasi politik, keagamaan, sosial maupun kultural. Gerakan Tiga A dengan semboyan Nippon cahaya Asia, Nippon pelindung Asia dan Nippon pemimpin Asia, merupakan wujud terjadinya hubungan dan kerjasama kaum nasionalis dengan pihak Jepang. Munculnya gerakan ini tidak terlepas dari upaya "*Sendenbu*" (bagian propaganda Jepang) menjadi sponsornya, sebagai ketuanya kemudian diangkat Mr. Dyamsudin seorang tokoh dari Parindra. Pemilihan Mr. Syamsudin sebagai pimpinan Gerakan Tiga A diharapkan merekrut kelompok intelektual, pejabat-pejabat pemerintah, kaum priyayi, serta tokoh-tokoh dari berbagai kelompok agama (Islam dan Kristen).

Gerakan yang didirikan pada tanggal 29 April 1942 ini, kemudian disosialisasikan ke daerah-daerah diseluruh pulau Jawa.²⁸ Dalam upaya konsolidasi organisasi, maka setiap daerah kemudian dibentuk

²⁸ Nugroho Notokusanto, Op.Cit. halaman 41

komite-komite seperti komite nasional, komite rakyat. Untuk mempercepat sosialisasinya, maka sejak Mei 1942 mulai diperkenalkan melalui media masa.

Semula propaganda dilakukan dengan mengedepankan "persamaan" seperti semboyan yang didengungkan dalam gerakan tersebut. Fenomena ini oleh sebagian para pemuda dianggap sebagai datangnya angin segar mengingat pada masa penjajahan Belanda sangat sarat dengan kehidupan yang diskriminatif. Dilain pihak mengingat antusiasme para pemuda, maka program pelajaran yang diberikan pada para anggotanya khususnya yang berasal dari Indonesia ditekankan pada upaya menanamkan semangat (*seishin*) sehingga diharapkan mampu menumbuhkan jiwa kesatria (*bushido*). Secara langsung maupun tidak langsung, ternyata upaya penanaman semangat kesatria ini menimbulkan semangat "*ke-Indonesia-an*" pada diri para pemuda, bahkan pada akhirnya menjadi bumerang bagi Jepang.

Dalam perjalanannya, organisasi ini oleh Jepang dianggap kurang efektif dalam rangka mobilisasi (pengerahan masa).²⁹ Pemerintah balatentara Jepang rupanya kurang memahami bahwa gerakan ini bukanlah suatu gerakan nasionalis yang bersifat sukarela sehingga banyak berharap untuk kepentingannya, melainkan suatu drama komedi yang ditulis dan dipentaskan oleh pimpinan Shimizu Hitosi.³⁰

²⁹ Marwati Djoened Poesponegoro, Nugroho Notokusanto, *Op. Cit.* halaman 18-19

³⁰ Nugroho Notokusanto, *Op. Cit.* halaman 41

Oleh karena itu gerakan yang disponsori oleh Jepang lebih banyak bermanfaat dalam rangka penggalangan terhadap kelompok nasionalis yang bagi Jepang dianggap kurang efektif. Pertemuan-pertemuan yang dilaksanakan oleh gerakan ini justru lebih meningkatkan solidaritas rakyat.

2). Barisan Pemuda Asia Raya (BPAR)

Dalam upaya menarik simpati bangsa Indonesia, Jepang mempergunakan "pendidikan" sebagai salah satu sarana daya tarik terhadap simpati rakyat Indonesia. Di samping pendidikan formal seperti sekolah, terdapat juga pendidikan khusus berupa latihan-latihan. Semua ini merupakan upaya agar para pemuda berperilaku pro terhadap kehadiran Jepang. Pendidikan yang berupa latihan bagi kaum muda adalah "Barisan Pemuda Asia Raya" (BPAR) pada tingkat pusat, sedangkan untuk daerah-daerah telah terbentuk Komite Keinsafan Pemuda dimana keanggotaannya terdiri dari unsur kepemudaan. Karena bersifat lokal tersebut maka unsur-unsur daerah masih sangat menonjol.

Barisan Pemuda Asia Raya didirikan pada tanggal 11 Juni 1942 yang dipimpin oleh dr. Slamet Sudibyo dan S.A Saleh. BPAR berinduk pada Gerakan Tiga A. Secara nyata kegiatan yang dilakukan adalah mengikuti latihan selama tiga bulan. Dalam latihan itu ditekankan pada upaya menjadikan mereka sebagai pemimpin pemuda yang lainnya

(latihan kepemimpinan). Latihan yang sama juga dikenakan pada San A. Seinen Kunrensho yang pelatihannya selama satu setengah bulan.

3). POETERA (Poesat Tenaga Rakyat)

Ada upaya Jepang untuk menggiring para tokoh pergerakan khususnya kaum nasionalis "sekuler" untuk diajak bekerja sama. Oleh karena itu pada bulan Desember 1942 dibentuklah satu panitia persiapan pembentukan suatu organisasi rakyat yang dipimpin oleh Ir. Soekarno. Organisasi yang dibentuk tersebut kemudian secara resmi diumumkan pada tanggal 1 Maret 1942 dengan nama "Poesat Tenaga Rakyat" yang disingkat POETERA dimana Ir. Soekarno sebagai ketuanya.³¹ Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh perkumpulan ini ialah:

- (1). Membangun dan menghidupkan segala apa yang dirobahkan oleh Imperialisme Belanda.
- (2). Memusatkan segala potensi masyarakat Indonesia dalam rangka membantu upaya peperangan yang dilakukan Jepang dalam menghadapi Sekutu.
- (3). Pembinaan terhadap masyarakat dan memusatkan potensi untuk kepentingan Jepang.

³¹ *Asia Raya 1 Maret 1942*, seperti dikutip oleh: Marwati Djoened Posepongoro, Nugroho Notosusanto, 1984, dalam *Sejarah Nasional Indonesia*, Jilid VI, Penerbit Balai Pustaka Jakarta, halaman 19.

- (4). Meningkatkan kesadaran rakyat akan kewajiban dan tanggung jawabnya dalam rangka menghilangkan pengaruh barat (Amerika, Inggris, Belanda).³²

Poetera sebagai sebuah organisasi, memiliki struktur pimpinan yang dibagi-bagi dalam tiga bidang yaitu: (1) Pembangunan, (2) Usaha dan Budaya, (3) Propaganda. Poetera dipimpin secara kolektif oleh Empat Serangkai (Ir. Soekarno, Drs. Hohammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, K.H.Mas Mansur). Keempat pimpinan ini dianggap sebagai lambang dari segala aliran dalam Pergerakan Nasional. Disamping itu Poetera juga memiliki penasehat yang terdiri dari orang-orang Jepang seperti S. Miyoshi (konsul Jepang di Jakarta), G. Taniguci (pimpinan Surat khabar Toindo Nippon), Icio Yamasaki (badan perdagangan) dan Akiyama (Bank Yokohama). Kehadiran Poetera membawa implikasi terhadap pemerintah Jepang. Hal ini terbukti dari dikeluarkannya pernyataan Perdana Menteri Tojo pada tanggal 16 Juni 1943 yang berkaitan dengan adanya kesempatan terbuka bagi orang Indonesia dalam melaksanakan partsipasinya dalam bidang politik.

Pada mulanya kehadiran Poetera mendapat sambutan positif. Hal ini tercermin adanya dukungan dari berbagai organisasi seperti: Pengurus Persatuan Guru Indonesia; Perkumpulan Pos, Telegraf, Telepon dan Radio; Barisan Banteng; Ikatan Sport Indonesia dan

³² *Ibid.* halaman 20

BAPERPI. Kehadiran Poetera rupanya dimanfaatkan oleh para pemimpin Indonesia (Sukarno) dalam upaya membangkitkan kesadaran dan kesiapan mental rakyat melalui pidato-pidato yang disampaikan. Karena hanya lebih banyak dijadikan alat propaganda untuk meningkatkan militansi rakyat Indonesia, maka Jepang ternyata terdorong untuk mengadakan perhitungan kembali mengenai posisinya serta hubungannya dengan Poetera.

Walaupun Poetera berupa organisasi yang dibina oleh pemerintah Jepang, dalam kenyataannya justru mampu mempersiapkan mental bangsa Indonesia terutama dalam rangka menyongsong kemerdekaan yang dicita-citakan. Hal ini rupanya juga disadari oleh Jepang, bahwa keberadaannya lebih banyak menguntungkan rakyat dan pejuang Indonesia dari pada Jepang, sehingga Jepang mulai mengalihkan perhatiannya pada organisasi lain. Dengan demikian paling tidak terdapat dua hal yang mengakibatkan dilakukan penggantian Poetera yaitu ketidakpuasan parapejabat Jepang dan juga adanya tuntutan pengerahan massa lebih banyak sebagai akibat dari suasana peperangan yang sedang dihadapi oleh Jepang.

4). Jawa Hokokai

Kekecewaan Jepang terhadap Poetera karena dianggap lebih menguntungkan Indonesia, maka dibentuklah kemudian sebuah organisasi baru yang didalamnya mencakup berbagai golongan seperti Cina, Arab dan sebagainya. Alasan yang mendasari lahirnya organisasi

ini adalah karena ketidak puasan para pejabat Jepang akan perkembangan kaum nasionalis dan juga semakin buruknya situasi perang di Asia Timur sehingga diperlukan persatuan segenap rakyat.³³

Organisasi yang didirikan pada tanggal 8 Januari 1944 ini didasarkan atas pernyataan Panglima Tentara Keenambelas Jepang yaitu Jenderal Kumakici Harada dengan nama "Jawa Hokokai" atau Himpunan Kebaktian Jawa. Kebaktian (Hoko Seishin) meliputi pengorbanan diri, mempertebal persaudaraan dan melaksanakan sesuatu dengan bakti. Dengan demikian secara eksplisit Jawa Hokokai adalah organisasi resmi pemerintah Jepang, tercermin dari pucuk pimpinannya dipegang langsung oleh Gunseikan. Hal ini tentunya berdasarkan pengalaman sebelumnya bahwa kalau pucuk pimpinan dipegang oleh orang Indonesia justru menjadi humerang bagi Jepang seperti halnya yang terjadi pada Poetera. Rupanya Jepang tidak ingin mengulangi kesalahan yang pernah terjadi sebelumnya dalam membina organisasi dimana dimana pimpinan teras organisasi yang dibentuk melibatkan orang Indonesia.

Walaupun sejak 1944 Jepang mulai mengalami beberapa kekalahan dalam peperangan menghadapi Sekutu, keadaan perekonomian semakin merosot, namun kehadiran Jawa Hokokai bukan dimaksudkan semata-mata untuk pengerahan massa, akan

³³ Nugroho Noto Susanto, *Op. Cit.* halaman 43

tetapi lebih banyak ditujukan untuk mengadakan pengawasan yang lebih ketat terhadap rakyat.

Sebagai organisasi sentral, keanggotaan Jawa Hokokai terdiri dari berbagai bidang organisasi profesi seperti para pendidik, organisasi kedokteran, organisasi wanita, pusat kebudayaan. Dilihat dari aspek organisasinya, Jawa Hokokai langsung berada dibawah Gunseiken. Sebagai sebuah organisasi, kegiatan yang dilakukan ialah: (1) Melaksanakan segala sesuatu dengan nyata dan ikhlas untuk menyumbangkan segenap tenaga kepada pemerintah Jepang, (2) Memimpin rakyat untuk menyumbangkan segenap tenaga berdasarkan semangat persaudaraan antara segala bangsa, (3) Memperkokoh pembelaan tanah air.

5). *Tjoeo Sangi In*

Tjoeo Sangi In adalah sebuah badan penasehat Jepang yang didirikan berdasarkan *Osamu Seirei* Nomor 36 tanggal 5 September 1943. Badan ini berada langsung dibawah *Saiko Sikikan*, dengan tujuan memajukan pemerintah Balatentara Jepang. Sebagai badan penasehat lembaga ini memiliki tugas mengajukan saran dan usul dan juga memberi pertimbangan dan atau jawaban apa yang diinginkan oleh *Saiko Sikikan*.

Berdirinya *Tjoeo Sangi In* didasarkan atas pernyataan Perdana Menteri Tojo pada tanggal 16 Juni 1943 mengenai diberikannya

kesempatan “partisipasi politik” bagi orang-orang Indonesia. Disamping itu terdapat Maklumat Perdana Menteri Kaiso pada tanggal 4 September 1944 bahwa Indonesia akan diberi “kemerdekaan” dikemudian hari. Dengan demikian dibentuklah kemudian *Tjoeo Sangi In* dan *Sha-Sangikai*.³⁴

Sebagai sebuah organisasi, maka tugas yang harus dilaksanakan ialah memberi nasehat pada *Saiko Sikikan*, tentunya kelompok ini termasuk mengambil pola perjuangan yang bersifat kooperatif. Hal ini tercermin dari adanya keputusan yang dilaksanakan pada bulan Oktober 1944 yang menyepakati : (1) memperkuat para prajurit Peta dan Heiho, (2) menggerakkan tenaga kerja untuk keperluan masyarakat dan perang, (3) meneguhkan susun kehidupan masyarakat dan perang, (4) memperbanyak hasil produksi pangan.³⁵ Oleh karena itu mereka dianggap sebagai kolaborator Jepang. Memang banyak tokoh perjuangan dalam strategi perjuangannya bekerja sama dengan Jepang. Hal ini terjadi karena: (1) Memiliki lawan yang sama, (2) Kesempatan untuk membentuk kesadaran dari rakyat, (3) Kesempatan untuk membentuk fron nasional, (4) Kesempatan melakukan agitasi dan massa aksi.³⁶

³⁴ Nugroho Notosusanto, *Loc.Cit*

³⁵ Marwati Djoened Pusponogoro, Nugroho Notosusanto, *Op.Cit.* halaman 4

³⁶ Purbo S. Suwondo, 1996, *PETA, Tentara Sukarela Pembela Tanah Air*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, halaman 36

6). *Seinendan*

Organisasi ini bersifat semi militer yang secara organisatoris berada dibawah *Gunseikan*. Tujuan yang ingin dicapai adalah mendidik dan melatih para pemuda agar dapat menjaga dan mempertahankan tanah airnya dengan kekuatan sendiri. Sebenarnya yang paling mendasar dari keberadaan organisasi ini ialah dalam upaya Jepang memperoleh pasukan cadangan untuk memenangkan peperangan melawan Sekutu. Dalam organisasi ini kaum nasionalis banyak mengambil peran. Hal ini tercermin dari adanya tokoh-tokoh nasionalis yang menduduki posisi dalam markas besar *Seinendan* seperti Sukarni, Abdul Latif Hendraningrat.

Organisasi ini pembentukannya diumumkan pada tanggal 24 April 1943 bertepatan dengan hari ulang tahun Maharaja (*Tencho Setsu*). *Seinendan* merupakan organisasi yang bersifat politis dari jenis Peace Corps.³⁷ Para anggota *Seinendan* ini diberikan latihan militer baik untuk mempertahankan diri maupun dalam rangka melakukan serangan. Keberadaan organisasi ini tersebar diberbagai instansi seperti di pabrik-pabrik, perumahan-perumahan, sekolah-sekolah dan sampai kedesa-desa. Mereka dilatih dilembaga latihan pemuda (*Tjoseo Seinen Kunrensho*) dengan materi latihan dasar kemiliteran. Dengan demikian tugas yang diemban adalah mempersiapkan pemuda secara mental

³⁷ Nugroho Notosusanto, *Op.Cit*, halaman 46

maupun teknis untuk memberikan sumbangan kepada usaha perang Jepang baik dengan meningkatkan produksi maupun pengamaan garis belakang.³⁸ Dari aspek struktur kepengurusannya, terdiri dari dari: (1) *Dancho*/komandan, (2) *Fukudancho*/wakil komandan, (3) *Komon*/penasehat, (4) *Sanyo*/anggota dewan pertimbangan, (5) *Kanji*/administrator.

7). Keibodan

Keibodan adalah badan sipil untuk membantu polisi yang memiliki tugas-tugas seperti penjagaan lalu-lintas, pengamanan desa dan sebagainya.³⁹ Seseorang dapat diterima sebagai Keibodan apabila telah berumur antara 20-35 tahun. Mereka dibina oleh Keimobu (Departemen Kepolisian), oleh karena itu kepala polisi di suatu daerah diberi tanggung jawab terhadap keberadaan Keibodan yang ada di daerahnya. Dalam rangka menambah keterampilannya, mereka diberikan latihan khusus yang berada di Sukabumi. Dalam membina lembaga ini ada upaya dari Jepang agar terlepas dari pengaruh kaum nasionalis. Hal ini tercermin dari basis pembentukannya berada dipedesaan dimana kaum nasionalis kurang memiliki pengaruh dan juga dengan ditempatkannya langsung dibawah pengawasan polisi.

Dalam lingkungan *Keibodan* terdapat satuan-satuan *Tokubetsu Keibotai* (badan khusus untuk membantu polisi yang terdiri dari orang-

³⁸ *Ibid*, halaman 45

³⁹ Marwati Djoened Poespoetjoro, Nugroho Nctosusanto, *Op.Cit.*, halaman 30

orang Indonesia maupun Cina). Mereka ini merupakan pasukan elite dalam *Keibodan* yang tugasnya langsung membantu polisi dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban.⁴⁰ *Keibodan* yang juga disebut "Korp Kewaspadaan" dibentuk sebagai pasukan polisi bantuan dalam upaya memberikan bantuan pemeliharaan ketertiban dan keamanan termasuk melakukan pengawasan terhadap yang dianggap sebagai musuh (*mata-inata*).

8). Barisan Pelopor (Gakutotai)

Barisan Pelopor dibentuk dalam rangka menindak lanjuti keputusan Sidang *Tjuo-Sangi-In* yang berlangsung pertengahan 1944. Semakin serunya pertempuran Jepang dengan Sekutu dimana banyak daerah yang semula dikuasai Jepang jatuh ke tangan Sekutu, maka pada tanggal 1 Nopember 1944 dibentuklah Barisan Pelopor. Kemudian pada tanggal 8 Desember 1944 dibentuk lagi Barisan Berani Mati (*Jibakutai*), pada tanggal 15 Desember 1944 dibentuk lagi Pasukan *Hisbullah* (*Kaikyo Seinen*) yang berupa pasukan semi militer dari kaum muda Islam.

Pembentukan Barisan Pelopor ini dengan dalih dalam upaya membangun persaudaraan segenap rakyat dengan mempersatukan seluruh penduduk untuk bersama-sama menggiatkan upaya mencapai kemenangan dalam menghadapi Sekutu. Barisan Pelopor ini merupakan

⁴⁰ Nugroho Notokusanto, *Op.Cit.* halaman 46

organisasi yang dipimpin oleh kaum nasionalis seperti Ir. Soekarno, R.P. Soeroso, Oto Iskandardinata dan dr. Buntaran Martoatmodjo.

Sebagai organisasi yang bersifat semi militer, yang dilakukan organisasi ini ialah melatih para pemuda dengan pendidikan ala militer. Melalui gerakan ini golongan "pemuda terpelajar" akhirnya terjun dalam kegiatan diantara massa rakyat sehingga terjadi sinergi dengan para pemuda yang "tidak terpelajar". Latihan yang diberikan dikaitkan dengan kegiatan disekolah dengan latihan kemiliteran yang menjadi kegiatan intra kurikuler (wajib). Dari proses pendidikan ini diharapkan mampu menghasilkan tenaga penggerak dalam bidang Revolusi Indonesia.⁴¹

9). Heiho

Terbatasnya jumlah penduduk Jepang, maka dalam rangka mempertahankan wilayah-wilayah yang telah disusuki dalam Peperangan di Asia, maka pada bulan April 1943 dikeluarkanlah pengumuman yang memberi kesempatan kepada pemuda-pemuda Indonesia untuk menjadi pembantu prajurit Jepang (Heiho). Hasil rekrutmen ini kemudian ditempatkan langsung dalam organisasi militer Jepang, baik dari Angkatan Darat maupun Angkatan Laut.⁴² Heiho sebagai pasukan bantuan merupakan bagian resmi dari pasukan darat

⁴¹ *Ibid.*, halaman 47

⁴² Marwati Djoened Poesponegoro, Nugroho Notokusanto, *Op.Cit.*, halaman 33

imperial. Dalam melaksanakan tugasnya, Heiho ditempatkan tidak didasarkan atas tempat asal mereka, tetapi Jepang menempatkan mereka sesuai dengan keinginan pemerintah.

Persyaratan dalam penerimaan anggota Heiho ini adalah: berbadan sehat, berkelakuan baik, umur antara 18-25 tahun dan berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Dasar.⁴³ Sampai akhir tahun 1943 jumlah *Heiho* diperkirakan 42.000 orang. Oleh karena kedudukannya sebagai pengganti prajurit Jepang maka spesifikasinya terdiri dari pasukan anti pesawat udara, anti tank, artilleri medan, pengemudi dan sebagainya.

Pelaksanaan latihan *Heiho* didasarkan atas keputusan Kementrian Angkatan Darat tanggal 23 September 1942 dengan nama kode "*Reku-a-mitsu*" nomor 3636 yang menjadi pedoman bagi *Heiho* sebagai prajurit Indonesia yang berdinasi didalam tentara sebagai pembantu prajurit Jepang.⁴⁴

10). Tonari Gumi

Berepatan dengan hari *Tericho Setsu* (ulang tahun Kaesar Hirohito), pada tanggal 29 April 1943 penguasa Jepang di Jakarta mengumumkan pembentukan sistem perlawanan semesta dari kota sampai ke pelosok-pelosok desa dengan memasukkan disiplin militer.

⁴³ *Ibid*, halaman 33

⁴⁴ Nugoro Notosusanto, *Op.Cit.* halaman 46

Sistem ini dimulai dari setiap rumah tangga, beberapa keluarga yang rumahnya berdekatan disusun dalam suatu kelompok disebut *Tonari Gumi* atau Rukun Tangga.⁴⁵ *Tonari Gumi* telah menjadi unsur penting dalam sistem pemerintahan di negeri Jepang pada tahun 1930 an ketika banyak segi dari kediktatoran Tokugawa dihidupkan kembali dan diperkuat.⁴⁶ *Tonari Gumi* bertindak sebagai sarana efektif dalam melakukan kontrol atas penduduk Jepang pada masa perang. Setiap rumah tangga dipaksa supaya berpartisipasi.⁴⁷

Rupanya apa yang terjadi di Jepang dicoba diterapkan di Indonesia. Menjelang pembentukan *Tonari Gumi* di Indonesia (Jawa) penguasa militer Jepang tentunya belajar dari pengalaman apa yang pernah terjadi di Jepang. Pembentukan *Tonari Gumi* ini secara resmi diumumkan oleh pemerintah pada tanggal 11 Januari 1944 saat berlangsungnya Konferensi Residen seluruh Jawa. Adapun fungsi dari lembaga ini ialah:

- (1). Membantu *Keibodan* (organisasi keamanan) dalam mempertahankan tanah air serta menyadarkan mereka
- (2). Memberi tahu rakyat mengenai dekrit, peraturan dan petunjuk pemerintah serta menyadarkan mereka

⁴⁵ Asmadi, 1985, *Pelajar Pejuang*, Penerbit Sinar Harapan, Jakarta, halaman 35

⁴⁶ Anderson, Ben, 1988, *Revolusi Pemuda*, Pustaka Sinar Harapan, halaman 49

⁴⁷ Kurasawa, Aiko, *Op. Cit.* Halaman 197

- (3). Membantu peningkatan produksi dan penyerahan padi serta tanaman lain
- (4). Mendistribusikan catu barang
- (5). Bekerja sama dengan pemerintah militer dalam urusan militer dan menjalankan pelayanan lainnya
- (6). Memajukan gotong royong dikalangan penduduk.⁴⁸

Tonari Gumi diketuai oleh seorang ketua yang disebut Kumicho, yang membawahi 10 sampai 15 kepala rumah tangga. Sejumlah 4 sampai 6 *Tonari Gumi* di gabungkan kedalam wadah *Chokai* (Rukun Kampung) yang dikepalai oleh *Chikaicho*.⁴⁹ Para anggota Rukun Kampung ini secara kolektif dimanfaatkan untuk keperluan dalam melakukan pengawasan terhadap penduduk, memudahkan pengumpulan dan pembagian persediaan-persediaan, menyebarkan propaganda pemerintah dan mengerahkan seluruh golongan masyarakat untuk mengikuti rapat-rapat umum, parade, upacara upacara.⁵⁰ Sedangkan *Tonari Gumi* memiliki hak untuk menerima bahan-bahan yang dicatu, sedangkan kewajibannya ialah ikut serta menjaga keamanan lingkungannya yang diterapkan dari kota-kota sampai kedesa-desa dan kampung-kampung.⁵¹

⁴⁸ *Ibid* halaman 202

⁴⁹ Asmadi, *Loc.Cit*

⁵⁰ Anderson, Ben, *Loc.Ci*

⁵¹ Asmadi, *Op.Cit.* halaman 36

Dengan adanya sistem ini, pemerintah Jepang dapat melakukan kontrol yang sangat efektif dan manfaatnya segera terasa khususnya kontrol terhadap catu bahan makanan dan keikutsertaan dalam *Romusha*.⁵² Dalam hal catu/distribusi bahan makanan mereka bekerjasama dengan *Kumiai* (Koperasi) yang bertindak sebagai unit dasar untuk memanipulasi struktur perekonomian yang dikendalikan pada masa perang. *Kumiai* bertindak mengawasi seluruh perekonomian pada tingkat masyarakat biasa, mengawasi dan mengatur seluruh proses produksi serta peredaran tanaman dan komoditi.⁵³ Memang pemerintah Jepang mengadakan bimbingan intensif terhadap para petani seperti penyuluhan pertanian dalam upaya menciptakan petani modern seperti yang ada di Jepang. Apa yang menjadi impian Jepang tersebut ternyata berbanding terbalik dengan kenyataannya yang ada di lapangan. Hal ini karena disamping para pelatuhnya bukan orang-orang yang memiliki kompetensi dalam bidang pertanian, juga disebabkan masa latihan yang diberikan sangat pendek sehingga pengetahuan yang diharapkan belum mampu diserap oleh rakyat.

11). PETA (Pembela Tanah Air)

⁵² *Ibid.* halaman 36

⁵³ Kurasawa, Aiko, *Op.Cit.* halaman 218

Peta didirikan berdasarkan Undang-Undang Balatentara Jepang (*Osamu Seirei*) Nomor 44 tanggal 3 Oktober 1943. Peta merupakan pasukan sukarela untuk membela tanah air. Jika disimak lebih lanjut, bahwa berdirinya Peta didorong oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. Kekuatan internasional, yaitu terjadinya ofensif Amerika dalam perang Pasifik dengan direbutnya kepulauan Salomon, Papua Nugini dan terjadinya serangan pada wilayah Indonesia bagian timur. Dengan demikian Jepang harus mulai merekrut militer yang lebih berkualitas disamping Heiho yang sudah ada sebelumnya. Ini berarti bahwa Jepang ingin mendapatkan tambahan kekuatan militer.
2. Adanya semangat nasionalisme dan patriotisme yang menyala-nyala, khususnya sejak dibentuknya Poetera dibawah pimpinan Empat Serangkai. Semangat inilah yang mendesak agar para pemuda Indonesia diberikan latihan militer dalam upaya membangkitkan kembali keperwiraan bangsa Indonesia ke dalam suatu wadah militer yang konkrit.⁵⁴

Gagasan pembentukan Peta berawal dari kehadiran Sutardjo Kartohadikusumo di Jepang dimana ia meminta pada pemerintah Jepang supaya mengadakan wajib militer di Indonesia dalam rangka

⁵⁴ Purbo S. Suwondo, *Op.Cit.* halaman 21

membantu Jepang untuk memenangkan Perang Asia Timur Raya. Dalam pengorganisasiannya, terdapat berbagai macam kepangkatan yaitu: (1) *Daidanco*/Komandan batayon, (2) *Cudanco*/Komandan Kompi, (3) *Shodanco*/Komandan Peleton, (4) *Budanco*/Komandan Regu, (5) *Giyuhei*/Prajurit Sukarela. Jika dilihat dari motivasinya ikut dalam Peta itu dapat digolongkan dalam tiga macam yaitu: (1) Masuk karena keinginan sendiri/sukarela, (2) Sekedar mencari nafkah, (3) Agar terhindar dari kecurigaan Jepang.⁵⁵

Pemerintah Balatentara Jepang begitu antusias dalam pendidikan Peta, oleh karena bagi Jepang hal ini memiliki makna yang sangat penting tercermin dari isi *Osamu Seirei* Nomor 44 tertanggal 3 Oktober 1943 sebagai berikut:

- (1). Tentara Peta berkeanggotaan Indonesia (penduduk asli) dari atas sampai bawah
- (2). Di dalam Tentara Peta akan ditempatkan militer Jepang untuk tujuan latihan
- (3). Tentara Peta ditempatkan langsung dibawah Panglima Tentara, lepas dari badan manapun juga
- (4). Tentara Peta merupakan tentara teritorial dengan kewajiban mempertahankan masing-masing daerahnya (*syu*)

⁵⁵ Marwati Djoened Poesponegoro, Nugroho Notokusanto, *Op.Cit.* halaman 37

(5). Tentara Peta dimasing-masing daerahnya harus siap untuk melawan sampai mati setiap musuh yang menyerang.⁵⁶

Dalam perjalanan sejarahnya ternyata Tentara Peta banyak mengalami kekecewaan sehingga menimbulkan pemberontakan, dan yang terbesar terjadi di Blitar pada tanggal 14 Februari 1945. Hal ini bermula terjadinya isolasi terhadap Tentara Peta oleh karena Jepang ingin agar penderitaan para sanak saudara mereka tidak diketahuinya akibat Romusha yang diterapkan Jepang dan kesulitan dalam ekonomi akibat kontrol yang amat ketat terhadap catu bahan makanan. Disamping itu adanya diskriminasi dalam penegakan disiplin antara tentara Jepang dengan tentara warga Indonesia. Akibatnya dibawah pimpinan *Shodanco* Suprijadi pemberontakan dilakukan terhadap Jepang di daerah Blitar.

12). Gerakan Rakyat Baru

Terjadinya kekhawatiran dari pemerintahan Balatentara Jepang, karena berbagai gerakan muncul, khususnya gerakan pemuda Indonesia. Oleh karena itu pada tanggal 2 Juli 1945 Jepang meminta pada empat pemimpin Indonesia (Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, Kiai Wahid Hasyim dan Wiranatakusuma) untuk mendirikan "Gerakan Rakyat Baru". Gerakan ini dibentuk oleh Saiko Shikikan dibawah pimpinan Letnan Jenderal Y.Nagano. Gerakan ini disusun berdasarkan

⁵⁶ *Kan Po, Nomor 28 (2603)*, halaman 20-21, seperti dikutip oleh Nugroho Notosusanto, 1979, *Tentara Peta*, Penerbit Gramedia, Jakarta, halamar. 731

hasil sidang Tjoeo Sangi In dimana ketika itu ada usulan agar didirikan gerakan yang dapat mengobarkan semangat cinta tanah air dan semangat perang. Disebut gerakan rakyat, maka dalam rancangannya memasukkan keanggotaannya yang terdiri dari berbagai golongan seperti B.M.Diah, Chairul Saleh, Sukarni, Asmara Hadi, Supeno, Wikana dan Harsono Tjokroaminoto (Angkatan Baru); Soediro, dr, Mawardi (Barisan Pelopor); Soediro/Embah (*Kaigun*); Chalid Rasjid, Adam Malik, Pandu Wiguna dan Soetomo (Angkatan Muda Surabaya).⁵⁷ Pengangkatan wakil-wakil golongan pemuda tersebut sebenarnya dalam upaya mengawasi kegiatan-kegiatan mereka, karena yang duduk didalamnya harus tunduk pada pemerintah Jepang dan bekerja dibawah pengawasan pejabat-pejabat Jepang. Ini menunjukkan terbatasnya kebebasan bergerak dari mereka sehingga menimbulkan ketidakpuasan diantara mereka.

Oleh karena organisasi ini merupakan himpunan dari berbagai macam gerakan, maka badan-badan yang dimasukkan ke dalam rancangan gerakan ini adalah: (1) Jawa Hokokai dengan Barisan Pelopornya, (2) Masyumi dengan Barisan Hisbullahnya, (3) Kakyo Shokai, (4) Panitia Peranakan, (5) Panitia Arab, (6) BPP, (7) BPPP, (8) Keimin Bunka Sidoosyo, (9) Tedjo Zusankai, (10) Seinendan, (11) Keibodan (12) Gakutootai, (13) Gelora, (14) Gerakan Latihan Pencak dan Silat, (15) Semua Tokubetsu Hookokai dan lain-lain badan dipusat

⁵⁷ Diah, B.M, 1983, *Angkatan Baru 45*, Penerbit Masa Merdeka, Jakarta, halaman 137

atau didaerah yang usahanya dapat dipersatukan kedalam Gerakan Rakyat Baru.⁵⁸ Tujuan yang ingin dicapai dengan didirikannya gerakan ini adalah membangun suatu Republik Indonesia sebagai bentuk tatanegara.⁵⁹ Gerakan ini secara resmi didirikan pada tanggal 28 Juli 1945, akan tetapi tidak satupun pemuda yang beraliran radikal mau masuk didalamnya.

13). BPUPKI

Ada peristiwa penting yang terjadi pada tanggal 7 September 1944 dimana saat itu Perdana Menteri Jepang Kuniaki Koiso dalam persidangannya di Parlemen Jepang (*Teikoku Gikai*) mengumumkan berdirinya Pemerintahan Kemaharajaan Jepang. Dalam putusan itu juga bahwa Hindia Timur (Indonesia) akan diberikan kemerdekaan dikelak kemudian hari. Tentunya janji ini merupakan upaya untuk menarik perhatian rakyat Indonesia untuk membantu Jepang dalam menghadapi peperangan melawan Sekutu.

Dalam kaitan inilah kemudian pada tanggal 1 Maret 1945 Saiko Shikikan mengumumkan dua hal penting yaitu: (1) Akan didirikan suatu badan yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (*Dokuritsu Zuunbi Tjosakai*), (2) Akan dilakukan pembicaraan mengenai kemerdekaan. Tindakan ini merupakan langkah konkrit yang dilakukan Perdana Menteri Kuniaki Koiso tentang

⁵⁸ *Ibid*, halaman 140-141

⁵⁹ *Ibid*, halaman 144

kemerdekaan yang kelak dikemudian hari.⁶⁰ BPUPKI ini beranggotakan 60 orang termasuk didalamnya golongan Arab, peranakan Belanda dan orang Jepang. Lembaga yang secara resmi didirikan pada 29 April 1945 dipimpin oleh dr. K.R.T. Radjiman Wediodiningrat, yang dalam perjalanan sejarahnya melakukan persidangan-persidangan sejak 28 Mei 1945 sehingga menghasilkan rumusan Dasar Negara Republik Indonesia dan rancangan Undang-Undang Dasar yang kemudian kita kenal dengan UUD 1945.

2. Gerakan yang mandiri

1). Angkatan Moeda Indonesia

Angkatan Moeda Indonesia adalah suatu organisasi pemuda yang dibentuk pada pertengahan tahun 1944 yang kemudian berkembang anti terhadap Jepang. Organisasi ini pada tanggal 16-18 Mei 1945 telah mensponsori diadakannya Kongres Pemuda seluruh Jawa yang diselenggarakan di *Villa Isola* Bandung. Kongres ini dihadiri 100 orang pemuda yang terdiri dari: utusan pemuda, pelajar dan mahasiswa seluruh Jawa.⁶¹

Dalam kongres ini para pemimpin Angkatan Moeda Indonesia menganjurkan agar para pemuda di Jawa mempersiapkan diri untuk proklamasi kemerdekaan. Dalam kongres ini dihasilkan dua keputusan

⁶⁰ Marwati Djoened Poesponegoro, Nugroho Notosusanto. *Op.Cit.* halaman 6

⁶¹ Soejono Martosewojo dkk. 1984, *Mahasiswa '45 Prapatn 10: Pengabdianmya*, Penerbit Patma, Bandung, halaman 47

yaitu: (1) Semua golongan Indonesia , terutama golongan pemuda dipersatukan dan dibulatkan dibawah satu pimpinan nasional, (2) Mempercepat pelaksanaan kemerdekaan Indonesia.⁶² Adapun tokoh-tokoh yang hadir dalam kongres tersebut ialah: Djainal Ali, Chairul Saleh, Sukarni, Anwar Tjokroaminoto, Harsono Tjokroaminoto, dan juga sejumlah mahasiswa Ika Daigaku.⁶³

Pertemuan yang bersuasana militer dan nasionalis dalam pembukaannya hanya menyanyikan lagu Indonesia Raya tanpa lagu Kimigayo, dan hanya mengibarkan bendera Merah Putih tanpa didampingi oleh bendera Jepang.⁶⁴

2). Gerakan Angkatan Baru Indonesia (Menteng 31)

Hasil kongres Angkatan Moeda Indonesia yang berlangsung tanggal 16 Mei 1945 tidak mampu memuaskan sebagian peserta yang hadir seperti Sukarni, Harsono Tjokroaminoto dan Chairul Saleh. Mereka tidak mengambil bagian dalam Angkatan Moeda Indonesia, kemudian mulai menyiapkan suatu gerakan pemuda yang lebih radikal. Dalam rangka menggalang kekuatan pemuda yang memenuhi harapan mereka, maka pada tanggal 3 Juni 1945 di Jakarta dilakukan pertemuan rahasia dengan membentuk panitia khusus yang diketuai oleh B.M.Diah dengan anggota-anggotanya: Sukarni, Sudiro, Sjarif Tayeb, Harsosno

⁶² *Ibid.* halaman 48

⁶³ Marwati Djoened Poesponegoro, Nugroho Notosusanto, *Op.Cit.* halaman 75

⁶⁴ *Asia Raya*, 24 Mei 1945, seperti dikutip Marwati Djoened Poesponegoro, Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia*, 1984, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, halaman 75

Tjokroaminoto, Wikana, Chairul Saleh, P.Gulton, Supeno dan Asmara Hadi,⁶⁵ untuk membedakan dengan Angkatan Moeda yang dibentuk Jepang. Pertemuan lanjutan kemudian dilakukan pada tanggal 15 Juni 1945 yang kemudian menghasilkan pembentukan "Gerakan Angkatan Baru Indonesia". Organisasi ini sebagian besar digerakan oleh para pemuda yang bermarkas di Menteng 31.

Gerakan Angkatan Baru Indonesia ini didirikan dengan maksud mempersiapkan dan menyediakan tenaga angkatan baru Indonesia, membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan kedaulatan rakyat dan juga memberikan pendidikan, petunjuk, pimpinan dan pengorbanan kepada rakyat dalam melaksanakan cita-citanya.⁶⁶

Angkatan Baru Indonesia beranggapan bahwa kemerdekaan harus direbut sebelum Jepang dikalahkan Sekutu. Mereka beranggapan bahwa kemerdekaan yang diserahkan sebagai hadiah bukanlah kemerdekaan yang murni. Mereka memperjuangkan "merdeka sekarang juga" dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁶⁷

Dalam perjuangannya Angkatan Baru Indonesia menempatkan diri bersebrangan dengan Jepang. Karena itu garis yang diambil adalah non koperasi. Hal ini tercermin dari tindakan pemboikotan (menentang) keikutsertaan Sukarni dan Chairul Saleh duduk dalam Badan

⁶⁵ Marwati Djoened Poesponegoro, Nugroho Notosusanto, *Lac.Cit*

⁶⁶ Diah, BM, *Op.Cit* halaman xx

⁶⁷ *Ibid.* halaman xxvi

Penyelidik (BPUPKI) yang dibentuk bersama-sama Jepang. Tindakan yang tidak mau kompromi dengan kebijakan yang dilakukan Jepang tercermin dalam peristiwa Rengasdengklok yang terjadi tanggal 16 Agustus 1945.

3). Ika Daigaku (prapatan 10)

Ika Daigaku adalah Sekolah Tinggi Kedokteran yang didirikan pada tanggal 2 April 1943 di Jakarta. Dalam sejarah tercatat bahwa peranan “dokter” sangat besar sejak Pergerakan Nasional dengan berdirinya STOVIA (*School tot Apleiding van Inlands Artsen*) di Jakarta. Soejono seorang mahasiswa NIAS (*Nederlands Indische Artsenschool*) dari Surabaya mulai merintis pendirian sekolah Kedokteran di Jakarta. Setelah mendapatkan persetujuan dari Prof. Ogira (Kepala Jawatan Kesehatan Jepang) maka dibentuk kemudian panitia pembentukan sekolah kedokteran yang peresmianya dilakukan pada tanggal 29 April 1943. Dalam menjalani pendidikan di Ika Daigaku ini, para mahasiswa diharuskan masuk asrama yang terletak di Prapatan 10, yang semula merupakan gedung *Dienst van Volksgenozondheid*.

Dalam usaha mencapai tujuan organisasi, mahasiswa diharuskan agar dapat memberikan pembinaan terhadap mahasiswa terutama dalam pemahaman disiplin. Kemudian dalam perkembangannya muncul gerakan terkordinir

dikalangan mahasiswa dalam gerakan menentang Jepang.⁶⁸ Dengan demikian asrama berfungsi sebagai tempat penggembiengan mahasiswa untuk kepentingan perjuangan jika suatu saat dibutuhkan. Suasana asrama Prapatan 10 dimana dijadikan tempat tinggal dari mahasiswa Ika Daigaku kelihatan tenang-tenang saja seperti asrama mahasiswa lainnya, padahal dari sanalah kesatuan aksi mahasiswa digerakkan.⁶⁹

Tindakan yang dilakukan sebagai pencerminan ketidakpuasan mahasiswa seperti protes terhadap makanan yang disediakan diasrama, menolak penggundulan kepala, menolak saikerei (memberi hormat dengan membungkukan badan 90 derajat kearah Tokyo), pemogokan kuliah. Kegiatan-kegiatan menentang Jepang dengan tetap waspada terhadap adanya mata-mata Jepang yang ada di asrama.

Para mahasiswa sudah mulai menyadari betapa kejamnya pemerintah Jepang oleh karena setiap saat mereka menyaksikan kekejaman melalui *Romusha* yang menimpa rakyat Indonesia. Disamping itu makanan yang tersedia di asrama kurang mencukupi kebutuhan mereka (karena dicatu) mengingat harga kebutuhan semakin mahal sedangkan iuran mahasiswa dianggap terlalu kecil (Rp.15 setiap bulan).

⁶⁸ Soejono, *Op.Cit.* halaman 12

⁶⁹ *Ibid*, halaman 13

Kesulitan hidup di asrama dan penderitaan akibat Romusha menjadi motivasi kuat sehingga menghasilkan gerakan bawah tanah dengan mengadakan kerja bakti (*konrohoshi*) di dalam dan di luar kota agar dapat berhubungan langsung dengan masyarakat sehingga dapat dilaksanakan “pembinaan nasionalisme” pada mereka. Usaha lain yang dilakukan dalam mendekati rakyat ialah melakukan kegiatan seperti penyuluhan mengenai kebersihan pekarangan rumah dan kampung. Tujuannya ialah agar dapat dekat dengan rakyat, memberikan motivasi agar bangga terhadap diri sendiri dan memperkokoh harapan akan perjuangan yang sedang dilaksanakan.

4). Pemberontakan Sukamanah (Tasikmalaya)

Peristiwa ini berlangsung mulai bulan Februari 1944, sebagai sebuah ekspresi dari para ulama dan santrinya terhadap kekejaman yang dilakukan oleh Jepang. Pemberontakan ini dipimpin oleh Kiai Zainal Mustafa yang merupakan salah satu ulama Nahdatul Ulama (NU).

Setelah partisipasinya dalam NU, terutama menjelang berakhirnya pemerintahan Belanda, Kiai Zainal Mustafa mulai menunjukkan sikap yang lebih menantang terhadap pemerintah. Hal ini tercermin dari tindakannya yang melakukan rapat-rapat gelap serta mengeluarkan pernyataan anti pemerintah.⁷⁰ Demikian juga ketika Jepang berkuasa menggantikan Belanda, sikap Kiai Zainal Mustafa tetap menentang pemerintah Jepang (dengan tidak mau bekerjasama dengan pemerintah

⁷⁰ Kurasawa, Aiko, *Op.Cit.* halaman 459

Balatentara Jepang). Pemberontakan ini lebih banyak dilatarbelakangi soal agama dari pada ekonomi. Hal ini oleh karena Kiai Zainal Mustafa tidak dapat menerima kenyataan adanya penguasa asing yang kafir.

Peristiwa pemberontakan ini bermula ketika Jepang mengirimkan tentara untuk menginterogasi Kiai Zainal Mustafa yang disinyalir oleh Jepang akan membentuk kerajaan Islam dan menyiapkan pemberontakan terhadap Jepang.⁷¹ Akibat tindakan Jepang tersebut, maka pada tanggal 25 Februari 1944 terjadilah pertempuran antara antara para ulama dan satri Pesantren Sukamanah dengan Jepang.

Akibat insiden tersebut, dilakukan penangkapan dan penahanan sehingga penjara Tasikmalaya tidak mampu menampung mereka. Sebanyak 79 orang dianggap bersalah dan dijatuhi hukuman antara 5-7 tahun penjara. Dari 79 orang, sebanyak 23 orang diadili dalam pengadilan militer di Jakarta. Kemudian dihukum mati dan dieksekusi termasuk Kiai Zainal Mustafa pada tanggal 25 Oktober 1944.

5). Pemberontakan Karangampel (Indramayu)

Kerusuhan yang dilakukan oleh petani muncul pada musim panen utama tahun 1944. Kerusuhan ini dimulai pada bulan April 1944 di desa Kapolangan dibatas timur daerah tersebut yang kemudian meluas keberbagai kawasan. Kasus yang terjadi di Indramayu ini merupakan salah satu peristiwa yang menandakan kegagalan Jepang

⁷¹ *Ibid*, halaman 160

dalam menindas kaum petani di Jawa.⁷² Mengenai terjadinya krisis di Jawa mulai 1943-1945 Sato Shigeru dalam *War Nationalism and Peasant, Java under the Japanese Occupation 1942-1945* disebutkan:

..... crisis in Java during 1943-1945 was not due to the requisition of rice by Japanese military administration, but a result of the formation of local economic blocks, breakdown in transport system, profiteering of Chinese traders and rich farmers and quarrels between the *pangreh praja* and the nationalists.⁷³ Dengan demikian pertikaian itu bukan

disebabkan oleh kebijakan pemerintah, akan tetapi lebih banyak disebabkan oleh karena kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh *pangreh praja* Indramayu seperti yang dikatakan Sato Shigeru:

The people regard the cause of these unusual event as no less than the arbitrary rule by the pangreh praja, particularly the Regent of Indramayu. The former Regent of Indramayu became the target of the people's hatred because he was a man of overweening arrogance. He did not like to associate with other officials, and did not deign to lower himself to mix with the commond people in order to become familiar with their grievances and complaints. He was very short-tempered and irascible (driftig) towards both other government officials and the people retaliated by abusing the person whom they considered to be in the wrong.⁷⁴

Kesewenang-wenangan bupati Indramayu tercermin dalam tindakannya meningkatkan kuota penyaluran beras sampai 15 kuintal per hektar sawah. Hal ini ditengarai karena adanya kolusi antar penyalur beras dengan warga keturunan Cina.⁷⁵ Terjadinya penyaluran beras secara paksa tersebut mengakibatkan kerugian rakyat lebih-lebih

⁷² Shigeru, Sato, 1966, *The Pangreh Praja in Java Under Japanese Military Rule*, BIJDAGEN, Journal of the Royal Institute of Linguistics and Anthropology, Deel 152,4e, halaman 569

⁷³ Shigeru, Sato, *War Nationalism and Peasants, Java under the Japanese Occupation*, Journal of Southeast Asian Studies, 27, 2, 1996, halaman 431

⁷⁴ Shigeru, Sato, *Op.Cit.* halaman 595

⁷⁵ *Ibid*, halaman 589

keinginan Jepang untuk meminta beras untuk konsumsi mereka sendiri, kemudian adanya larangan perdagangan beras antar keresidenan.

Akibat yang terjadi kemudian ialah harga beras resmi lebih murah dibandingkan dengan harga beras dipasaran gelap. Adanya kenaikan kuota dari petani maka persediaan bahan pangan menipis bahkan tidak cukup sehingga dalam memenuhi kebutuhan berikutnya petani harus membeli dipasaran gelap yang harganya lebih mahal. Akibat kekurangan pangan tersebut, petani banyak mati kelaparan. Penyebab lain ialah terjadinya kesalahan dalam distribusi terutama untuk daerah yang berada dipinggiran.

Reaksi terhadap kebijakan Jepang ini kemudian memicu terjadinya pemberontakan di Kaplongan, Sindang, Lohbener dan Bugis. Secara umum pemberontakan oleh para petani terjadi setelah adanya ketentuan dari pemerintah Jepang agar rakyat mengerahkan cadangan bahan pangan (padi) yang dimiliki rakyat dengan hanya menyisakan paling banyak 25 kg. Pemberontakan petani ini bersifat spontan, tidak ada dukungan organisasi, bersifat non politik dan tidak direncanakan.⁷⁶

⁷⁶ Kurasawa, Aiko, *Op.Cit.* halaman 483-486

BAB III

BIROKRASI JEPANG DAN GERAKAN POLITIK

Pada bab ini disajikan pembahasan deskripsi data pada bab III dan kaitannya dengan peran birokrasi terhadap aktivitas politik. Pembahasan dilakukan berdasarkan rumusan masalahnya yang disajikan seperti berikut.

A. Pengaruh Birokrasi Jepang terhadap Gerakan Politik

Sistem pemerintahan yang diterapkan Jepang didasarkan pada Osamu Seirei (Undang-Undang) Nomor 1 tanggal 7 Maret 1942 yang secara eksplisit menyebutkan bahwa Jepang di Indonesia melaksanakan pemerintahan militer. Implementasi dari ketentuan tersebut tercermin dalam pembagian wilayah Indonesia yang dikuasai oleh Angkatan Darat yang meliputi daerah Sumatra, Jawa, Madura, serta Angkatan Laut yang meliputi wilayah Sulawesi, Kalimantan dan Maluku. Pimpinan tertinggi pasukan Jepang di Indonesia disamping sebagai Panglima Tentara, juga sekaligus sebagai pimpinan pemerintahan militer (Saiko Shikikan), walaupun dalam melaksanakan tugas sehari-hari dibawah Kepala Staf Tentara Jepang (Gunseikan).

Pemilihan sistem birokrasi yang bersifat otoritarian tidak terlepas dari misi yang diemban oleh pasukan bala tentara Jepang

dalam ekspansinya ke arah selatan sesuai dengan yang ditetapkan dalam kesepakatan antara Angkatan Darat dengan Angkatan Laut pada tahun 1941, dimana yang bertindak sebagai pemegang pemerintahan adalah Panglima Tentara Pendudukan yang dalam hal ini Angkatan Darat. Dengan demikian diharapkan mampu memulihkan stabilitas politik dan sosial, menjaga dan mempertahankan keamanan wilayah pendudukan. Jika kondisi tersebut mampu diwujudkan tentunya dapat mempercepat penguasaan sumber-sumber vital (minyak bumi dan bahan tambang lainnya) yang dimanfaatkan untuk membangun industri Jepang serta untuk memenuhi kebutuhan perang dalam menghadapi Sekutu.

Sistem birokrasi Jepang secara umum membawa pengaruh dalam berbagai macam kehidupan masyarakat. Sebagai penerus dari regim kolonial Belanda, dalam bidang kepegawaian misalnya terdapat keinginan untuk menghilangkan ambivalensi fungsi Pangreh Praja dengan sistem birokrasi militer. Sebagai realisasi dari keinginan itu maka dikeluarkanlah kemudian Undang-Undang Nomor 27 dan Undang-Undang Nomor 28 pada tanggal 25 Agustus 1942 yang berkaitan dengan pengorganisasian pemerintahan di daerah. Dengan demikian Pangreh Praja ingin dimanfaatkan

Jepang untuk mengimplementasikan kebijakan yang digariskan oleh pemerintah.

Untuk menjamin kelancaran birokrasinya, maka Jepang mendirikan berbagai macam organisasi untuk merangkul rakyat Indonesia. Sistem militeristik (birokrasi otoriter) yang diterapkan Jepang memiliki kecenderungan melarang lahirnya gerakan politik/perlawanan, bahkan jika muncul aktivitas politik akan ditindas secara keras.

Pada masa pendudukan Jepang banyak organisasi justru dibentuk oleh pemerintah Jepang. Keberadaan organisasi buatan Jepang ini sebenarnya dimanfaatkan untuk melemahkan secara politik munculnya tokoh-tokoh yang radikal (nasionalis sekuler). Disamping itu keberadaan organisasi yang didirikan itu semata mata untuk memenuhi keinginan Jepang agar rakyat Indonesia dengan sepenuh hati memberikan bantuannya dalam menghadapi Sekutu.

Strategi lain yang dilakukan Jepang dengan mendirikan organisasi itu adalah segera mendirikan organisasi baru ketika organisasi yang telah dibentuk sebelumnya dianggap kurang efektif. Hal ini terjadi ketika Poetera dalam perkembangannya justru melahirkan kesadaran terhadap bangsa Indonesia dan mampu

menyiapkan mental mereka untuk merdeka, maka seketika itu pula Jepang mendirikan Jawa Hokokai.

Dalam hal memberikan peran rakyat secara aktif dalam bidang politik, pada masa pemerintahan Jepang dilakukan secara sentralistik dengan tiadanya kontrol dari "Dewan Perwakilan Rakyat". Secara kelembagaan Jepang membentuk badan penasihat yaitu Tjoeo Sangi In. Akan tetapi dalam prakteknya tidak memiliki kemampuan memaksa supaya nasehat yang diberikan dilaksanakan oleh pemerintah walaupun jika dilihat dari susunan keanggotaannya berasal dari berbagai daerah dan golongan seolah-olah mencerminkan "perwakilan rakyat". Dengan demikian badan ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan Volkraad yang pernah dibentuk pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1918. Organisasi politik memang dilarang pada masa pendudukan Jepang, justru yang memperoleh Badan Hukum adalah organisasi keagamaan seperti MIAI yang dalam perkembangannya menjelma menjadi Masyumi.

Pemerintah militer Jepang masih mengizinkan kehadiran organisasi yang didirikan di Surabaya pada masa Hindia Belanda oleh K.H.Mas Mansur. Semula kehadiran MIAI merupakan jawaban umat Islam terhadap kontrol politik yang dilakukan oleh pemerintahan Hindia Belanda, tetapi pada masa Jepang diberinya

hak hidup MIAI lebih banyak disebabkan dalam upaya untuk menarik simpati umat Islam. Dalam hubungan ini mula-mula Jepang membentuk bagian Pengajaran dan Agama dibawah Kolonel Horei, yang semua diharapkan dapat memberikan himbauan kepada umat Islam untuk tidak melakukan kegiatan politik. Hibauan ini ternyata membuahkan hasil, terbukti dari sikap yang diambil oleh Partai Islam Indonesia dibawah dr. Sukiman menyatakan penghentiannya dalam kegiatan politik.

Terjadinya perubahan dalam hal azas dan tujuan dari MIAI mempercepat pengakuan oleh Jepang. Perubahan yang bersifat prinsip itu mengandung makna bahwa MIAI ikut serta membangun masyarakat baru dalam rangka mencapai kemakmuran bersama di lingkungan Asia Raya dibawah pimpinan Nippon. Dengan demikian MIAI dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti memperingati hari-hari besar dan juga pembentukan baitul mal. Namun demikian Jepang tetap waspada terhadap perkembangan MIAI oleh karena bagi Jepang kehadiran organisasi semacam ini sebenarnya hanya dalam upaya menarik simpati umat Islam.

Seperti yang dijelaskan dalam bab I (D.1) bahwa sistem birokrasi dengan bermacam modelnya seperti birokrasi Orwellization mengakibatkan meningkatnya kontrol terhadap kehidupan masyarakat, Parkinsonisme mengakibatkan munculnya

penyakit proliferasi sebagai akibat dari meningkatnya jumlah pejabat. birokrasi Polity mengakibatkan dalam penentuan keputusan sepenuhnya terletak pada penguasa negara terutama para perwira militer dan pejabat birokrasi.

Birokrasi otoriter seperti yang diterapkan Jepang dalam kaitannya dengan munculnya gerakan politik, secara teoritik mengakibatkan tersingkirnya peran aktif rakyat dalam melakukan kontrol terhadap pemerintah, terjadinya penindasan terhadap warga negara, pembubaran lembaga-lembaga demokrasi serta menutup saluran-saluran yang merupakan representasi perwakilan rakyat.

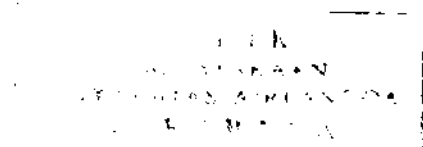
Dalam praktek politik yang terjadi pada masa pendudukan Jepang itu, sistem birokrasi otoriter yang diterapkan serta implikasinya terhadap gerakan politik menghasilkan suatu gerakan yang bervariasi yaitu terjadi polarisasi antara kelompok tua dengan kelompok muda. Bagi kelompok tua (Sukarno, Hatta), ikut berjuang dengan cara bekerja sama dengan Jepang oleh karena secara fisik (militer) dianggap lebih memberikan keuntungan mengingat kekuatan bersenjata yang kita miliki tidak sebanding dengan kekuatan Jepang. Karena itu kelompok ini ikut serta dalam organisasi yang dibentuk Jepang bahkan Sukarno menjadi ketua

Poetera, berbeda dengan garis perjuangan yang ditempuh oleh golongan muda.

Dalam perjalanan sejarahnya ternyata untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia kelompok muda ini berbeda strategi yang ditempuhnya dibandingkan kelompok tua (yang ikut dalam organisasi buatan Jepang). Perbedaan itu muncul dalam kerangka lingkup dan pola gerakan yang dilakukan. Dari aspek lingkupnya bahwa terdapat gerakan pemuda, semi militer maupun militer. Kelompok muda ini tidak mau ikut dalam gerakan semi militer maupun militer yang didirikan oleh Jepang. Mereka justru mendirikan organisasi secara "mandiri" lepas dari kepentingan pemerintah Jepang. Oleh karena itulah gerakan pemuda, pelajar dan mahasiswa ini militan dan radikal. Dengan demikian pola perjuangan yang dianut oleh gerakan yang bersifat mandiri adalah non kooperasi.

B. Munculnya Gerakan Politik yang mandiri

Gerakan politik yang mandiri dimaksudkan bahwa kehadiran organisasi tersebut semata-mata disebabkan adanya tuntutan dan kebutuhan rakyat dan tidak mendapatkan fasilitas dari pemerintah (Jepang). Seperti telah diuraikan didepan, bahwa



dalam usaha melindungi kepentingannya, Jepang mendirikan (*membidani*) berdirinya suatu organisasi.

Dalam rangka memobilisasi masyarakat khususnya untuk kepentingan perang menghadapi Sekutu, maka Jepang mendirikan beberapa organisasi yaitu Gerakan Tiga A, BPAR, Poetera, Jawa Hokokai, Tjoeo Sangi In, Seinendan, Keibodan, Barisan Pelopor, Heiho, Peta, Gerakan Rakuyat Baru, Tonarigumi, dan BPUPKI. Akan tetapi tidak semua rakyat Indonesia bersedia ikut dalam organisasi buatan Jepang tersebut, sehingga muncul gerakan bersifat mandiri seperti Angkatan Muda Indonesia, Gerakan Angkatan Baru Indonesia, Ika Daigaku, pemberontakan Sukamanah dan pemberontakan Karangampel. Gerakan politik yang mandiri tersebut dipelopori oleh para pemuda, pelajar, mahasiswa yang khususnya yang bermarkas di Menteng 31 dan Prapatan 10. Disamping itu terdapat juga gerakan petani seperti yang terjadi di Sukamanah dan Karangampel.

Berdasarkan data yang dapat dikumpulkan (diuraikan dalam Bab III) bahwa munculnya gerakan yang mandiri disebabkan dilatar belakangi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

- 1). Adanya keinginan para pemuda, pelajar, mahasiswa dan para petani untuk berhimpun dibawah satu pimpinan nasional tanpa campur tangan Jepang. Hal ini karena mereka menyadari bahwa

banyaknya organisasi yang selama ini didirikan Jepang semata-mata untuk memenuhi kepentingannya dalam perang melawan Sekutu.

- 2). Terjadinya diskriminasi terhadap orang Indonesia seperti harus memberi hormat dengan membungkukkan badan 90 derajat menghadap Tokyo dianggap sebagai suatu penghinaan. Hal yang sama juga terjadi pada para anggota Peta, yang tidak diperbolehkan mereka mengambil cuti.
- 3). Kekejaman yang dilakukan Jepang dianggap telah melampaui batas kemanusiaan yang tercermin dalam pengerahan Romusha dan mengadakan catu bahan pangan.
- 4). Adanya sentimen agama oleh karena para kiai seperti yang terjadi di Pondok Pesantren Indramayu tidak ingin negaranya dipimpin oleh orang-orang kafir.
- 5). Terjadinya kesewenang-wenangan dari para Pangreh Praja terhadap rakyat Indonesia terutama dalam pengaturan penyaluran beras sehingga rakyat sangat dirugikan.

C. Taktik dan strategi perjuangan Gerakan Politik

Dalam bagian pendahuluan telah dijelaskan bahwa aktivitas politik dapat berupa dukungan terhadap kebijakan pemerintah dalam hal ini pemerintahan Balatentara Jepang, atau juga dapat

berupa perlawanan. Secara etimologis taktik adalah suatu aktivitas/kegiatan yang ditempuh dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Taktik perjuangan dapat diartikan sebagai suatu aktivitas/kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai suatu tujuan. Aktivitas itu dapat berupa organisasi, diplomasi, maupun perjuangan fisik atau bersenjata (perang frontal atau gerilya). Sedangkan strategi memuat beberapa pola umum kegiatan dalam upaya mengoperasionalkan suatu program. Dalam suatu perjuangan strategi dapat dilakukan dengan cara bekerja sama atau tidak bekerja sama (Co atau Non Co). Istilah-istilah tersebut (taktik maupun strategi) banyak dikaitkan dengan aktivitas politik maupun militer. Dalam kaitannya dengan taktik maupun strategi perjuangan yang dilakukan pada masa Jepang, dapat digambarkan berdasarkan seperti berikut.

Pada masa penjajahan Belanda terdapat banyak partai politik yang didirikan oleh para tokoh pergerakan nasional, akan tetapi pada masa pendudukan Jepang partai politik dilarang melakukan aktivitas. Hal ini tercermin dari dikeluarkannya peraturan Pemerintah Militer pada tanggal 20 Maret 1942 yang memuat ketentuan bahwa setiap bentuk diskusi, gerakan-gerakan, saran-saran, atau propaganda yang berkaitan dengan pemerintahan dan struktur negara dilarang. Disamping itu terdapat

juga aturan lainnya yang berkaitan dengan pengibaran bendera selain bendera Jepang (Hinomaru). Dilain pihak Jepang justru mendirikan berbagai macam organisasi dimana diharapkan rakyat Indonesia ikut didalamnya. Dilihat dari aspek kegiatannya, organisasi yang didirikan itu ada yang bersifat sosial, ekonomi dan budaya dan pendidikan, seni militer dan militer. Organisasi yang dibidani oleh Jepang ini diharapkan dapat memberikan dukungan terhadap kebijakan Jepang sehingga bersifat kooperasi dan moderat. Perjuangan yang bersifat moderat ini dipelopori oleh golongan tua seperti Ir. Sukarno dan Mohammad Hatta.

Dilain pihak muncul kelompok radikal yang dalam perjuangannya tidak mau bekerja sama dengan pemerintah Jepang. Kelompok ini dalam perjuangannya tidak jarang dilakukan melalui gerakan bawah tanah. Gerakan yang dilakukan sudah dalam bentuk organisasi modern kearah perbaikan hidup untuk bangsa Indonesia.¹ Dengan demikian gerakan yang dilakukan dalam menghadapi Jepang dapat organisasi politik dan juga gerakan bersifat fisik (pemberontakan bersenjata). Bagi mereka strategi yang dilakukan baik dengan ikut bekerja sama dengan Jepang (kooperasi), maupun yang tidak mau bekerja sama (non

¹ Pringgodigdo, A.K. 1980, *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*, Penerbit Dian Rakyat, Jakarta, halaman viii.

kooperasi), hanyalah sebuah taktik perjuangan dan bukan prinsip, karena tujuan yang ingin dicapai sama-sama menginginkan kemerdekaan walaupun jalan yang harus dilalui berbeda/berseberangan bahkan konfrontasi antara satu dengan yang lainnya. Hal ini nampak ketika terjadi peristiwa Rengas dengkok dimana ketika itu terdapat perbedaan taktik perjuangan dalam mencapai kemerdekaan antara golongan muda dengan golongan tua.

Dalam praktek politik, perjuangan itu pada dasarnya dapat dilakukan dengan cara bekerja sama dengan pemerintah yang berupa partisipasi politik (jika memang hak rakyat memiliki kesetaraan antara penjajah dengan yang dijajah karena ada pengakuan dari penjajah terhadap hak-hak rakyat) atau dengan cara berjuang dengan mengambil sikap konfrontasi. Dalam hal ini peranan intelektual amat besar, oleh karena itu dalam memperjuangkan hak hidup bangsa mereka memberikan indoktrinasi kepada rakyat walaupun secara sembunyi-sembunyi (mengingat tidak mungkin melaksanakan perjuangan bersenjata karena kondisi obyektif yang dimiliki tidak mendukungnya). Dalam hal ini para intelektual sudah memfungsikan dirinya sebagai organisir hegemoni seperti apa yang dikatakan oleh Gramsci, khususnya dalam melaksanakan fungsi hegemoni sosial.

D. Kontrol Jepang terhadap Gerakan Politik

Suasana penjajahan menempatkan pemerintah dan rakyat dalam posisi yang tidak sederajat (equal). Oleh karena sistem pemerintahan yang otoriter tentu terdapat peluang yang sangat besar bagi pemerintah untuk melakukan pengawasan khususnya terhadap gerakan politik.

Dari data yang ditemukan nampak bahwa pada masa penjajahan Belanda terdapat perangkat Hukum yang dapat menjerat siapa saja yang dianggap melanggar ketertiban umum dengan menerapkan pasal-pasal karet (RR pasal 111), *Muilkorf Circulaire*, *Exorbitante Rechten* dan juga terdapat lembaga yang mengawasi aktivitas politik yaitu PID (*Politiek Inlichtingen Dienst*). Disamping itu dibentuk juga lembaga yang diharapkan sebagai tempat untuk memudahkan melakukan kontrol seperti *Volkraad*.

Pada masa pendudukan Jepang dalam upaya melakukan pengawasan terhadap gerakan politik dilakukan dengan dua cara yaitu:

1). Pembentukan lembaga kontrol

Seperti dijelaskan didepan, Jepang ikut serta menjadi sponsor berdirinya banyak organisasi kepemudaan, semi militer dan juga organisasi militer. Melalui organisasi yang didirikan itu

diharapkan rakyat ikut serta berhimpun didalamnya. Dalam kondisi terkooptasi tentunya organisasi tersebut semata-mata untuk membantu Jepang khususnya dalam perang melawan Sekutu. Oleh karena itu tidak banyak dapat diharapkan untuk kepentingan rakyat Indonesia. Kalaupun mereka ikut didalamnya selain karena agar tidak dicurigai Jepang, juga untuk mencari penghasilan (gaji). Lembaga lain yang sengaja dibentuk dalam upaya melakukan kontrol terhadap aktivitas politik rakyat adalah Tonari Gumi dan Kumiai. Tonari Gumi bertindak sebagai sarana efektif dalam melakukan kontrol melalui propaganda yang disampaikan kepada rakyat. Mereka meyakinkan rakyat bahwa Tonari Gumi memiliki landasan semangat gotong royong dimana rakyat Jawa telah lama melakukannya. Dalam kenyataannya Tonari Gumi memiliki fungsi menjalankan kebijakan yang digariskan oleh pemerintah Jepang seperti membantu keamanan, membantu penyerahan padi pada pemerintah, dan distribusi catu barang khususnya bahan pangan. Fungsi-fungsi tersebut sekaligus merupakan pengawasan terhadap aktivitas politik rakyat. Selain Tonari Gumi, dalam upaya mengendalikan perekonomian dibentuklah lembaga yang disebut Kumiai semacam "Koperasi". Tugas yang dibebankan pada lembaga ini adalah mengedalikan struktur perekonomian pada masa perang dengan dalih dalam

rangka menyusun ekonomi rakyat secara gotong royong. Tujuan sebenarnya tidak lain adalah melakukan kontrol terhadap perekonomian rakyat dan juga para para pedagang Cina.

2). Memanfaatkan Pangreh Praja

Pada masa penjajahan Belanda dimana salah satu cirinya adalah adanya pemerintahan yang dilaksanakan secara tidak langsung (Indirect Rule). Dalam hal ini pangreh praja (Inlandsch Bestuur) memiliki peran yang sangat besar. Munculnya Cultuur Procenten pada masa pemerintahan kolonial Belanda merupakan keuntungan yang didapat oleh para pangreh praja.

Pada masa pendudukan Jepang pangreh praja masih merupakan kelompok yang banyak membawa kesengsaraan pada rakyat Indonesia. Munculnya pemberontakan petani seperti yang terjadi di Sukamanah dan Karangampel justru dipicu oleh adanya sikap dan perilaku pangreh praja. Mereka juga mengemban tugas sebagai propagandis dan ikut memobilisasi masa agar mau masuk Jawa Hokokai. Disamping itu mereka juga memberikan pelatihan politik dan moral pada masyarakat dengan berorientasi pada kepentingan Jepang. Pangreh Praja ini sebenarnya dihadapkan pada sikap yang ambivalen karena disatu pihak sebagai pimpinan non formal masyarakat, akan tetapi dipihak lain dia menerima gaji dari pemerintah Jepang. Walaupun demikian pada kenyataannya

tugas-tugas pangreh praja ini dimanfaatkan oleh Jepang untuk mencapai tujuannya dengan mengorbankan kepentingan rakyat Indonesia.

Secara teoritis apa yang dilakukan oleh Jepang sebenarnya telah memenuhi konsep “Stelsel Kolonial” yang dikemukakan oleh Raymond Kennedy seperti terjadinya diskriminasi dalam berbagai aspek (sosial, ekonomi, politik), terjadinya subordinasi ekonomi, kurangnya perhatian terhadap pendidikan, segregasi sosial serta pengawasan politik melalui instrumen yang dibentuk oleh Jepang.

BAB IV

BIROKRASI DAN AKTIVITAS POLITIK

Pada bab ini disajikan suatu analisis secara teoritis terhadap sistem birokrasi yang diterapkan Jepang . Analisis teoritis ini berangkat dari sub-sub bab pada Bab IV yang telah mengacu pada permasalahan pokok kajian tesis ini yang meliputi sistem birokrasi Jepang yang otoriter, munculnya gerakan politik yang mandiri, taktik dan strategi (siasat) gerakan politik serta kontrol terhadap gerakan politik tersebut. Untuk memahami analisis data secara teoritis kajian ini berangkat dari teori struktural. Hal ini karena unit analisisnya adalah struktur dalam hal ini negara/regim khususnya pada masa pendudukan Jepang 1942-1945. Negara sebagai persetambahan yang bertindak lewat hukum yang direalisasikan oleh suatu pemerintahan/regim yang dilengkapai dengan kekuasaan memaksa¹ dalam bentuk regim "*Bureaucratic Authoritarian State*" yang merupakan sebuah gejala sistem politik spesifik sebagai salah satu respon terhadap suatu proses deepening (perluasan) dari terjadinya industrialisasi dan pembangunan ekonomi negara-negara kapitalis pinggiran.² Jepang

¹ Iver, Mac, 1980, *Negara modern*, Penerbit Aksara, Jakarta, halaman 28.

² Muhamad A.S. Hikam, 1991, *Negara Otoriter Birokratik dan Demokratisasi*, Jurnal Ilmu Politik Nomor 8, halaman 68

sebagai negara yang mulai dengan proses industrinya dan memunculkan difernsiasi peran-peran dan fungsi-fungsi yang dapat melahirkan/menerapkan birokrasi otoriter.

Secara teoritis Guillermo O'Donnell memberikan beberapa ciri yang dimiliki oleh suatu pemerintahan birokrasi-otoriter yaitu:

- (1) Negara menjamin dan mengorganisasi dominasi yang dilaksanakan melalui struktur kelas yang tunduk dibawah struktur yang lebih tinggi yaitu kaum borjuis yang sangat oligopolis dan transnasional.
- (2) Terdapat organisasi-organisasi yang memberikan peranan yang menentukan baik bagi struktur yang menggunakan sarana pemaksa maupun bagi mereka yang berusaha untuk mencapai normalisasi ekonomi.
- (3) Sistem eksklusif politik dari sektor rakyat yang sebelumnya dibiarkan berperan aktif, secara politik disingkirkan dan dikontrol secara ketat untuk meniadakan peranannya dalam arena politik nasional. Penyingkiran secara politik ini dapat dilakukan dengan cara menghancurkan organisasi kelas dan gerakan politik, kemudian memaksakan tata tertib tertentu dalam upaya memperkokoh domonasi regim birokrasi-otoriter.

- (4) Penindasan terhadap warga negara seperti pembubaran lembaga-lembaga demokrasi politik. Penindasan terhadap peranan kelembagaan dan saluran untuk menjangkau demokrasi politik terutama diarahkan untuk menghapus peranan organisasi politik (termasuk partai politik) yang berfungsi sebagai saluran untuk memperoleh keadilan.
- (5) Suatu sistem yang tidak mengikutsertakan sektor rakyat dalam perekonomian dengan maksud untuk mendorong pola akumulasi modal, sehingga menghasilkan ketimpangan distribusi sumber-sumber masyarakat semakin tajam.
- (6) Transnasionalisasi struktur produksi, sehingga masyarakat mengalami denasionalisasi.
- (7) Melalui lembaga-lembaga regim ini berusaha mendepolitisasi masalah-masalah sosial. Depolitisasi melingkupi larangan untuk menuntut keadilan karena tuntutan itu selalu dinilai mengganggu ketertiban dan normalisasi ekonomi.
- (8) Menutup saluran-saluran yang mewakili kepentingan rakyat dan kelas, menutup saluran demokrasi menuju

pemerintahan. Sedangkan akses kekuasaan pemerintahan hanyalah terbatas bagi mereka yang berada pada puncak organisasi besar terutama Angkatan Bersenjata dperusahaan oligopolistik besar.

Negara/regim juga mamaksakan kehendak melalui pendekatan yang sangat teknokratis, kecenderungan ini merupakan salah satu identifikasi terhadap "Bureaucratic Authoritarian State"³

Karakteristik Bureaucratic Authoritarian State yang dikemukakan oleh Guillermo O'Donnell maupun pandangan Samsudin Haris diatas itu adalah semata-mata dalam kaitannya dengan tataran teoritis secara universal. Sebagai suatu teori yang universal tersebut dalam penerapannya khususnya terhadap sistem pemerintahan Jepang di Indonesia ternyata **tidak seluruh** karakteristik tersebut relevan (ada yang relevan dan ada yang tidak).

Aspek-aspek yang tidak relevan dengan teori Guillermo O'Donnell dari data yang ada pada masa pendudukan Jepang adalah tidak terjadinya struktur kelas dan juga trannasionalisasi struktur produksi. Sedangkan aspek-aspek yang relevan dengan

³ Samsudin Haris, 1997, *Pembinaan Politik, Demokrasi dan Pembentukan Civil Society: Problematik Kepartaian Indonesia di bawah Orde Baru*, Jurnal Ilmu Politik Nomor 17, Penerbit Balai Pustaka Utama Jakarta, halaman 60.

teori yang dikemukakan Guillermo O'Donnell adalah terdapatnya organisasi-organisasi yang memberikan peranan yang menentukan dengan menggunakan sarana pemaksa, adanya kontrol ketat terhadap peran politik rakyat, pembubaran lembaga-lembaga demokrasi, penindasan terhadap lembaga-lembaga dan saluran yang menjangkau demokrasi politik, tidak mengikut sertakan sektor rakyat dalam perekonomian melainkan sektor ekonomi rakyat justru dieksploitir demi kepentingan perang, depolitisasi masalah-masalah sosial serta menutup saluran demokrasi.

Dari uraian diatas itu secara teoritis dapat dikatakan bahwa terdapat keterbatasan dalam kaitannya dengan relevansi penerapan teori birokrasi otoriter dalam pengkajian terhadap masa pendudukan Jepang di Indonesia. Walaupun demikian pada dasarnya karakteristik birokrasi otoriter seperti yang dikemukakan Guillermo O'Donnell diatas masih dapat dijadikan pijakan analisis mengingat karakteristik yang lainnya masih relevan karena praktek birokrasi yang otoriter terjadi pada masa itu. Hal ini tercermin dari paparan data berikut yang memberikan gambaran akan relevansi teori Guillermo O'Donnell.

Dari aspek strukturnya, secara normatif regim militer Jepang menyusun pemerintahannya atas dasar Undang-Undang Nomor 1, tanggal 7 Maret 1942. Secara eksplisit disebutkan bahwa "Bala

Tentara Nippon melangsungkan pemerintahan militer". Sebagai kepala pemerintahan dipegang oleh Panglima Tentara (Gunshireikan), kemudian dalam prakteknya dilaksanakan oleh Panglima Tertinggi Tentara Jepang (Gunseikan), dibawahnya kemudian terdapat Gunseibu yang merupakan kordinater pemerintahan militer.

Dalam praktek pemerintahan, bahwa kebijakan dilaksanakan dengan sistem pemerintahan tunggal (tanpa Dewan Perwakilan Rakyat) menjadikan pemerintahan bersifat otoriter. Tidak diberikannya Badan Hukum terhadap pendirian organisasi (partai politik) merupakan suatu penindasan terhadap saluran demokrasi dan aktivitas politik. Disamping itu sistem ini akan menciptakan persoalan-persoalan baru dari pada mengatasinya seperti terjadinya pembatasan terhadap arus informasi dari masyarakat ke regim. Akibatnya muncul kemudian gerakan "bawah tanah" seperti yang dilakukan oleh para pemuda yang bermarkas di Menteng 31 maupun di Prapatan 10. Apa yang dilakukan pemerintah pendudukan Jepang merupakan pencerminan dari adanya upaya menyingkirkan kontrol terhadap pemerintah dalam politik nasional dan juga peniadaan lembaga-lembaga demokrasi. Ketidak ikutsertaan sektor rakyat dalam pengambilan keputusan tersebut dilakukan dengan cara menutup saluran demokrasi. Jika

dibandingkan dengan masa Hindia Belanda bahwa sektor rakyat masih mendapatkan tempat (walaupun sekedar artifisial) seperti dalam Volkraad, Radical Concentratie, sedangkan pada masa Jepang hal ini tidak terjadi. Kalaupun pada waktu itu ada Tjoeo Sangi In, hanyalah berfungsi sebagai badan penasehat yang memiliki posisi tawar menawar yang sangat lemah mengingat Keanggotaannya ditunjuk oleh Jepang.

Dengan tiadanya kesejajaran posisi rakyat dengan pemerintah (karena dalam suasana penjajahan), terjadi pula kesewenang-wenangan dari Pangreh Praja terhadap rakyat terutama dalam hal pengaturan sistem perekonomian (penyaluran/catu beras) yang amat merugikan kepentingan rakyat.

Pengaruh sistem birokrasi Jepang terhadap gerakan politik dimaksudkan bahwa dalam prakteknya birokrasi memberikan warna terhadap lingkup maupun pola gerakan politik yang ada. Dilihat dari aspek lingkungannya, gerakan yang ada meliputi bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan militer. Sedangkan dari pola yang dikembangkan gerakan saat itu adalah kooperasi dan non kooperasi artinya ada gerakan yang memberi dukungan terhadap Jepang ada juga yang melakukan perlawanan. Strategi Co maupun non Co yang dilaksanakan merupakan upaya mensiasati perjuangan oleh karena ketatnya pengawasan politik yang

dilakukan Jepang. Birokrasi otoriter yang diterapkan Jepang memberikan pengaruh baik terhadap lingkungannya maupun terhadap pola gerakan yang ada. Dari aspek lingkungannya ada dorongan terhadap gerakan yang bersifat sosial dan budaya oleh Jepang. Hal ini tercermin dari diijinkannya berdirinya Majelis Islamiah Ala Indonesia (MAI).

Gerakan yang bersifat politik mendapat pengawasan melalui instrumen yang diciptakan sendiri oleh Jepang. Berdirinya Tonari Gumi pada tanggal 29 April 1943 merupakan salah satu instrumen Jepang dalam rangka mengendalikan aktivitas politik rakyat.

Dari aspek pola perjuangannya, oleh karena pengawasan politik begitu ketat, jika terjadi pelanggaran akan mendapatkan hukuman yang amat berat dari Tentara Kompetai suatu lembaga militer yang melakukan tindakan hukum tanpa melalui proses pengadilan. Disamping itu kerja paksa masa Jepang (Romusha) merupakan upaya untuk melemahkan gerakan politik rakyat. Dengan adanya pengawasan politik yang ketat itu maka muncul kemudian gerakan yang bersifat radikal yang diprakarsai oleh pemuda, pelajar, mahasiswa, yang bermarkas di Menteng 31 maupun Prapatan 10 dan juga gerakan para petani sehingga terjadi pemberontakan di Sukamanah dan Karangampel.

Secara teoritis dengan sistem birokrasi otoriter akan melahirkan fenomena terjadinya dominasi struktur kelas. Hal ini nampak dari para pejabat yang memegang kendali pemerintahan masih didominasi oleh orang Jepang. Dalam melaksanakan pemaksaan terhadap rakyat, dibentuklah organisasi sebagai sarannya seperti organisasi kepemudaan, semi militer dan militer. Kontrol yang ketat terhadap aktivitas politik rakyat juga dilakukan oleh birokrasi khususnya para pangreh praja sebagai aparat birokrasi pemerintah.

Dengan demikian bahwa pengaruh yang ditimbulkan oleh sistem birokrasi otoritar Jepang di Indonesia sejalan dengan prinsip yang melandasi ciri-ciri yang melekat pada sistem birokrasi otoritas terutama yang dikemukakan oleh Guillermo O'Donnell.

Walaupun demikian, dalam suasana kekuasaan yang otoriter ternyata dapat juga muncul gerakan perlawanan yang merupakan sarana aktivitas politik rakyat. Secara teoritis munculnya suatu gerakan khususnya gerakan politik. Petrus Blumberger dalam bukunya "*De Nationalistische Beweging in Nederlands Indie*:" menyebutkan bahwa gerakan itu adalah suatu kelompok yang dalam perjuangannya tidak mengutamakan kepentingan penguasa tetapi melakukan bantahan atau suatu tindakan pemberontakan

pada yang berkuasa.⁴ Munculnya suatu gerakan Arnold Toynbee dalam bukunya "The Western Question in Greece and Turkey" seperti yang dikutip oleh Mohammad Hatta menyatakan: bahwa gerakan itu adalah: "*all corporate minority is started by individual and carried on mainly by an active minority, while the mass follows behind*".⁵ Bahwa suatu gerakan pada mulanya berasal dari kegiatan beberapa orang dan dialami hanya oleh sebagian rakyat kecil yang aktif sedangkan orang banyak mengikuti dibelakangnya. Kutipan diatas itu memiliki kesamaan dengan apa yang terjadi pada masa pendudukan Jepang, dimana gerakan itu semula dilakukan hanya oleh sekelompok orang seperti pemuda, mahasiswa dan juga petani, akan tetapi dalam perkembangannya menjadi suatu gerakan yang menentang kebijakan pemerintah seperti yang dikatakan Petrus Blumberger khususnya yang dimotori oleh kaum cendekiawan/intelektual.

Menurut Lewis Coser dalam bukunya "Men of Ideas" sebagaimana yang dikutip oleh Aswab Mahasin, cendekiawan adalah orang-orang yang kelihatannya tidak pernah puas menerima kenyataan sebagaimana adanya. Mereka memper-

⁴ Koch, D.M.G, 1951, *OM DE VRIJHEID, De Nationalistische Beweging in Indonesie*, Jajasan Pembangunan, Vorkink Bandung, halaman 6-7

⁵ Hatta, Mohammad, 1976, *Kumpulan Karangan*, Jilid I, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta, halaman 64.

tanyakan kebenaran yang berlaku pada suatu saat, dalam hubungannya dengan kebenaran yang lebih tinggi dan lebih luas.⁶ Munculnya cendekiawan dalam bidang politik disebabkan oleh karena adanya affinitas yang khas antara orientasi intelektual modern dengan praktek politik revolusioner atau praktek politik yang konstitusional. Tugas yang harus diemban oleh cendekiawan adalah memperjuangkan hak hidup bangsa sampai pada taraf mengajarkan ide kebangsaan yang sebenarnya.⁷ Pada masa Jepang para intelektual Indonesia dalam kaitan ini memberikan indoktrinasi kepada rakyat walaupun secara sembunyi-sembunyi seperti melalui usaha bekerja bakti (*konrohoshi*) di dalam maupun diluar kota agar dapat berhubungan langsung dengan masyarakat sehingga dapat dilaksanakan pembinaan nasionalisme pada mereka. Usaha lain yang dilakukan ialah mengadakan penyuluhan mengenai kebersihan pekarangan rumah dan kampung. Tujuan yang ingin dicapai adalah agar dekat dengan rakyat sambil memberikan motivasi agar bangga terhadap diri sendiri dan memperkokoh harapan akan perjuangan yang sedang dilaksanakan.

⁶ Aswab Mahasin, 1983, *Cendekiawan dan Politik*, Penerbit LP3ES Jakarta, halaman 144.

⁷ *Ibid*, halaman 329.

Kaum intelektual mampu bertindak sebagai organisir hegemoni oleh karena mereka merupakan "deputi" dari kelompok dominan yang menjalankan fungsi khusus dari hegemoni sosial dan pemerintah sosial, baik mereka yang berasal dari intelektual tradisional maupun organik.⁸

Berdasarkan data yang ada bahwa ada dua cara/model terbentuknya gerakan pada masa Jepang. Pertama adalah organisasi yang dibidani oleh Jepang (walaupun dalam perkembangannya ada yang menguntungkan rakyat Indonesia karena melakukan perlawanan terhadap Jepang). Gerakan ini adalah: Gerakan Tiga A, Barisan Pemuda Asia Raya, Poesat Tenaga Rakyat, Jawa Hokokai, Tjoeo Sangi In, Seinendan, Keibodan, Barisan Pelopor, Heiho, Tonari Gumi, Pembela Tanah Air, Gerakan Rakyat Baru dan BPUPKI. Sedangkan organisasi yang bersif mandiri (tanpa bantuan Jepang) adalah: Angkatan Moeda Indonesia, Gerakan Angkatan Baru Indonesia, Ika Daigaku, Pemberontakan Sukamanah dan Pemberontakan Karangampel.

Data yang ditemukan mengenai bagaimana sikap organisasi ini terhadap Jepang ternyata organisasi yang dibentuk Jepang

⁸ Nezar Patria dan Andi Arief, 1999, *Antonio Gramsci, Negara dan Hegemoni*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, halaman 155. Roger Simon, 1999, *Gagasan Politik Gramsci*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, halaman 139-152.

seperti Poetera dan Peta lebih banyak menguntungkan perjuangan rakyat bahkan mengadakan pemberontakan terhadap Jepang seperti yang terjadi dalam Pemberontakan Peta di Blitar. Sedangkan gerakan yang didirikan secara mandiri dalam perjuangannya selalu melakukan perlawanan terhadap Jepang, khususnya melalui diplomasi (tidak dengan cara kekerasan senjata). Di pihak lain gerakan petani dalam melaksanakan aksinya melalui jalan konfrontasi melalui kekerasan senjata. Hal ini nampak dari apa yang dilakukan oleh para petani di Sukamanah dan Karangampel.

Dengan demikian pendirian suatu gerakan pada masa Jepang, ternyata organisasi yang didirikan Jepang juga mampu menjelma menjadi gerakan politik oleh karena dalam perjalannya mampu membangkitkan semangat kebangsaan, sehingga gerakan ini justru merugikan Jepang. Sedangkan gerakan yang bersifat mandiri dari data yang ada ternyata memang menjelma menjadi gerakan politik seperti yang dikatakan Petrus Blumberger bahwa dalam aksinya melakukan perlawanan terhadap pemerintah dalam hal ini Regim Militer Jepang dilakukan baik melalui perjuangan diplomasi maupun dengan kekerasan senjata.

Kehadiran suatu gerakan pada kondisi penjajahan memiliki keterbatasan dalam bergerak, hal ini tidak lepas dari pengawasan yang dilakukan oleh regim saat itu. Dalam hubungannya dengan

pengawasan politik yang dilakukan oleh penjajah, Raymond Kennedy, yang seorang Antropolog Amerika dalam penelitiannya di Indonesia salah satu temuannya menyebutkan bahwa "*Stelsel Kolonial*" telah lama terjadi di Indonesia yang ciri-ciri umumnya adalah: (1) Adanya pembagian atas warna kulit yang dapat meliputi bidang sosial, politik dan ekonomi, (2) Subordinasi ekonomi, (3) Kurangnya perhatian terhadap pendidikan, (4) Segregasi sosial, (5) Pengawasan Politik oleh yang berkuasa.⁹

Sifat penting administrasi pada masa kolonial adalah besarnya kekuasaan birokrasi. Pemerintah merupakan satu-satunya yang memberi pekerjaan. Monopoli kegiatan oleh pemerintah mengakibatkan ketergantungan pada birokrasi dalam segala hal. Disamping itu terdapat juga sifat elitis dari para administrator.¹⁰

Dalam melakukan kontrol terhadap gerakan politik, Jepang menciptakan sarana pemaksa dengan membentuk lembaga-lembaga kontrol seperti Romusha, Tonari Gumi, Pangreh Praja sebagai perpanjangan tangan otoritas kekuasaannya. Berdasarkan data yang ada, dapat memberikan gambaran bahwa sistem

⁹ Dekker, 1975, *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia*, Lembaga Penerbitan "ALMAMATER" YPTP, IKIP Malang, halaman 9-11.

¹⁰ Weiner, Myron, 1966, *Modernization, The Dynamics of Growth*, Voice of Vorim Lecture, halaman 118.

pemerintahan yang diterapkan Jepang di Indonesia adalah Birokrasi-Otoriter.

BAB V**KESIMPULAN DAN IMPLIKASINYA****A. Kesimpulan**

Pada bab ini berisi tentang jawaban terhadap permasalahan. Berdasarkan hasil pembahasan pada BAB V maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaruh sistem birokrasi Jepang yang otoriter terhadap gerakan politik, bahwa pada masa penjajahan Jepang tidak satupun partai politik diperkenankan untuk hidup. Untuk memberikan tempat berorganisasi, maka pemerintah Jepang mendirikan berbagai macam organisasi: baik kepemudaan, semi militer maupun militer. Ketika organisasi yang dibentuk Jepang dianggap kurang efektif (karena membangkitkan kesadaran nasional) maka dibentuk organisasi penggantinya. Hal ini nampak ketika Poetera justru membangkitkan semangat nasionalis maka segera Jepang membentuk Jawa Hokokai. Larangan terhadap pendirian partai politik justru memunculkan gerakan yang bersifat radikal yang diprakarsai oleh pemuda, pelajar dan mahasiswa. Gerakan yang dilakukan organisasi yang radikal amat dirahasiakan aktivitasnya sehingga

cenderung bergerak dibawah tanah. Hal ini mengingat kekejaman tentara Kempetai Jepang yang tidak segan-segan melakukan penyiksaan.

2. Munculnya gerakan yang bersifat mandiri dalam struktur birokrasi yang otoriter disebabkan karena organisasi yang dibentuk Jepang oleh para pemuda, pelajar dan mahasiswa dianggap tidak militan, dan dirasa kurang memperjuangkan kepentingan rakyat melainkan hanya menjadi tempat sekelompok orang untuk mencari nafkah. Walaupun organisasi yang mereka dirikan tidak memiliki "Badan Hukum" mereka tetap melakukan aktivitas terutama mendekati rakyat melalui program kerja bakti. Oleh karena itu gerakan politik yang mandiri tetap dapat mengambil peran sampai Indonesia diproklamakan tanggal 17 Agustus 1945, bahkan mampu mempercepat proses proklamasi setelah terjadinya peristiwa Rengasdengklok 16 Agustus 1945, yang ketika itu kelompok muda banyak mengambil prakarsa.
3. Taktik dan strategi perjuangan gerakan politik dalam sistem birokrasi otoriter pada masa pendudukan Jepang dapat dikelompokkan dalam dua macam. Pertama adalah mereka yang melakukan gerakan lewat organisasi yang dibentuk Jepang. Kelompok ini dapat digolongkan sebagai kelompok moderat

(kooperasi). Walaupun organisasi dimana mereka ikut serta dibikin oleh Jepang, akan tetapi dalam prakteknya mampu menghasilkan suatu kesadaran sebagai bangsa. Disamping itu melalui organisasi dimana mereka bernaung, ternyata juga mampu melatih disiplin dan keterampilan kemiliteran sehingga dalam perkembangan TNI tidak terlepas dari tentara PETA pada masa Jepang. Kelompok ke dua adalah mereka yang memang melakukan gerakan dalam organisasi yang mereka dirikan sendiri seperti Angkatan Moeda Indonesia, Gerakan Angkatan Baru Indonesia dan Ika Daigaku. Adapun taktik perjuangan yang ditempuh secara radikal dan tidak mau bekerja sama dengan Jepang. Oleh karena itu tidak jarang mereka harus melakukan gerakan bawah tanah baik melalui organisasi ataupun bergabung dengan rakyat (petani) sehingga melahirkan pemberontakan Sukamanah dan Karangampel.

4. Dalam hal bagaimana pemerintah Jepang mengontrol gerakan politik, hal ini dilakukan melalui dua cara. Pertama pembentukan lembaga-lembaga kontrol dan kedua memanfaatkan para pangreh praja. Lembaga yang dibentuk yang bersifat semi militer maupun militer, Tonari Gumi dan Kumiai. Organisasi ini memiliki tugas mengontrol aktivitas masyarakat dengan harapan mereka mau disalurkan pada organisasi yang

dibentuk Jepang. Sedangkan para pangreh praja sebagai tangan pemerintah mengembar tugas sebagai propagandis dan memberikan latihan moral maupun politik yang berorientasi pada kepentingan Jepang. Oleh karena itu tidaklah mengherankan bahwa munculnya pemberontakan petani di Sikamanah dan Karangampel banyak disebabkan akibat keangkuhan para pangreh praja.

B. Implikasi Teoritis

Pada bagian ini dibahas mengenai apakah makna temuan pada kesimpulan diatas terhadap temuan lain, khususnya mengenai masa pendudukan Jepang dan juga implikasi teoritis terhadap relevansinya analisis birokrasi otoriter dari Guillermo O'Donnell.

Seperti yang dipaparkan dalam latar belakang masalah, bahwa pada masa pendudukan Jepang terdapat beberapa ahli yang mencoba melakukan kajian seperti: Sato Shigeru (Pangreh Praja di Jawa), H.J.Benda (The Crescent and the Rising Sun), Aiko Kurasawa (Mobilitas dan Kontrol), Syaifullah (Muhamadiyah dan Islam di Indonesia), Soepomo (Reformasi Peradilan), M.T.Kahin (Nationalism and Revolution in Indonesia), Benedict Anderson (Peran

Pelajar), Nugroho Notosusanto (Tentara Peta), Han Bing Siong (Sistem Administrasi), Peter Post (Ekonomi Elite Pribumi).

Dalam kajian yang saya temukan seperti diatas tersebut, ternyata peranan birokrasi dalam kaitannya dengan aktivitas politik belum ada penelitian sebelumnya. Namun demikian secara substantif peran birokrasi khususnya Pangreh Praja di Jawa telah dikaji oleh Sato Shigeru. Temuan Shigeru lebih menekankan pada penafsiran yang bersifat xeno centris (membenarkan perilaku birokrasi/Pangreh Praja). Hal ini tercermin dari kesimpulan yang dibuatnya bahwa kebijakan pangreh praja dikatakan membela kepentingan rakyat, kebijakan Jepang dapat dilaksanakan oleh masyarakat di pedesaan serta pengaruh pendudukan Jepang dianggap hanya berpengaruh terhadap sistem administrasi di daerah.

Bahwa temuan yang saya rumuskan dalam kesimpulan tesis ini justru **menolak** temuan/pandangan Sato Shigeru tersebut. Hal ini karena sistem birokrasi pada masa pendudukan Jepang tidak semata-mata berkaitan dengan administrasi di daerah, tetapi juga menyangkut berbagai bidang kehidupan rakyat seperti bidang politik, ekonomi dan budaya. Kebijakan birokrasi dalam prakteknya justru tidak sesuai dengan keinginan rakyat dan tidak membela kepentingan rakyat khususnya di pedesaan sehingga timbul

kemudian pemberontakan oleh para petani seperti yang terjadi di Sukamanah dan Karangampel.

Dalam kaitannya dengan relevansi analisis Guillermo O'Donnell dalam upaya memahami sistem birokrasi pada pendudukan Jepang dapat dijelaskan seperti berikut. Birokrasi Otoriter adalah sebuah gejala sistem politik spesifik sebagai salah satu respon terhadap apa yang disebut sebagai proses deepening (perluasan) dari industrialisasi dan pembangunan demokrasi.¹ Dipihak lain Guillermo O'Donnelli menjelaskan bahwa ciri-ciri birokrasi otoriter tercermin dari adanya dominasi melalui struktur kelas, terdapat sarana pemaksa, sistem politik yang eksklusif, penindasan terhadap warga negara, tidak mengikutsertakan sektor rakyat, transnasionalisasi struktur produksi, mendepolitisasi permasalahan serta tertutupnya saluran demokrasi.²

Berdasarkan hasil temuan penulis, ternyata memperkuat teori tersebut diatas. Bahwa kedatangan Jepang di Indonesia tidak terlepas dari perkembangan lebih lanjut dari proses industrialisasi yang berkembang di Jepang setelah Meiji Restorasi untuk membuka diri terhadap bangsa asing. Sebagai negara industri

¹ Muhamad AS Hikam, 1991, *Negara Otoriter Birokratik dan Demokratisasi*, Jurnal Ilmu Politik Nomor 8, halaman 68

² O'Donnell, Guilermo, 1992, *Berbagai Ketergantungan di Negara Otoriter Birokratik dan Masalah Demokrasi*, Dalam Macridis, Roy C. dan Bernard Brown (ed), *Perbandingan Politik*, Penerbit Erlangga, Jakarta halaman 201-202

“baru” (kapitalisme pinggiran) tentunya sangat memerlukan bahan-bahan untuk kebutuhan industrinya seperti sumber energi (minyak bumi, batubara), serta bahan-bahan baku industri seperti timah, bijih besi, tembaga dan juga tempat pemasaran manakala industrinya telah berproduksi. Sedangkan bahan modal dan teknologi mereka dapatkan dari negara-negara barat seperti Amerika Serikat, Inggris dan Perancis. Dalam rangka memperoleh semua itu, sebenarnya sejak semua Jepang telah merancang sistem pemerintahan yang bersifat otoriter tercermin dalam Undang-Undang Nomor 1 tanggal 7 Maret 1942.

Dalam praktek pemerintahan yang dilaksanakan Jepang di Indonesia secara teoritis mendukung teori yang dikemukakan oleh Donnell (Birokrasi Otoriter) walaupun tidak semua karakteristiknya terdapat pada masa pendudukan Jepang. Pemaksaan terjadi melalui sarana organisasi yang dibentuk Jepang baik itu organisasi pemuda, semi militer maupun militer, Romusha dan Tonari Gumi, yang semata-mata untuk kepentingan Jepang. Terjadinya penindasan tercermin dari pemaksaan terhadap rakyat untuk menyerahkan hasil bumi mereka yang kemudian berakibat munculnya pemberontakan dari para petani.

Dalam kaitannya dengan munculnya aktivitas politik seperti yang dikatakan oleh Samuel P. Huntington, yang dapat terjadi

antara lain karena pengaruh kaum intelektual, komunikasi massa modern, keterlibatan pemerintah dalam bidang ekonomi dan terjadinya konflik diantara para pimpinan.³ Kaum intelektual sebagai organiser hegemoni merupakan kelompok dominan yang menjalankan fungsi khusus hegemoni sosial dan pemerintahan sosial, baik mereka yang berasal dari intelektual tradisional maupun organik.

Analisis terhadap munculnya suatu gerakan sebagai salah satu aktivitas politik yang oleh Arnold Toynbee dikatakan bahwa suatu gerakan bermula dari adanya kegiatan beberapa orang dan dialami hanya oleh sebagian rakyat kecil yang aktif, sedangkan orang banyak mengikuti dibelakangnya ternyata terdapat banyak hal (walaupun tidak seluruhnya) juga terjadi pada masa pendudukan Jepang sehingga secara teoritis relevan sebagai bahan kajian.

Berangkat dari teori tersebut diatas, dalam temuan penulis ternyata secara teoritis mendukung teori tersebut. Data sejarah menunjukkan bahwa kaum intelektual sangat menonjol peranannya tercermin dari organisasi pemuda, pelajar dan mahasiswa memberikan banyak kontribusi dalam perjuangan

³ Huntington, Samuel P. dan Joan Nelson, 1994, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, Penerbit Rineka Cita, Jakarta, halaman 7

melawan Jepang terutama yang bermarkas di Prapatan 10 dan Menteng 31.

Dalam kaitannya dengan peranan media massa, bahwa diantara tokoh pejuang itu terdapat dari kalangan wartawan seperti B.M.Diah, Adam Malik, Wikana, Sukarni. Tentang keterlibatan pemerintah dalam urusan sosial ekonomi tercermin dari adanya kebijakan pemerintah dalam catu bahan-bahan pangan. Adanya penyerahan wajib bagi para petani terhadap hasil pertanian mereka kepada Jepang mengakibatkan penderitaan bagi petani karena mereka kekurangan bahan pangan, dilain pihak harga kebutuhan di pasaran gelap sangat tinggi dan tidak terjangkau oleh mereka yang kemudian berakibat terjadinya bahaya kelaparan.

Indikasi terakhir dari Huntington tentang konflik diantara para pemimpin terjadi pada kelompok tua dengan kelompok muda. Hal ini tercermin dari timbulnya peristiwa Rengasdengklok tanggal 16 Agustus 1945 yang merupakan salah satu strategi dalam memperoleh peluang untuk tampil sebagai pemimpin.

C. Kekurangan/Keterbatasan Penelitian Ini

Penelitian tesis ini memiliki kekurangan atau keterbatasan dalam beberapa hal seperti berikut. Seperti diuraikan dalam Bab V, bahwa dalam memahami pemerintahan Jepang sebagai

Bureaucratic Authoritarian State dianalisis atas dasar teori yang dikemukakan oleh Guillermo O'Donnell yang didasarkan atas fenomena yang terjadi di Amerika Latin. Penerapan kajian ini pada masa pendudukan Jepang tentunya terkait dengan *dimensi ruang dan waktu* yang melekat pada peristiwa sejarah. Dengan demikian dilihat dari aspek ini tentunya terdapat perbedaan yang mendasar dalam hal kondisi Amerika Latin dengan Asia (Indonesia). Oleh karena itu penerapan kajian Guillermo O'Donnell dalam kasus pendudukan Jepang tentunya memiliki tingkat ketajaman yang berbeda sehingga tidak semua prinsip-prinsip dari birokrasi otoriter yang dikemukakan itu relevan untuk memahami fenomena pendudukan Jepang di Indonesia. Walau terdapat keterbatasan seperti diatas, namun secara umum dasar analisis yang dikemukakan O'Donnell tersebut walaupun dibedakan atas ruang dan waktu, juga situasi dan kondisi masing-masing negara akan tetapi teori ini masih mampu memberikan penjelasan mengingat terdapat fenomena yang terjadi memiliki persamaan antara yang terjadi di Amerika Latin dengan fenomena yang terjadi pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Kedua fenomena tersebut dapat dibandingkan dilihat dari proses sejarahnya seperti berikut.

Bahwa munculnya Birokrasi Otoriter pada masa pendudukan Jepang lebih banyak disebabkan oleh karena setelah Meiji

Restorasi yang terjadi 14 Desember 1867 terjadi perubahan kehidupan kenegaraan (penggantian Shogun kepada Tenno). Oleh karena golongan militer yang berasal dari kaum Samurai memegang kendali sebagai pimpinan politik, akibatnya karakter pemerintahannya bersifat otoriter dan ekspansionis dalam upaya mewujudkan cita-cita Jepang menguasai Asia khususnya Indonesia. Dalam rangka itu maka dilakukan modernisasi termasuk untuk angkatan perangnya, dan dalam pendudukannya di Indonesia melekat ciri birokrasi otoriter seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tanggal 7 Maret 1942.

Di lain pihak analisis Guillermo O'Donnell didasarkan pada situasi yang ada di Amerika Latin, khususnya di Brazil. Seperti halnya yang terjadi di Jepang setelah terjadinya Meiji Restorasi, Brazil pada tahun 1964 mengalami kehadiran otoritarisme politik dan modernisasi.⁴ Regim yang dihasilkan memiliki karakteristik dalam hal nilai dan ideologi, organisasi institusional kenegaraan, struktur otoritas, norma dan aturan main, praktik politik dan kebijakan publik. Karakteristik tersebut menggerakkan dukungan dan sifat dasar dari hubungan militer dan struktur otoriter.⁵

⁴ Martin, Luciano, 1993, " *Liberalisasi* " *Kekuasaan Otoriter di Brazil*, dalam *Transisi Menuju Demokrasi, Kasus Amerika Latin*, LP3ES, Jakarta halaman 113-114.

⁵ *Ibid*, halaman 116.

Disamping hal-hal tersebut diatas, keterbatasan dalam tesis ini juga terjadi dilihat dari sumber datanya. Bahwa sumber data yang jadi acuan adalah peristiwa masa lampau (sumber sejarah). Oleh karena pada masa pendudukan Jepang kurang tertibnya pengadministrasian (pengarsipan) oleh pemerintah sehingga menyulitkan memperoleh data-data primer.

Disamping itu data yang berasal dari pelaku sejarah sering tidak berupa "data" akan tetapi sudah berupa konstruksi sehingga menyulitkan dalam memilah antara data dan interpretasi. Namun demikian dengan mempergunakan teknik komparasi dan kritik sejarah hal ini dapat dinetralisir walaupun tidak menutup kemungkinan masih ada data yang bias.

Bahwa tesis ini dilihat dari sumber data dan lingkup waktu peristiwanya, adalah merupakan kajian sejarah, namun dalam penulisan ini dilakukan pendekatan dari aspek politik. Akibatnya adalah ada kecenderungan kaya akan data tapi miskin akan teori yang tercermin dalam kesimpulan yang ditarik lebih menekankan pada data sejarah dibandingkan dengan analisis melalui pendekatan ilmu politik.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdullah, Taufik, (ed), 1995, *The Heartbeat of Indonesian Revolution*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta.
- Akhmad Setiawan, 1988, *Perilaku Birokrasi Dalam Pengaruh Paham Kekuasaan Jawa*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Albrow, Martin, 1996, *Birokrasi*, PT. Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Almond, Gabriel A, 1997, *Sosialisasi, Kebudayaan dan Partisipasi politik*, dalam: Mohtar Mas'oe'd dan Colin Mac Andrews, (ed), *Perbandingan Politik*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Almond, Gabriel A, dan Sidney Verba, 1990, *Budaya Politik, Tingkah Laku Politik dan Demokrasi Dilima Negara*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
- Amrah Muslim, Mr, 1960, *Ikhtisar Perkembangan Otonomi Daerah 1903-1958*, Penerbit Djambatan, Jakarta.
- Anderson, Ben, 1988, *Revolusi Pemuda, Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-1946*, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Arbi Sanit, 1995, *Sistem Politik Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arsip Nasional Republik Indonesia, 1988, *Dibawah Pendudukan Jepang, Kenangan Empat Puluh Dua Orang yang mengalaminya*, Penerbitan Sejarah Lisan, Jakarta.
- Asmadi, 1985, *Pelajar Berjuang*, Penerbit Sinar Harapan, Jakarta.
- Aswab Mahasin, Ismed Natsir, 1983, *Cendekiawan dan Politik*, Penerbit LP3ES, Jakarta.

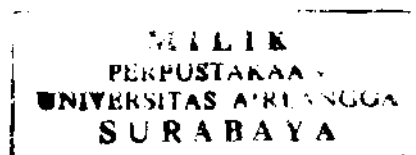
- Bayu Suryaningrat, 1992, *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- Benda, H.J., 1980, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit*, (terjemahan), Pustaka Jaya, Jakarta.
- Brandes, J.L.A. 1913, *Oud Javaansche Ootkonden, Nagelaten Transscripties*, Bataviaasvh Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, Bataavia, Albrecht and Co.
- Budiardjo, Miriam, 1985, *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa*, Penerbit Sinar Harapan, Jakarta.
- Dahm, Benhard, 1987, *Soekarno dan Perjuangan Kemerdekaan*, LP3ES, Jakarta.
- Diah, BM, 1983, *Angkatan Baru '45*, Penerbit Masa Merdeka, Jakarta.
- Dekker, 1975, *Sejarah Fergerakan Nasional Indonesia*, Lembaga Penerbitan "ALMAMATER" YKPK IKIP Malang.
- Downs, Anthony, 1967, *Inside Bureaucracy*, Little Brown and Company, Boston.
- Craib, Ian, 1986, *Teori-Teori Sosial Modern, Dari Parson sampai Habermas*, Penerbit, Rajawali, Jakarta.
- Frederick, William, H. , Soeri Soeroto, 1982, *Pemahaman Sejarah Indonesia*, Penerbit, LP3ES, Jakarta.
- Fukao, Yazuo dan Hermawan Sulisty, 1992, *Srtuktur Kekuasaan di Masyarakat dan Pengambilan Keputusan di Parlemen Jepang*, Jurnal Ilmu Politik, Nomor 11, Tahun 1992, halaman 70-83.
- Gidden, Anthony, 1985, *Kapitalisme dan Teori Sosial Modern*, Suatu analisis terhadap karya tulis Marx, Durkheim dan Max Weber, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.

- Gottschalk, Louis, 1975, *Understanding History : A Primer of Historical Method*, Terjemahan Nugroho Notosusanto, Mengerti Sejarah , Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Hanafi, A M, 1996, *Menteng 31, Markas Pemuda Revolusioner Angkatan 45*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Han Bing Siong, 1998, *The Japanese Occupation of Indonesia and the Administration of the Justice Today, Myths and Realities*, BIJDRAGEN, Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia and Oceania, halaman 416-456.
- Hatta, Mohammad, 1976, *Kumpulan Karangan*, Jilid I, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta.
- Hindley, Donald, 1987, *Local Opposition and Underground Resistance to the Javanese in Java 1942-1945*, Indonesia No. 7, April 1997, Cornell Southeast Asia Program.
- Huntington, Samuel P dan Joan Nelson, 1994, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- I Ketut Suradjaja, 1984, *Pergerakan Demokrasi Jepang*, Penerbit PT. Karya Unipress, Jakarta.
- I Ketut Suradjaja, 1985, *Masalah Pendidikan Sejarah di Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas Jepang, Kontradiksi Buku Teks Sejarah*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai tradisional, Jakarta.
- Iver, Mac, 1980, *Negara Modern*, Penerbit Aksara, Jakarta.
- Jones, Howard Palfrey, 1980, *Indonesia: The Possible Dream*, Gunung Agung (s) PTE LTD, Singapore, MCLXXX.
- Kahin, George Mc Turnan, 1955, *Nationalism and Revolution in Indonesia*, Cornell Univ. Press, Ithaca, New York.

- Ken'ichi, Goto, 1996, *Modern Japan and Indonesia, The Dynamics and Legacy Wartime Rule*, BIJDRAGEN, Journal of the Royal Institute of Linguistics and Anthropology, Deel 152, 4e, halaman 536-553.
- Ken'ichi, Goto, 1998, *Jepang dan Pergerakan Kebangsaan Indonesia*, Yayasan Obor, Jakarta.
- Koch, D.M.G, 1951, *Om De Vrijheid, De Nationalistische Beweging in Indonesie*, Jajasan Pembangunan, Vorkink, Bandung.
- Kunio, Yoshihara, 1983, *Perkembangan Ekonomi Jepang, Sebuah Pengantar*, Penerbit PT.Gramedia, Jakarta.
- Kurasawa, Aiko, 1993, *Mobilisasi dan Kontrol, Studi tentang Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa, 1942-1945*, Penerbit PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Lebra, Joyce, C, 1988, *Tentora Gemblengan Jepang*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Manuel Kaisiepo, 1987, *Dari Kepolitikkan Birokratik ke Korporatisme Negara, Birikrasi dan Pilitik di Indonesia Era Orde Baru*, Jurnal Ilmu Politik, Nomor 2 Tahun 1987, halaman 22-33.
- Martin, Luciano, 1993, *"Liberalisasi " Kekuasaan Otoniter di Brazil, Dalam Transisi Menuju Demokrasi, Kasus di Amerika Latin*, LP3ES, Jakarta halaman 107-143
- Marwati Djoened Poesponegoro, Nugroho Notosusanto, 1984, *Sejarah Nasional Indonesia*, Jilid II, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta.
- Marwati Djoened Poesponegoro, Nugroho Notcsusanto, 1984, *Sejarah Nasional Indonesia*, Jilid III, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta.
- Marwati Djoened Poesponegoro, Nugroho Notosusanto, 1984, *Sejarah Nasional Indonesia*, Jilid IV, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta.

- Marwati Djoened Poesponegoro, Nugroho Notosusanto, 1984, *Sejarah Nasional Indonesia*, Jilid V, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta.
- Marwati Djoened Poesponegoro, Nugroho Notosusanto, 1984, *Sejarah Nasional Indonesia*, Jilid VI, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta.
- Moedjanto, GM, 1987, *Konsep Kekuasaan Jawa*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Moertono, Soemarsaid, 1968, *State and Statecraft in Old Java: A Study of the Later Mataram Period, 16th to 19th Century*, Cornell University Itchaca , New York.
- Mohtar Mas'oed dan Colin Mac Andrews, (ed) 1997, *Perbandingan Politik*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Mona Lohanda, 1997, *Penetrasi Jepang di Perairan Hindia Belanda*, Fakultas Sastra Universitas Indonesia, Jakarta.
- Moleong, Lexi J, 1996, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muhammad A S. Hikam, 1991, *Negara Otoriter Birokratik dan Demokratisasi*, Jurnal Ilmu Politik , Nomor 8, halaman 66-92.
- Murdiono, dkk, 1994, *Birokrasi dan Administgrasi Pembangunan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Ndraha, Taliziduhu, 1986, *Birokrasi Pembangunan: Dominasi atau Alat Demokrasi*, Jurnal Ilmu Politik, Nomor 1, halaman 48-55.
- Nezar Patria dan Andie Arief, 1999, *Antonio Gramsci, Negara dan Hegemoni*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Neuwmann, Franz L, 1992, *Teori Diktator, Sebuah Catatan*, dalam: Macridis, Roy C, dan Bernhard Brown (ed) , *Perbandingan Politik*, Penerbit Erlangga, Jakarta.

- Niel, Robert, van, 1984, *Munculnya Elit Modern Indonesia*, Penerbit Pustaka Jaya, Jakarta.
- Nurman, H Nie dan Sidney Verba, *Partisipasi Politik*, dalam: Macridis, Roy C dan Bernhard Brown (ed), *Perbandingan Politik*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- O'Donnell, Guillermo, 1992, *Berbagai Ketergantungan di Negara Otoriter-Birokratik dan Masalah Demokrasi*, dalam: Macridis, Roy C dan Bernhard Brown (ed) *Perbandingan Politik*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Ongkhokham, 1987, *Runtuhnya Hindia Belanda*, Penerbit PT. Gramedia, Jakarta.
- Pompe, Bas, 1996, *The Effect of the Japanese Administration on the Judiciary in Indonesia*, BIJDRAGEN, Journal of the Royal Institute of Linguistics and Anthropology , Deel 152, 4e, halaman 573-585.
- Post, Peter, 1996, *The Formation of the Pribumi Business Elite in Indonesia, 1930s-1940s*, BIJDRAGEN, Journal of the Royal Institute of Linguistics and Anthropology, Deel 152, 4e, halaman 609-632.
- Purbo S. Suwondo, (ed), 1996, *PETA, Tentara Sukarela Pembela Tanah Air di Jawa dan Sumatra 1942-1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Pringgodigdo, A.K, 1980, *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*, Penerbit Dian Rakyat, Jakarta.
- Priyo Budi Santoso, 1995, *Birokrasi Pemerintahan Orde Baru, Perspektif Kultural dan Struktural*, Penerbit, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ramlan Surbakti, 1992, *Pemahaman Ilmu Politik*, PT. Gramedia Widiasarana, Jakarta.
- Ramlan Surbakti, 1996, (a), *Karakteristik dan Penampilan Birokrasi Perkotaan*, Prisma Nomor 4, April 1996, halaman 15-30.



- Ramlan Surbakti, 1996 (b), *Birokrasi Berdimensi Kerakyatan*, Makalah Seminar, Universitas Muhammadiyah Malang.
- Rigg, Fred W. (ed), 1996, *Administrasi dan Birokrasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sartono Kartodirdjo, 1990, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional*, Penerbit PT Gramedia, Jakarta.
- Sartono Kartodirdjo, 1992, *Penguatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, Penerbit PT. Gramedia, Jakarta.
- Shigeru, Sato, 1996, *The Pangreh Praja in Java Under Japanese Military Rule*, BIJDAGEN, Journal of the Royal Institute of Linguistics and Anthropology, Deel 152, 4e, halaman 586-609.
- Simon, Roger, 1999, *Gagasan-Gagasan Politik Gramsci*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Shigeru, Sato, 1994, *War Nationalism and Peasant, Java under the Japanese Occupation 1942-1945*, Journal of Southeast Asian Studies 27, 2, 1996, halaman 430-432.
- Sutherland, Heather, 1983, *Terbentuknya Sebuah Elite Birokrasi*, Penerbit PT. Sinar Harapan, Jakarta.
- Suwarno, P.J, 1994, *Hamengku Buwono IX dan Sistem Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta 1942-1974*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Soejono Martosewojo, (ed) 1984, *Mahasiswa Prapatan 10: Pengabdianannya*, Penerbit, Patma, Bandung.
- Syaifullah, 1997, *Gerakan Politik Muhammadiyah, Dalam Masyumi*, Grafiti, Jakarta.
- Syamsuddin Haris, 1997, *Pembinaan Politik, Demokrasi dan Pembentukan Civil Society, Problematik Kepartaian Indonesia di Bawah Orde Baru*, Jurnal Ilmu Politik Nomor 17, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, halaman 58-68.

- The Liang Gie, 1993, *Pertumbuhan Pemerintah Daerah di Negara Republik Indonesia*, Jilid I, Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- Touwen-Bouwsma dan Elly , 1966, *Japanese Minority Policy, The Eurasians on Java and the Dilemma of Ethnic Loyalty*, BIJDAGEN, Journal of the Royal Institute of the Linguistics and Anthropology, Deel 152, 4e, halaman 553-585.
- Von Heine Gelderen, R, 1972, *Conception of State and Kingship in Southeast Asia*, (terjemahan Deliar Noer) Cetakan II, IKIP Jakarta.
- Weber, Max, 1989, *Kapitalisme Birokrasi dan Agama*, Pt. Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Weiner, Myron, 1966, *Modernization: The Dynamics of Growth*, Voice of American Forum Lectures.
- Wilson, John, 1983, *Social Theory*, Prentice-Hall, Inc, Englewood Cliffs, New Jersey.
- Woodward, Mark R. 1999, *Islam Jawa, Kesalehan Normatif versus Kebatinan*, Penerbit LkiS Yogyakarta.
- Yamin, Muh, 1960, *Tata Negara Majapahit*, (tujuh jilid), Yayasan Prapanca, Jakarta.
- Yasuyuki, Hikita, *Japanese Companies' inroads into Indonesia under Japanese Military Domination*, BIJDAGEN, Journal of the Royal Institute of Linguistics and Anthropology, Deel 152, 4e, halaman 566-669.
- Yoshimasa, Shibata, *The Monetary Policy in Netherlands East Indies under the Japanese Administration* , BIJDAGEN, Journal of the Royal Institute of Linguistics and Anthropology, Deel 152, 4e, halaman 699-725.

Lampiran: 1

Nama-nama anggota Tjoeo Sangi In

Ir. Soekarno
 R.M.A.A. Koesoemo Oetojo
 Dr.R.Buntaran Martoatmodjo

Gitjo
 Foekoe Gitjo
 Foekoe Gitjo

Anggota-anggota:

Dilantik 20 orang

K.H.Abdoel Halim
 Dr.Abdoel Rasjid
 K.H.Bagus Hadikoesoemo
 Ki Hajar Dewantara
 Prof.Dr.P.A.A.Husein Djajadiningrat
 Liem Thwan Tik
 K.H. Mas Mansoer
 Drs. Moh.Hatta
 Oey Tiang Tjoei
 Oey Tjong Hauw
 R. Otto Iskandar Dinata
 R. Pandji Soeroso
 R. Rooslan Wongsokoesoemo
 Dr. Samsi
 Mr. R. Samsoedin
 Mr. R.M. Sartono
 R. Soekardjo Wirjopranoto
 P.A. Soerjadiningrat
 K.H. Abd. Wahid Hasjim
 K.R.M.T.H Woerjaningrat

Cirebon
 Jakarta Tokoebetoe shi
 Jakarta
 Jakarta Tokoebetoe shi
 Jakarta Tokoebetoe shi
 Surabaya
 Jakarta Tokoebetoe shi
 Jakarta Tokoebetoe shi
 Jakarta Tokoebetoe shi
 Semarang
 Bandung
 Malang
 Surabaya
 Surabaya
 Jakarta Tokoebetoe shi
 Jakarta Tokoebetoe shi
 Jakarta Tokoebetoe shi
 Jogjakarta
 Surabaya Jombang
 Tebu Ireng
 Solo

Dipilih 18 orang

R. Aris
 R.H. Fathoerahman
 R. Ibrahim Singadilaga
 Mr. Iskaq Tjokrohadisoerjo
 Dr. Maas
 Dr. Marzoeki Mahdi
 Dr. Moh. Toha
 R. Prodjowidagdo
 Dr. K.R.T. Radjiman Wediodiningrat
 Ir.R Rooseno
 Dr. R. Sardjono Danosoebroto
 Mr. R Soejoedi

Cepu
 Bojonegoro Tuban
 Jakarta Purwakarata
 Surabaya
 Pekalongan
 Bogor
 Cirebon
 Kedu Magelang
 Madiun Walikukun
 Kediri
 Banyumas Proboiinggo
 Semarang

Mr. R. Soenarko
Mr. R. Soendoro Boedhyarto
R.Z. Soeriakertalegawa
R.A.A. Soerjonegoro
Ir. M.A. Safwan
M. Soetisna Sendjaja

Malang
Besuki Jember
Banten Serang
Madura Bangkalan
Jakarta Tokoebetoe shi
Priangan Tasikmalaya

Dianjurkan 2 orang

B.P.H Poeroebojc
Drs. K.R.M.A. Sosrodiningrat

Jogyakarta kotji
Solo kotji

Lampiran: 2

Nama-nama anggota BPUPKI

Kaityo : Dr. K.R.T Radjiman Wediodiningrat
 Foekoe Kaityo : Ichibangsae (Shutjokan Cirebon)
 Foekoe Kaityo : R.P Soeroso (Shutjokan Kedu)

Anggota (lin) 60 orang

1. Ir. Soekarno
2. Mr. Moch. Yamin
3. Dr. R. Koesoemah Atmadja
4. R. Abdoelrahim Pratalykrama
5. R. Aris
6. Ki Hajar Dewantara
7. Ki Bagoes Hadikoesoemo
8. B.P.M. Bintoro
9. Abdoel Kahar Moezakkir
10. B.P.H. Poeroebojo
11. R.A.A. Wiranata Koesoema
12. Ir. Ashar Soetedjo Moesnandar
13. Oey Tiang Tjoei
14. Drs. Moh. Hatta
15. Oei Tjong Hauw
16. H. Agoes Salim
17. M. Soetardjo Kartohadikoesoemo
18. R.M. Margono Djojohadikoesoemo
19. K.H. Abdul Halim
20. K.H. Masjkoer
21. R. Soedirman
22. Prof. Dr. P.A.A. Hoesein Djajadiningrat
23. Prof. Mr. Dr. R. Soepomo
24. Prof. Ir. R. Roeseno
25. Mr. R.P. Singgih
26. Mr. N.J. Maria Oelfah Santoso
27. R.M.T.A Soerjo
28. R. Roeslan Wongsokoesoemo
29. Mr. R. Soesanto Tirtoprodjo
30. N.J.R.S.S. Soenarjo Mangoenpoespito
31. Dr. R. Boentaran Martoatmodjo
32. Liem Koen Hian
33. Mr. J. Latuharhary
34. Mr. R. Hendro Martono
35. R. Soekardjo Wirjopranoto
36. Hadji Ahmad Sanusi
37. A.M. Dasaad

38. Mr. Tan Eng Hoa
39. Ir. R. N. P. Soerahman Tjokroadisoerio
40. R. A. A. Soemitro Kolopaking Poerbonegoro
41. K. K. M. T. H. Woerjaningrat
42. Mr. A. Soebardjo
43. Prof. Dr. R. Djaelani Asikin Widjojokoesoema
44. Abikoeso Tjokrosoejoso
45. Parada Harahap
46. Mr. P. M. Sartono
47. K. H. Mas Mansjoer
48. Drs. K. R. M. A. Sosroadiningrat
49. Mr. R. Soewandi
50. K. H. Wachid Hasyim
51. P. F. Dabler
52. Dr. Soekiman
53. Mr. K. R. M. T. Wongsonegoro
54. R. Oto Iskandardinata
55. A. Baswedan
56. Abdoel Kadir
57. Dr. Samsi
58. Mr. A. A. Maramis
59. Mr. R. Samsedin
60. Mr. R. Sastromoeljono